



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH LAMPUNG
Jl. RW. MONGINSIDI NO. 184, BANDAR LAMPUNG
Telepon : 0721-474813 Faksimili : 0721-471060
Laman : <https://lampung.kemenkumham.go.id>

Nomor : W.9.PR.04.04 – 262 21 Januari 2022
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kantor Wilayah Lampung Tahun 2021

Yth. Kepala Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
di -
Tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : SEK.1-PR.03-15 Tanggal 11 Januari 2022 tentang Permintaan Data Laporan Kinerja Unit Eselon I dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung 2021.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Iwan Santoso

NIP. 19700430 199103 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH LAMPUNG

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2021

**KANWIL
KEMENKUMHAM
LAMPUNG**

2021



KATA PENGANTAR



Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemudahan dan petunjuk-Nya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2021.

Sebagai perwujudan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja pada periode tertentu.

Disamping itu Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung pada masa mendatang.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, serta pemangku kepentingan khususnya pihak-pihak yang membutuhkan.



Plt. Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Iwan Santoso
NIP. 19700430 199103 1 001



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung berisikan tentang Capaian Kinerja dan Kendala yang dihadapi Kantor Wilayah Lampung sepanjang tahun 2021 dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan di tahun 2021.

Tahun 2021, merupakan tahun ke-2 pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024. Secara keseluruhan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung beserta Jajaran telah tercapai dengan baik sesuai indikator yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja (PK) dan Target Kinerja (Tarja) Tahun 2021 yang tercermin dari hasil realisasi sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja (PK), terdapat 45 indikator yang telah mencapai target atau bahkan melebihi target.
2. Target Kinerja (Tarja), terdapat 27 Target yang telah mencapai target atau bahkan melebihi target.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2021 masih menghadapi tantangan yang luarbiasa terlebih dengan adanya Pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 hingga akhir tahun 2021 ini masih terus melanda diseluruh penjuru negeri Ibu Pertiwi.

Sementara itu capaian kinerja dari aspek keuangan, penyerapan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung tahun 2021 mencapai 98,24% atau sebesar Rp. 235.791.055.183,- dari total anggaran sebesar Rp. 239.763.610.000,- . Hal tersebut merupakan akibat dari terjadinya pandemi Covid-19, beberapa kegiatan perjalanan dinas, rapat, koordinasi dan sosialisasi sedapat mungkin ditunda atau dilaksanakan secara *Virtual Zoom*. Walaupun capaian kinerja dari aspek serapan anggaran belum mencapai 100% , namun apabila dinilai dari kualitas kegiatan dan seluruh program kegiatan dapat terlaksana, maka dapat dikatakan pelaksanaan program kegiatan pada Kantor Wilayah Lampung berjalan dengan baik dan efisien.

Sasaran SAKIP adalah menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif serta responsif terhadap kebutuhan dan isu strategis yang terjadi dalam masyarakat dan lingkungan. Terwujudnya transparansi dalam penggunaan APBN merupakan tonggak utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, untuk itulah LKIP disusun secara tepat, jelas, dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban tugas pemerintah. Dengan dilaksanakannya SAKIP secara tepat dan bersinergis maka diharapkan terdapat peningkatan kinerja dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintah.



1. Latar Belakang

a. Umum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung yang merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkedudukan di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah bersangkutan dan dalam menjalankan tugasnya harus dapat bekerja sama secara sinergis dengan instansi terkait.

Dalam kegiatan konsolidasi dan koordinasi internal dilaksanakan dengan seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung baik dengan pejabat struktural dan pegawai di Kantor Wilayah serta Unit Pelaksana Teknis maupun melalui monitoring, peninjauan dan pengarahan pada jajaran Unit Pelaksana Teknis Imigrasi dan Pemasarakatan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

Kegiatan koordinasi dan kolaborasi eksternal dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah Lampung, Ketua Pengadilan Tinggi dan seluruh stakeholder di Propinsi Lampung. Khusus dengan aparat penegak hukum di Propinsi Lampung koordinasi dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Dilkumjakpol sebagai sarana proses penegakkan hukum dalam Integrated Criminal Justice System di wilayah Provinsi Lampung.

Tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik atau yang biasa disebut good governance dalam suatu negara merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Pemerintah wajib menerapkan kaidahkaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip good governance. Salah satu perwujudan Good Governance, pemerintah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Hal ini disebabkan karena akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip-prinsip good Governance. United Nations Development Program (UNDP) mengajukan sembilan karakteristik goodgovernance yang salah satunya adalah accountability (akuntabilitas). Ditambah lagi prinsip akuntabilitas juga merupakan salah satu dari tujuh asas penerapan good governance dalam acuan umum penerapan good governance pada sector publik oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Untuk itulah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun secara tepat, jelas, dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban tugas pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai tujuan sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Sehingga penyusunan Laporan Kinerja dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan



memantau kinerja sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi salah satu dasar hukum yang dipedomani oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah berdasarkan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja dengan sumber anggaran berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2021.

b. Visi dan Misi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam pelaksanaan tugas adalah menjadikan *Peningkatan Produktivitas Sebagai Prioritas*. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah:

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia :

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong"

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.



Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi di lingkungan Kementerian/LPNK tersebut, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM, sebagai berikut :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: *“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*

Dan sebagai salah satu Satuan Kerja dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melaksanakan Visi dan Misi tersebut diatas.

c. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Provinsi Lampung, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM. Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas : “Melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan”

- Fungsi :
1. Pengorganisasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
 2. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum;
 3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
 4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dibidang Keimigrasian dan bidang Pemasarakatan;
 5. Penguatan dan pelayanan HAM untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM;
 6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

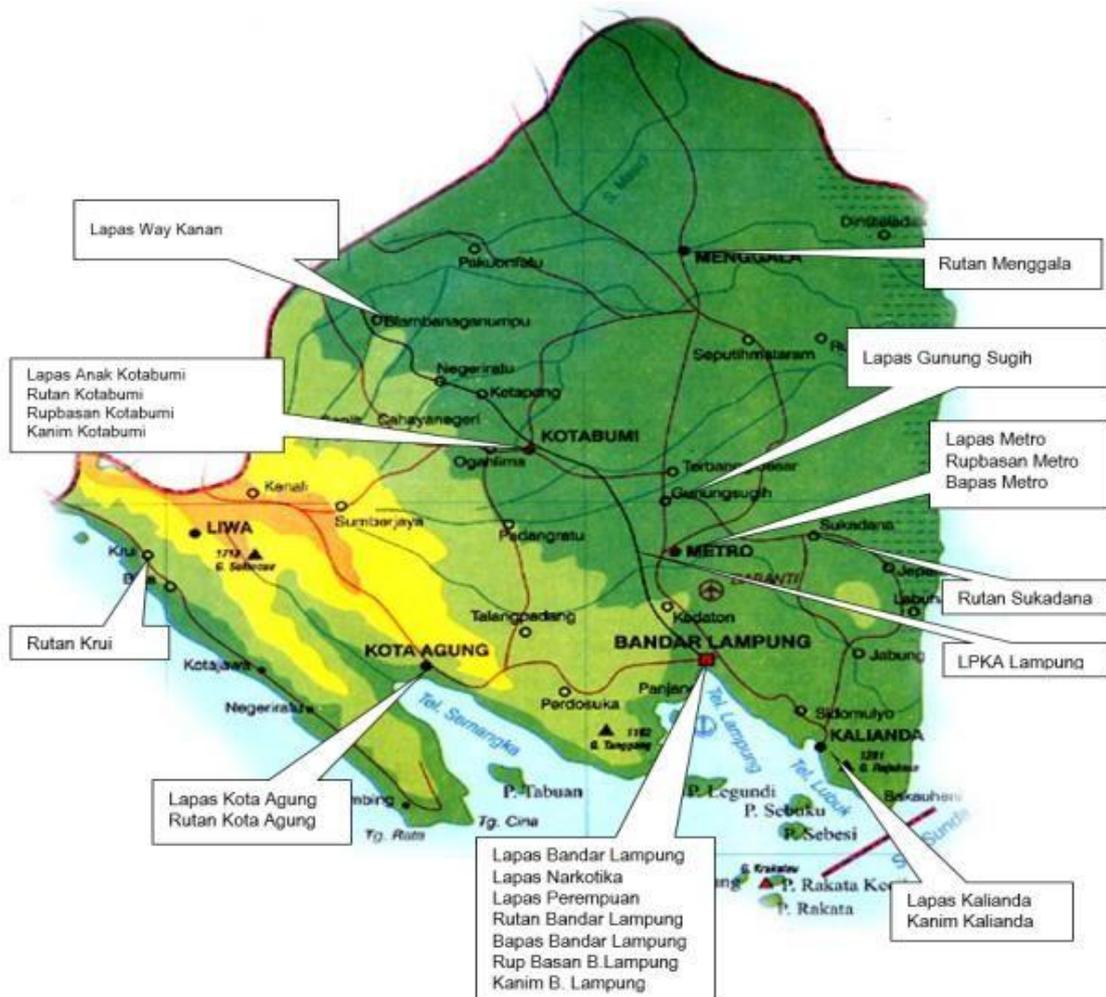
d. Organisasi

Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3/1964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan Karesidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kendatipun Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 Maret 1964 tersebut secara administratif masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, namun daerah ini jauh sebelum Indonesia merdeka memang telah menunjukkan potensi yang sangat besar serta corak warna kebudayaan tersendiri



yang dapat menambah khasanah adat budaya di Nusantara yang tercinta ini. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung dahulu bernama Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Lampung, berdiri pada tahun 1982 berdasarkan KEPMENKEH RI Nomor M-868.KP.04.10 Tanggal 07 April 1982. Pada saat itu Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Bengkulu masih bergabung dengan Propinsi Lampung, namun pada Tahun 1985 Propinsi Bengkulu tidak bergabung lagi dengan Propinsi Lampung. Seiring berjalannya waktu, Kementerian Hukum dan HAM beberapa kali mengalami pergantian nama yakni:

1. Departemen Kehakiman (1945 – 1999);
2. Departemen Hukum dan Perundang-Undangan (1999 – 2001);
3. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001 – 2004);
4. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004 – 2009);
5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2009 sampai dengan sekarang).



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung memiliki **26 (dua puluh enam) Unit Pelaksana Teknis** terdiri 10 (sepuluh) Lembaga Masyarakat, 6 (enam) Rumah Tahanan Negara, 4 (dua) Balai Masyarakat, 3 (tiga) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan 3 (tiga) Kantor Imigrasi sebagai berikut:



Lembaga Pemasyarakatan:

1. LAPAS Klas I A Bandar Lampung (Kota Bandar Lampung).
2. LAPAS Klas II A Kalianda (Kabupaten Lampung Selatan).
3. LAPAS Klas II A Metro (Kota Metro).
4. LAPAS Anak Klas II A Kota Bumi (Kabupaten Lampung Utara).
5. LAPAS Klas II B Kota Agung (Kabupaten Tanggamus).
6. LAPAS Narkotika Klas II A Bandar Lampung (Kota Bandar Lampung).
7. LAPAS Wanita Klas IIA Bandar Lampung (Kota Bandar Lampung).
8. Lapas Kelas IIB Way Kanan (Kabupaten Way Kanan).
9. Lapas Kelas III Gunung Sugih (Kabupeten Lampung Tengah).
10. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB (Kabupaten Pesawaran).

ii. Rumah Tahanan Negara

1. RUTAN Klas I Bandar Lampung (Kota Bandar Lampung).
2. RUTAN Sukadana (Kabupaten Lampung Timur).
3. RUTAN Menggala (Kabupaten Tulang Bawang).
4. RUTAN Krui (Kabupaten Pesisir Barat).
5. RUTAN Kotabumi (Lampung Utara).
6. RUTAN Kota Agung (Kabupaten Tanggamus).

iii. Balai Pemasyarakatan

1. BAPAS Klas II Bandar Lampung (Kota Bandar Lampung).
2. BAPAS Klas II Metro (Kota Bandar Metro).
3. BAPAS Klas II Kotabumi (Kabupaten Lampung Utara).
4. BAPAS Klas II Pringsewu (Kabupaten Pringsewu).

iv. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

1. RUPBASAN Klas I Bandar Lampung (Kota Bandar Lampung).
2. RUPBASAN Klas II Kota Bumi (Kabupaten Lampung Utara).
3. RUPBASAN Klas II Metro (Kota Metro).

v. Kantor IMIGRASI

1. Kantor Imigrasi Klas I Bandar Lampung (Kota Bandar Lampung).
2. Kantor Imigrasi Klas III Kalianda (Kabupaten Lampung Selatan).
3. Kantor Imigrasi Klas III Kotabumi (Kabupaten Lampung Utara).

Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung terdiri atas:

a. Divisi Administrasi:

1) Tugas :

- i. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah dibidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

2) Fungsi :

- i. Pengorganisasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah.



- ii. Pengorganisasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan.
- iii. Pengorganisasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi.
- iv. Pengorganisasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara.
- v. Pengorganisasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi.
- vi. Pengorganisasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah.
- vii. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

b. Divisi Pemasyarakatan:

- 1) Tugas :
 - i. Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah.
- 2) Fungsi :
 - i. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.
 - ii. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.
 - iii. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan.
 - iv. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksanan Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

c. Divisi Keimigrasian:

- 1) Tugas :
 - i. Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah.
- 2) Fungsi :
 - i. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis dibidang perijinan, pemberian persetujuan perijinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.



- ii. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang perijinan, pemberian persetujuan perijinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.
- iii. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian.
- iv. Pengoorganisasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

d. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia:

1) Tugas :

- i. Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah.

2) Fungsi :

- i. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengorganisasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengorganisasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan dibidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundangundangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya.
- ii. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengorganisasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengorganisasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan dibidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundangundangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya.
- iii. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- iv. Pengoorganisasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.



Keempat Divisi tersebut diatas dibagi menjadi 9 bagian / bidang dan 18 subbagian / subbidang, dengan rincian sebagai berikut:

1) Divisi Administrasi, terdiri dari 2 bagian, yaitu:

- a) Bagian Umum
 - i) Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga
 - ii) Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
- b) Bagian Program dan Hubungan Masyarakat
 - i) Subbagian Program dan Pelaporan
 - ii) Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi

2) Divisi Pemasyarakatan, terdiri dari 2 bidang, yaitu:

- a) Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi
 - i) Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama
 - ii) Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
- b) Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan
 - i) Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
 - ii) Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan

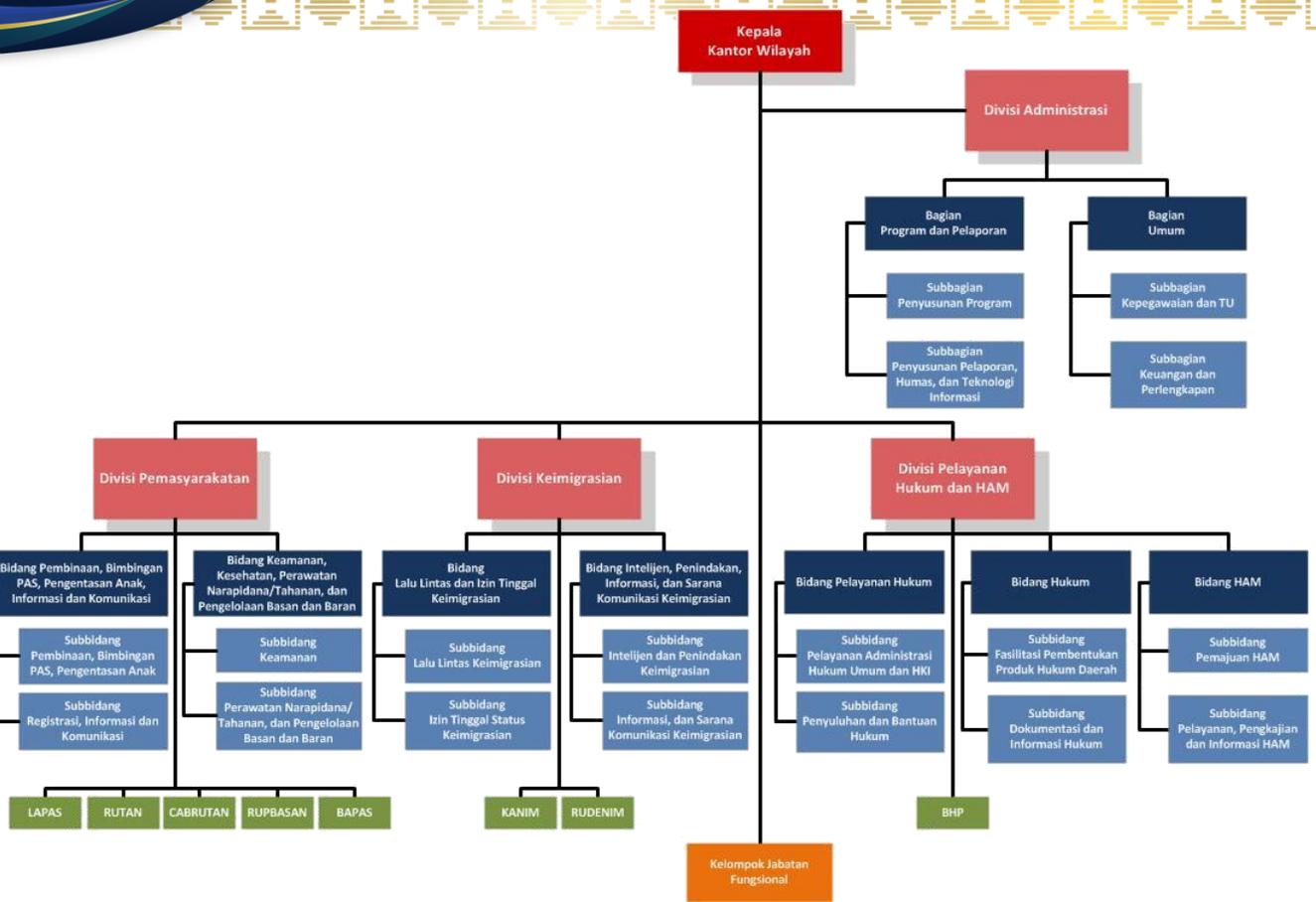
3) Divisi Keimigrasian, terdiri dari 2 bidang, yaitu:

- a) Bidang Perijinan dan Informasi Keimigrasian
 - i) Subbidang Perijinan Keimigrasian
 - ii) Subbidang Informasi Keimigrasian
- b) Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
 - i) Subbidang Intelijen Keimigrasian
 - ii) Subbidang Penindakan Keimigrasian

4) Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, terdiri dari 2 bidang, yaitu:

- a) Bidang Pelayanan Hukum
 - i) Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
 - ii) Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
- b) Bidang Hukum
 - i) Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah
 - ii) Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
- c) Bidang Hak Asasi Manusia
 - i) Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia
 - ii) Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM

Struktur organisasi Kantor Wilayah, sesuai dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat dilihat seperti gambar berikut ini:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan HAM Lampung

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung didukung oleh sumber daya manusia yang menjunjung tinggi profesionalisme dan berkompentensi tinggi. Dari jumlah Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung, yang *belum terdapat Satuan Kerja Pemasarakatan maupun Imigrasi* adalah **Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Barat** (4 Kabupaten).

Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung *per-tanggal 31 bulan Desember tahun 2021* menunjukkan terdapat **1.848 Pegawai** yang tersebar di **27 Satuan Kerja termasuk Kantor Wilayah**. Dan Kantor Wilayah sendiri memiliki 185 pegawai yang tersebar di empat divisi. Berdasarkan data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) tersebut, persebaran jumlah pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, berdasarkan gender, divisi, golongan, dan jabatan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

INFOGRAFIS PEGAWAI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH LAMPUNG

Berdasarkan Gender

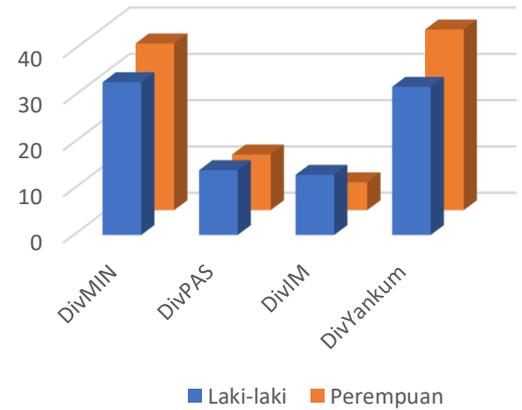
LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
92	93	185





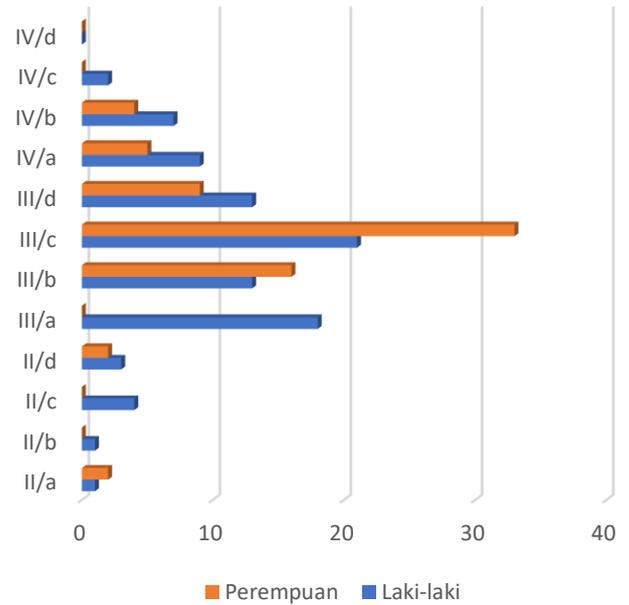
Berdasarkan Divisi

DIVISI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Administrasi	33	36
Pemasyarakatan	14	12
Keimigrasian	13	6
Pelayanan Hukum dan HAM	32	39
Jumlah	92	93



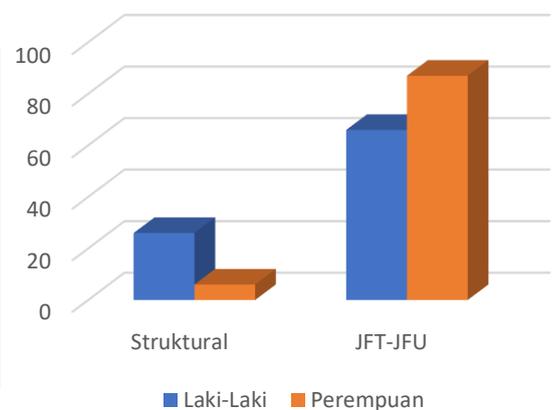
Berdasarkan Golongan

Golongan	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
II/a	1	2
II/b	1	0
II/c	4	0
II/d	3	2
III/a	18	22
III/b	13	16
III/c	21	33
III/d	13	9
IV/a	9	5
IV/b	7	4
IV/c	2	0
IV/d	0	0
Jumlah	92	93



Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Struktural	32	26	6
JFT/JFU	155	66	87
Jumlah	182	92	93





Data jumlah pegawai Jajaran Kantor Wilayah Lampung

NO.	SATUAN KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	92	93	185
2.	LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG	132	33	165
3.	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANDAR LAMPUNG	131	15	146
4.	LAPAS KELAS IIA METRO	77	16	93
5.	LAPAS KELAS IIA KALIANDA	83	6	89
6.	LAPAS KELAS IIA KOTABUMI	58	5	63
7.	LAPAS KELAS IIB KOTAAGUNG	57	11	68
8.	RUTAN KELAS I BANDAR LAMPUNG	111	17	128
9.	RUTAN KELAS IIB MANGGALA	47	5	52
10.	RUTAN KELAS IIB KRUI	39	6	45
11.	RUTAN KELAS IIB SUKADANA	46	5	51
12.	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDAR LAMPUNG	38	31	69
13.	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II METRO	35	16	51
14.	RUPBASAN KELAS II METRO	16	7	23
15.	RUPBASAN KELAS I BANDAR LAMPUNG	22	13	35
16.	RUPBASAN KELAS II KOTABUMI	14	1	15
17.	KANIM KELAS I TPI BANDAR LAMPUNG	42	27	69
18.	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA BANDAR LAMPUNG	27	77	104
19.	RUTAN KELAS IIB KOTABUMI	57	6	63
20.	LAPAS KELAS IIB WAYKANAN	55	4	59
21.	KANIM KELAS III NON TPI KALIANDA	17	4	21
22.	KANIM KELAS III NON TPI KOTABUMI	25	6	31
23.	RUTAN KELAS IIB KOTA AGUNG	35	4	39
24.	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDAR LAMPUNG	84	8	92
25.	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PRINGSEWU	7	5	12
26.	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KOTABUMI	8	0	8
27.	LAPAS KELAS IIB GUNUNG SUGIH	65	6	71
	JUMLAH			



Jabatan Fungsional Tertentu

Kantor Wilayah Lampung memiliki pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang bertugas pada Kantor Wilayah dan Jajaran Kantor Wilayah Lampung sebagai berikut:

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	PERANCANG PERATURAN PERUU PERTAMA	10
2	PERANCANG PERATURAN PERUU MUDA	14
3	PERANCANG PERATURAN PERUU MADYA	2
4	ANALIS KEIMIGRASIAN PERTAMA	30
5	ANALIS KEIMIGRASIAN MUDA	8
6	DOKTER PERTAMA	3
7	DOKTER MUDA	4
8	DOKTER MADYA	3
9	DOKTER GIGI MADYA	1
10	PERAWAT PERTAMA	6
11	PERAWAT MUDA	3
12	PUSTAKAWAN PERTAMA	1
13	PUSTAKAWAN MUDA	1
14	PRANATA KOMPUTER PERTAMA	1
15	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	4
16	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA	10
17	PENYULUH HUKUM PERTAMA	3
18	PENYULUH HUKUM MUDA	10
19	PENYULUH HUKUM MADYA	2
20	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA	7
21	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PERTAMA	55
22	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MUDA	25
23	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MADYA	4
24	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PERTAMA	1
25	PERAWAT PELAKSANA	1
26	PERAWAT PENYELIA	1
27	PERAWAT MAHIR	2



28	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PEMULA	5
29	ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PELAKSANA / TERAMPIL	6
30	ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN LANJUTAN / MAHIR	4
TOTAL		230

Kantor Wilayah Lampung memiliki **PPNPM** yang bertugas pada Kantor Wilayah sebagai berikut :

No	Tugas	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Pramusaji	7	3
2	Driver	5	-
3	Security	8	-
Jumlah		20	3

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung selama satu tahun periode tahun 2021, terdapat beberapa Isu Strategis / Permasalahan Organisasi yang dialami antara lain:

No	Isu Strategis / Permasalahan Organisasi	Solusi dan Tindak Lanjut
DIVISI ADMINISTRASI		
1	Koordinasi Konsultasi dan Penyiapan Rencana Kerja & Anggaran serta Supervisi Pagu Indikatif terhalang karena pandemic Covid-19	Dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi zoom meeting
2	Adanya penyebaran penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid - 19) mengakibatkan beberapa kegiatan yang ada di Divisi terkendala, sehingga penyerapan Anggaran pada semester I Tahun 2021 kurang maksimal	Pada Semester II, kegiatan yang belum dilaksanakan pada semester I akan segera dilaksanakan secara maksimal dengan mengedepankan protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah. Realokasi anggaran untuk kegiatan prioritas utama, misalnya refocussing anggaran untuk kegiatan penanggulangan dan pencegahan Covid-19
3	Pergantian operator baru pada Satker yang mengakibatkan sebagian tugas dan fungsi menjadi lambat untuk menindaklanjuti pemutakhiran data secara cepat dan akurat	Menyampaikan kepada satker agar pengkaderan seluruh bidang pelaporan, administrasi Keuangan dan BMN tidak secara serta merta namun secara bertahap.



4	Jaringan data internet kantor wilayah yang kurang memadai, sehingga sangat menghambat kegiatan yang dilaksanakan secara virtual	Menambah jalur internet khusus kegiatan virtual dengan kecepatan bandwiche yang memadai
5	<ul style="list-style-type: none">- Keamanan : Overstaying tahanan pada rutan dan lapas- Basan Baran : Overload basan baran pada Rupbasan kelas II Bandar Lampung dan telah terselesaikan dengan baik	<ul style="list-style-type: none">- Telah Terselenggaranya pertukaran data perkara pidana berbasis Teknologi Informasi yang transparan, efektif, efisien pada UPT Rutan dan Rupbasan- Overstaying tahanan pada lapas dan rutan dan telah dilakukan MOU untuk penyelesaian terkait overstaying pada lapas dan rutan- Pada Semester II telah terselesaikan dengan baik terkait Overload Basan Baran dengan dilakukannya MOU dalam penyelesaian masalah overload basan baran tersebut- Seluruh Lapas dan Rutan melakukan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait- Seluruh Lapas dan Rutan telah melaksanakan Deteksi Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban- Terlaksananya inspeksi mendadak dan tes urin bagi petugas dan narapidana/tahanan /anak dan pemindahan bandar narkoba ke lapas maximum security- Seluruh UPT telah melaksanakan validitas dan akurasi data keamanan pada fitur keamanan Aplikasi SDP- Lapas dan Rutan bebas dari peredaran gelap narkoba melalui optimalisasi pelaksanaan Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satopspatnal) :<ul style="list-style-type: none">- 1. Kedisiplinan Petugas- 2. Pelaksanaan Tugas- Pengamanan area Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) dan Pengaman Pintu Utama (P2U).- 3. Pelaksanaan Layanan Kunjungan- 4. Pelaksanaan Penjagaan.- 5. Pengamanan Pelaksanaan Mapenaling.- 6. Pelaksanaan Pengawalan.



		<ul style="list-style-type: none">- 7. Pelaksanaan Penempatan Narapidana/tahanan/ Anak Dalam Kamar Hunian.- 8. Layanan Penyediaan Makanan dan Kebutuhan Dasar Lainnya- 9. Layanan Registrasi dan Integrasi.- 10. Tertib Administasi dan keuangan
6	<p>Pengusulan Remisi Normal maupun Remisi Susulan secara online melalui Sistem Database Masyarakatan (SDP) sudah berjalan dengan lancar, namun masih adanya kendala beberapa usulan yang disampaikan ada beberapa kekurangan kelengkapan berkas yang belum diupload atau yang tidak sesuai seperti petikan putusan pengadilan, surat keterangan justice collaborator (bagi pidana khusus), surat perintah penangkapan, sehingga harus memperbaiki dulu baru dapat diusulkan kembali.</p> <p>Terdapat juga keterlambatan eksekusi dan BA17 sehingga narapidana harus diusulkan remisi susulan setelah eksekusi dan BA17 terbit.</p> <p>Sama halnya dengan pengusulan Remisi, pengusulan asimilasi dan integrasi secara online melalui SDP pun sudah berjalan dengan lancar, namun masih ditemukan usulan yang belum lengkap dokumennya, dikarenakan memang belum lengkap dan ada juga terkendala dalam proses pengiriman data dan dokumen (konsolidasi)</p>	<ul style="list-style-type: none">- Agar pengusulan remisi tidak terdapat kendala lagi, agar operator dan supervisor di Lapas, Rutan dan LPKA memperhatikan kelengkapan data, akurasi dan validasi pada saat upload dokumen sesuai dengan syarat-syarat dalam pengusulan remisi online sesuai dengan ketentuan- Agar operator dan supervisor di Lapas/Rutan/LPKA selalu mengecek dan mengontrol narapidana yang sudah memenuhi syarat untuk diusulkan mendapat remisi tepat waktu, sehingga tidak ada lagi narapidana yang terlambat dalam memperoleh remisi. <p>Untuk kelancaran pengusulan asimilasi dan integrasi agar seluruh operator dan supervisor di UPT Masyarakatan untuk memperhatikan kelengkapan data, akurasi dan validasi pada saat upload dokumen sesuai dengan syarat-syarat dalam pengusulan dan memastikan bahwa koneksi internet baik sehingga proses konsolidasi berjalan lancar.</p>
7	<p>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelaksanaan Keadilan Restoratif melalui Kelompok Masyarakat Peduli Masyarakatan (POKMAS LIPAS) pada tiap-tiap Bapas di Wilayah Lampung pada tahun 2021 dengan jumlah target 29 kegiatan</p>	<p>Pelaksanaan Kegiatan Pokmas di tahun 2022 akan semakin terus ditingkatkan dan dikembangkan baik dari segi kualitas serta kuantitas Pokmas di tiap wilayah dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Pokmas.</p>



	<p>Pokmas Bapas Wilayah Lampung, dan terlaksana 25 Kegiatan Pokmas.</p> <p>Hal ini cukup membanggakan karena meskipun di awal semester I sempat terkendala Pandemi Covid-19 yang memaksa kegiatan untuk vakum, namun di Semester II Pokmas Bapas sanggup mengejar ketertinggalan target pelaksanaan Pokmas dengan 2 Bapas yang melampaui target.</p>	<p>Sehingga dalam Implementasinya fungsi Pokmas dapat berjalan secara efektif, optimal dalam menjangkau lebih banyak klien pemasyarakatan dan tepat sasaran.</p>
8	<p>Masih diterapkannya Pembatasan Layanan Keimigrasian dalam rangka mencegah penyebaran Corona Virus Disease (COVID19) sebagaimana Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.GR.01.01-2144 Tahun 2020, tanggal 23 Maret 2020, sehingga menurunnya PNPB Imigrasi pada tahun 2021</p>	<ul style="list-style-type: none">- Setelah diterapkan Tatanan Norma Baru/New Normal mendorong UPT melaksanakan inovasi jemput bola/mobile/pelayanan paspor keliling dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.- Membuka layanan Eazy Paspor Melakukan reschedule pelayanan paspor simpatik
9	<p>Tidak adanya JFT yang menangani pengawasan notaris/ bidang Kenotariatan, padahal beban kerja pembinaan dan pengawasan notaris di Lampung sangat tinggi</p>	<p>Perlu adanya JFT di Bidang Kenotariatan/ Pengawasan Notaris yang ditempatkan di Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum pada Kanwil Kemenkumham</p>
10	<p>Belum adanya keseragaman pada setiap pemerintahan daerah terkait kedudukan Perancang Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah</p>
11	<p>Adanya Pandemi sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang</p>	<p>Melakukan koordinasi dengan Kabupaten / kota untuk melaksanakan kegiatan melalui media <i>Online / Zoom Meeting</i></p>

2. Dasar Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;



- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
- h. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

3. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menyusun Laporan Kinerja TA. 2021 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*). Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi Target Kinerja dan Capaian Kinerja yang terukur pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.
- b. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.
- c. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung secara berkelanjutan.

4. Pengertian dan Pengukuran Kinerja

Secara umum istilah kinerja digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu/organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi suatu organisasi. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Selanjutnya capaian kinerja tersebut perlu diukur dan dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana sasaran/target organisasi yang dapat dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu.



Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan atau target/sasaran yang telah ditentukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja dapat diukur melalui perbandingan antara realisasi/hasil pekerjaan dengan target/sasaran pekerjaan yang telah ditentukan sebagai tujuan organisasi.

Melaksanakan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sebagai instansi pemerintah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatannya atas alokasi anggaran yang telah digunakan selama kurun waktu 1 tahun anggaran dalam bentuk *Laporan Kinerja*. Laporan kinerja ini memuat target/sasaran kinerja yang telah ditentukan oleh masing-masing Unit Esselon I Kementerian Hukum dan HAM RI yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Target/sasaran kinerja ini disusun dalam suatu Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah dan disampaikan kepada pimpinan Unit Esselon I Kementerian Hukum dan HAM RI. Untuk menguraikan Perjanjian Kinerja tersebut disusunlah Perjanjian Kinerja Kepala Bagian/Bidang dan Perjanjian Kinerja Kepala Subbagian/Subbidang yang berisi target/sasaran kinerja program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran dan disampaikan kepada Kepala Divisi.

Dalam laporan kinerja juga menjelaskan realisasi capaian kinerja sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Dan selanjutnya pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target/sasaran kinerja dalam satuan persentase. Rumus pengukuran kinerja tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Laporan kinerja juga menyajikan gambaran alokasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran, dimana capaian realisasi anggaran diukur dalam satuan persentase dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Realisasi Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Melalui pengukuran ini, maka dapat diketahui tingkat keberhasilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam mencapai target/sasaran kerjanya. Selanjutnya dilakukan suatu analisa terhadap faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mencapai target/sasaran kinerja tersebut. Perlu ditemukan solusi terhadap faktor penghambat, sehingga laporan kinerja yang disusun dapat digunakan sebagai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung secara berkelanjutan.



5. Sistematika Penyajian

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2020 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas profil Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung , latar belakang, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta menjelaskan pengertian dan rumusan pengukuran kinerja yang digunakan. Sekaligus juga mengungkapkan isu strategis yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung .

BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan mengenai perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2021 yang disusun setiap divisi, termasuk pagu anggaran dan rencana realisasi anggarannya.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap divisi pada tahun 2021. Selanjutnya menjelaskan analisis atas capaian kinerja, termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut.

BAB IV

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja tahun 2021 serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Target/sasaran kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja TA. 2020 merupakan penjabaran dari tujuan, visi dan misi yang ingin dicapai Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Formulasi Perjanjian Kinerja TA. 2021 tersebut memungkinkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung untuk menyusun Perencanaan Kinerja, yaitu merencanakan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran dengan memperhatikan sumberdaya dan potensi yang dimiliki. Proses penyusunan Perencanaan Kinerja juga harus didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap Program Unit Esselon I Kementerian Hukum dan HAM, sebagai dasar tolak ukur penilaian kinerja kegiatan/program.

Perencanaan kinerja selanjutnya disusun dalam suatu dokumen rencana kerja, program kerja dan kalender kerja serta dokumen disbursement plan. Perencanaan Kinerja yang telah terpetakan dengan jelas, merupakan faktor penentu tercapainya Perjanjian Kinerja yang telah disepakati.

Dalam bab ini akan dijelaskan Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja setiap divisi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung TA. 2021.

I. DIVISI ADMINISTRASI

Divisi Administrasi sebagai divisi yang memiliki fungsi pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM di Wilayah. Sesuai Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, program ini menetapkan sasaran kegiatannya pada tersedianya layanan pengelolaan administratif dan fasilitatif kantor wilayah.

Rencana Strategis tersebut juga mensyaratkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi Administrasi harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yang telah ditetapkan. Dengan tujuan agar layanan pengelolaan administrasi dan fasilitatif pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung tersedia, sesuai dengan Perencanaan Kinerja yang telah disusun, maka Divisi Administrasi melaksanakan kegiatan pelayanan, sebagai berikut :

1. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
2. Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja
 - a. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
 - b. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
 - c. Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan
 - d. Pengelolaan Kepegawaian
 - e. Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan
 - f. Reformasi Birokrasi di Wilayah
 - g. Layanan Humas, Protokol dan Teknologi Informasi
3. Layanan Perkantoran



Berikut Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan Sekertariat Jenderal :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	82,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	88,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	92%
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	92%
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 26.150.123.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 26.150.123.000,-



II. DIVISI PEMASYARAKATAN

Sebagai divisi yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah, Divisi Pemasyarakatan menjalankan Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah. Sesuai Tusi yang diemban Divisi Pemasyarakatan dan IKU Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, fokus utama sasaran kegiatan Divisi Pemasyarakatan adalah meningkatnya penyelenggaraan pembinaan UPT Pemasyarakatan di wilayah. Melalui pelaksanaan pembinaan UPT Pemasyarakatan tersebut, diharapkan Divisi Pemasyarakatan dapat memenuhi target Sasaran Program Pembinaan dan IKU Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Agar tujuan penyelenggaraan pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Lampung dapat tercapai, Divisi Pemasyarakatan menyusun Rencana Kerjanya sebagai berikut :

1. Pembinaan Administratif Layanan Pemasyarakatan
 - a. Pembinaan Layanan WBP
 - b. Layanan Kerjasama, Komunikasi dan Informasi
2. Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Lampung
 - a. Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan di Wilayah Lampung
 - b. Koordinasi Teknis Pemasyarakatan Wilayah Lampung
 - c. Pengendalian UPT Pemasyarakatan Wilayah Lampung

Berikut Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan :

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	75
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	75
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	75
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	73
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	49
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	87,5
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	40
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	60
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	60
		6. Indeks Pelayanan Tahanan	60
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	70



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	80
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	70%
		2. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%
		3. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	60%
		2. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap	40%
4.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	60%
		2. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	97%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%
		4. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	75%
		5. Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	13%
		6. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	25%
		7. Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	62%
5.	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Masyarakat Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga	40%
		2. Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	50%
		3. Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	25%
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat	70%
		2. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	100%
		3. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	70%
		4. Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	70%



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%
		2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%
		3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%
		4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%
8.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%
9.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasarakatan dan Kapasitas Hunian	1. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan (Lapas)	1

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 68.307.347.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 68.307.347.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 111.181.209.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 111.181.209.000,-



III. DIVISI KEIMIGRASIAN

Divisi Keimigrasian melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Dalam menjalankan tugasnya, Divisi Keimigrasian melaksanakan Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah Lampung. Sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi, Divisi Keimigrasian diharapkan mampu mendukung pencapaian Sasaran Kinerja dan IKU Direktorat Jenderal Imigrasi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Perencanaan kinerja tersebut diatas diuraikan dalam suatu Rencana Kerja Divisi Keimigrasian TA. 2020, sebagai berikut :

1. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Bidang Fasilitatif Fungsi Keimigrasian
 - b. Pembinaan, Pengendalian, Kerjasama dan Evaluasi Bidang Teknis Keimigrasian
2. Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian
 - a. Koordinasi Tim PORA
 - b. Penyelidikan Intelijen Keimigrasian
 - c. Operasi Mandiri
 - d. Operasi Gabungan
 - e. Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian

Berikut Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan Direktorat Jenderal Imigrasi :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,15
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,15
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15
		2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11
		3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 5.847.788.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 5.847.788.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 14.466.721.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 14.466.721.000,-

IV. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM merupakan divisi yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual, Pelaksanaan Pembinaan Hukum, fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, fasilitasi Analisis Dan Evaluasi Hukum di daerah, pengorganisasian pemajuan Hak Asasi Manusia di Wilayah Lampung, pengorganisasian, pengkajian, penelitian, dan pengembangan dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Penyuluh Hukum, Peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya. Sesuai tugas yang diemban, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melaksanakan 6 (enam) program, berikut Perjanjian kinerja setiap program pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di Wilayah Lampung pada tahun 2021 :

1. Program Administrasi Hukum Umum

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	84%



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 3.472.770.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp. 3.472.770.000,-

2. Program Pembinaan / Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,15

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,30

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	74 Layanan
		2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus
2.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	1 Kegiatan
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan



No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.166.792.000,-
1.	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 1.166.792.000,-

3. Program Pembentukan Hukum

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,1

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%
		2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang
		3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
2.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	25 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 208.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 208.000.000,-

4. Program Pemajuan Hak Asasi Manusia

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan,	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	65%



	perlindungan, dan pemenuhan HAM	2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	35%
--	---------------------------------	--	-----

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM	15%
		2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%
		3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	2 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah
2.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi

Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 231.573.000,-
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 231.573.000,-

5. Program Pembinaan Hukum Nasional

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
2.	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%



		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		5. Persentase anggota JDH yang berpartisipasi aktif	20%

6. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	1. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	70 %
		2. Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	20 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 96.733.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp. 96.733.000,-
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.797.641.000,-
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 1.797.641.000,-

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 200.621.000,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 200.621.000,-



Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi instansi secara terukur sejalan dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan kinerja berisikan penjelasan secara ringkas dan lengkap tentang tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan suatu instansi berdasarkan Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan. Berikut Capaian Kinerja yang berhasil dicapai oleh masing-masing divisi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam periode tahun 2021

1. Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan Sekertariat Jenderal :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	82,0	79,39 Data terlampir
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	88,0	99,48 Data terlampir

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	92%	100% Data terlampir
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	92%	100% Data terlampir
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP	...

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,69 Data terlampir

Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Dukungan Manajemen	Rp. 26.334.262.000,-	Rp. 26.093.559.554,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 26.334.262.000,-	Rp. 26.093.559.554,-



2. Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan Direktorat Jenderal Pemasaryakatan :

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasaryakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasaryakatan	75	76,7 % (Indeks kepuasan masyarakat telah memenuhi target)
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasaryakatan	75	100 % (Seluruh UPT pemasaryakatan lampung telah melaksanakan Perjanjian kerjasama baik dari PKS keamanan maupun ketrampilan bagi WBP)
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasaryakatan	75	76,7 % (Indeks kepuasan masyarakat telah memenuhi target)
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	73	100% (pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar terlaksana 100%) Jumlah Napi per 31 Desember 2021/Jumlah WBP yang mendapatkan Makanan*100%) (9115/9115*100%= 100%) 100 % (Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas telah terlaksana 100%) (Jumlah WBP yang sakit/ Jumlah WBP yang mendapatkan layanan kesehatan*100%) (100 % (Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan



				<p>maternal telah terlaksana 100%)</p> <p>(Jumlah Ibu hamil dan menyusui / Jumlah Ibu hamil dan menyusui yang mendapatkan akses kesehatan maternal)</p> <p>$(3 \text{ WBP} / 3 \text{ WBP} * 100\% = 100\%)$</p> <p>100 %</p> <p>(tidak terdapat Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental)</p> <p>(tidak terdapat WBP mengalami gangguan mental)</p> <p>100 %</p> <p>(tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar telah terlaksana 100%)</p> <p>(jumlah Lansia/ Jumlah lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar*100%)</p> <p>$(54/54 * 100\% = 100\%)$</p> <p>100 %</p> <p>(tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar telah terlaksana 100%)</p> <p>Indeks keseluruhan narapidana terpenuhi 100%</p>
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak,	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	49	<p>76,7 %</p> <p>(Indeks kepuasan masyarakat telah memenuhi target)</p> <p>USULAN REMISI DARI UPT X 100 4941 : 4603 X</p> <p>$100 = 93,15\%$</p> <p>(Usulan Integrasi / yang mendapatkan integrasi*100%)</p> <p>$(2689/2689 * 100\% = 100\%)$</p>



	dan Klien Pemasyarakatan			<p>...</p> <p>Persentase = $1024/1014 \times 100 = 100,98\%$ Perhitungan : (Jumlah napi yang mendapat sertifikat/Target Napi bersertifikat*100)</p> <p>Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif = (JUMLAH NARAPIDANA YANG BEKERJA DAN PRODUKTIF (JAN-DES)/ JUMLAH SELURUH WARGA BINAAN X100%)</p> <p>Persentase = $1532/7055 \times 100\% = 21,7\%$</p> <p>JUMLAH INDEKS KESELURUHAN (76,7%+93,15%+100%+21,75%)/400= 72,9 %</p>
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	87,5	<p>USULAN REMISI DARI UPT X 100 4941 : 4603 X 100 = 93,15%</p> <p>(Usulan Integrasi / yang mendapatkan integrasi*100%) (2689/2689*100%= 100%)</p> <p>Jumlah keseluruhan indeks (93,15%+100%)/200*100% = 96,5%)</p>
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	40	<p>Bapas BDL 975 Orang Bapas Metro 213 Orang Bapas Pringsewu 252 Orang</p> <p>(jumlah seluruh klien bekerja/jumlah seluruh klien*100%) (1440/3480*100%= 41,37%</p> <p>Anak yang mendapat putusan penjara/jumlah seluruh anak*100% (65/128*100%=50,7 %</p> <p>Jumlah klien anak yang tepenuhi pendidikannya/ jumlah seluruh anak*100%</p>



			$(128/128 * 100\% = 100\%$ Jumlah indeks keseluruhan $(41,37\% + 50,7\% + 100\%) / 300 * 100\% = 64\%$
	4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	60	Anak yang mengikuti pendidikan keterampilan dan mendapatkan sertifikat 76 % (Jumlah anak yang mengikuti pendidikan keterampilan dan mendapatkan sertifikat/jumlah anak yang mengikuti pendidikan keterampilan * 100%) $(80/105 * 100\% = 76\%)$ 100% Persentase anak yg mendapatkan hak integrasi = $109/109 * 100\% = 100\%$ 100% Persentase seluruh anak yg mendapatkan hak wali asuh = $118/118 * 100\% = 100\%$ 71,78% (Presentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal 71,78%) (anak pendidikan formal $50/74 * 100\% = 67,56\%$ Anak pendidikan non formal $80/105 * 100\% = 76\%$ Rata rata = $67,56\% + 76\% / 2 = 71,78\%$) Jumlah keseluruhan Indeks $(71,78\% + 100\% + 76\% + 100\%) / 400 * 100 = 86,94\%$
	5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	60	RUPBASAN KELAS I BANDAR LAMPUNG: Jumlah Basan Terawat: 18.366 Jumlah Keseluruhan Basan dan Baran: 23.655 Rupbasan Metro: Jumlah Basan Terawat: 1.010 Jumlah Keseluruhan Basan dan



			<p>Baran: 1.010 Rupbasan kotabumi: Jumlah Basan Terawat: 210 Jumlah Keseluruhan Basan dan Baran: 2.289</p> <p>PERSENTASE SECARA KESELURUHAN: Basan Baran Terawat: $18.366+1.010+210 = 19.586$ Total Basan Baran: $23.655+1.010+2.289= 26.954$ ($\{ \text{Basan Terawat/Jumlah Basan Baran} \times 100 \}$ $19.586/26.954 \times 100 = 72,66$)</p> <p>RUPBASAN KELAS I BANDAR LAMPUNG: Jumlah Basan Baran berdasarkan putusan berkuatan hukum tetap: 16.589 Jumlah Keseluruhan Basan dan Baran: 23.655 Rupbasan Metro: Jumlah Basan Baran berdasarkan putusan berkuatan hukum tetap: 317 Jumlah Keseluruhan Basan dan Baran: 1.010 Rupbasan kotabumi: Jumlah Basan Baran berdasarkan putusan berkuatan hukum tetap: 224 Jumlah Keseluruhan Basan dan Baran: 2.289</p> <p>PERSENTASE SECARA KESELURUHAN: Basan Baran berdasarkan putusan berkuatan hukum tetap: $16.589+317+224= 17.130$ Total Basan Baran: $23.655+1.010+2.289= 26.954$ ($\{ \text{Basan Baran berdasarkan putusan berkuatan hukum tetap /Jumlah Basan Baran} \times 100 \}$ $17.130/26.954 \times 100 = 63,55$)</p> <p>Jumlah keseluruhan indeks $(72,66\%+63,55\%)/200 \times 100$ $\% = 68,10\%$</p>
6.	Indeks Pelayanan Tahanan	60	100%



				Seluruh tahanan terpenuhi seluruh hak haknya
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	70	<p>100 % (Pengaduan telah Ditindaklanjuti Sesuai Standar)</p> <p>100 % (semua Gangguan Kamtib Dapat Dicegah dengan baik dan terlaksana 100 %) (jumlah seluruh gangguan kamtib yang dapat dicegah/ jumlah keseluruhan gangguan kamtib*100%) Seluruh gangguan kamtib/seluruh gangguan kamtib yang dapat dicegah*100%) $100/100*100\%= 100\%$</p> <p>100 % (Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib tidak kembali melakukan gangguan kamtib dan telah mematuhi segala aturan yang ada di Lapas/ Rutan) Jumlah pelaku gangguan kamtib yang patuh/jumlah pelaku gangguan kamtib/100%) $100/100*100\%=100\%$</p> <p>100% (pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib dapat dipulihkan kembali seperti sedia kala)</p> <p>Jumlah keseluruhan indeks $(100\%+100\%+100\%+100\%/400*100\%= 100\%)$</p>

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	80	...



2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	70%	JUMLAH OVERSTAYING 2021/JUMLAH OVERSTAYING 2020*100%=-15% OVERSTAYING NARAPIDANA MENGALAMI KENAikan SEBESAR 15 PERSEN DARI TAHUN SEBELUMNYA, DIKARENAKAN Efek dari pandemi covid-19 sehingga banyak tahanan yang masih overstaying di beberapa UPT pemasyarakatan)
		2. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	(realisasi penyuluhan OBH : target penyuluhan OBH)x100% = (13 : 17) x 100% =76,5 %
		3. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	(realisasi penyuluhan OBH : target penyuluhan OBH)x100% = (13 : 17) x 100% =76,5 %
3.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	60%	RUPBASAN KELAS I BANDAR LAMPUNG: Jumlah Basan Terawat: 18.366 Jumlah Keseluruhan Basan dan Baran: 23.655 Rupbasan Metro: Jumlah Basan Terawat: 1.010 Jumlah Keseluruhan Basan dan Baran: 1.010 Rupbasan kotabumi: Jumlah Basan Terawat: 210 Jumlah Keseluruhan Basan dan Baran: 2.289 PERSENTASE SECARA KESELURUHAN: Basan Baran Terawat: 18.366+1.010+210 = 19.586 Total Basan Baran: 23.655+1.010+2.289= 26.954 {Basan Terawat/Jumlah Basan Baranx100}



				$19.586/26.954 \times 100 = 72,66$)
		2. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap	40%	RUPBASAN KELAS I BANDAR LAMPUNG: Jumlah Basan Baran berdasarkan putusan berkuatan hukum tetap: 16.589 Jumlah Keseluruhan Basan dan Baran: 23.655 Rupbasan Metro: Jumlah Basan Baran berdasarkan putusan berkuatan hukum tetap: 317 Jumlah Keseluruhan Basan dan Baran: 1.010 Rupbasan kotabumi: Jumlah Basan Baran berdasarkan putusan berkuatan hukum tetap: 224 Jumlah Keseluruhan Basan dan Baran: 2.289 PERSENTASE SECARA KESELURUHAN: Basan Baran berdasarkan putusan berkuatan hukum tetap: $16.589+317+224=17.130$ Total Basan Baran: $23.655+1.010+2.289=26.954$ ({Basan Baran berdasarkan putusan berkuatan hukum tetap /Jumlah Basan Baran x 100} $17.130/26.954 \times 100 = 63,55$)
4.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	60%	76,7 % (Indeks kepuasan masyarakat telah memenuhi target)
		2. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	97%	USULAN REMISI DARI UPT X 100 $4941 : 4603 \times 100 = 93,15\%$
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	(Usulan Integrasi / yang mendapatkan integrasi*100%) $(2689/2689 \times 100\% = 100\%)$
		4. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	75%	...



		5. Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	13%	
		6. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	25%	Persentase = $1024/1014*100 = 100,98\%$ Perhitungan : (Jumlah napi yang mendapat sertifikat/Target Napi bersertifikat*100)
		7. Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	62%	Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif = (JUMLAH NARAPIDANA YANG BEKERJA DAN PRODUKTIF (JAN-DES)/ JUMLAH SELURUH WARGA BINAAN X100%) Persentase = $1532/7055*100\% = 21,7\%$
5.	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Masyarakat Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga	40%	Bapas BDL 975 Orang Bapas Metro 213 Orang Bapas Pringsewu 252 Orang (jumlah seluruh klien bekerja/jumlah seluruh klien*100% ($1440/3480*100\%= 41,37\%$
		2. Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	50%	Anak yang mendapat putusan penjara/jumlah seluruh anak*100% ($65/128*100\%=50,7\%$
		3. Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	25%	Jumlah klien anak yang terpenuhi pendidikannya/ jumlah seluruh anak*100% ($128/128*100\%=100\%$
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat	70%	Anak yang mengikuti pendidikan keterampilan dan mendapatkan sertifikat 76 % (Jumlah anak yang mengikuti pendidikan keterampilan dan mendapatkan sertifikat/jumlah anak yang mengikuti



				pendidikan keterampilan*100%) (80/105*100%=76%)
		2. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	100% Persentase anak yg mendapatkan hak integrasi = $109/109 \times 100\% = 100\%$
		3. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	70%	100% Persentase seluruh anak yg mendapatkan hak wali asuh= $118/118 \times 100\% = 100\%$
		4. Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	70%	71,78% (Presentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal 71,78%) (anak pendidikan formal $50/74 \times 100\% = 67,56\%$ Anak pendidikan non formal $80/105 \times 100\% = 76\%$ Rata rata= $67,56\% + 76\% / 2 = 71,78\%$)
7.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	= (total pengaduan yang ditindaklanjuti : total jumlah pengaduan) x 100% = (9 : 9) x 100% = 100 %
		2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	100 % (semua Gangguan Kamtib Dapat Dicegah dengan baik dan terlaksana 100 %) (jumlah seluruh gangguan kamtib yang dapat dicegah/ jumlah keseluruhan gangguan kamtib*100%) Seluruh gangguan kamtib/seluruh gangguan kamtib yang dapat dicegah*100%) $100/100 \times 100\% = 100\%$)
		3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	100 % (Tahanan/Narapidana /Anak Pelaku Gangguan Kamtib tidak kembali



				melakukan gangguan kamtib dan telah mematuhi segala aturan yang ada di Lapas/ Rutan) Jumlah pelaku gangguan kamtib yang patuh/jumlah pelaku gangguan kamtib/100%) $100/100*100\%=10\%$
		4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	100% (pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib dapat dipulihkan kembali seperti sedia kala)
8.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	100% (pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar terlaksana 100%) Jumlah Napi per 31 Desember 2021/Jumlah WBP yang mendapatkan Makanan*100%) $(9115/9115*100\%=100\%)$
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	100 % (Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas telah terlaksana 100%) (Jumlah WBP yang sakit/ Jumlah WBP yang mendapatkan layanan kesehatan*100%) (
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	100 % (Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal telah terlaksana 100%)



				(Jumlah Ibu hamil dan menyusui / Jumlah Ibu hamil dan menyusui yang mendapatkan akses kesehatan maternal) (3 WBP/3 WBP*100%= 100%)
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	100 % (tidak terdapat Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental) (tidak terdapat WBP mengalami gangguan mental)
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	100 % (tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar telah terlaksana 100%) (jumlah Lansia/ Jumlah lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar*100%) (54/54*100%=100%)
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	100 % (tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar telah terlaksana 100%)
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	100 %
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%	
9.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasarakatan dan Kapasitas Hunian	1. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan (Lapas)	1	1 (lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Gunung Sugih)



• Realisasi Anggaran Divisi Pemasyarakatan

Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 949.080.000,-	Rp. 942.750.508,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 949.080.000,-	Rp. 942.750.508,-
Koordinasi dilkumjakpol	Rp. 125.092.000,-	Rp. 122.573.500,-
Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan	Rp. 91.962.000,-	Rp. 91.960.500,-
Koordinasi Teknis Pemasyarakatan	Rp. 64.590.000,-	Rp. 64.586.748,-
Pameran Hasil Karya Narapidana	Rp. 79.852.000,-	Rp. 79.852.000,-
Monitoring dan Evaluasi	Rp. 85.800.000,-	Rp. 85.711.690,-
Sosialisai Teknis Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 228.974.000,-	Rp. 226.871.800,-
Layanan Kerjasama, Perizinan, Pengaduan dan Informasi	Rp. 98.860.000,-	Rp. 98.310.000,-
Pengendalian UPT Pemasyarakatan	Rp. 81.800.000,-	Rp. 81.490.270
Pemindahan WBP	Rp. 50.150.000,-	Rp. 49.994.000,-
Pembinaan Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban	Rp. 42.000.000,-	Rp. 41.400.000,-

3. Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan Direktorat Jenderal Imigrasi :

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian Kinerja
1.	Memastikan pelayanan di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,15 (Target selama satu tahun 2021)	3,85
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11 (Target selama satu tahun 2021)	4,29

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas layanan keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian	3,15 (Target selama satu tahun 2021)	3,85
2.	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11 (Target selama satu tahun 2021)	4,29



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15 (Target selama satu tahun 2021)	3,85
		Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11 (Target selama satu tahun 2021)	2,92
		Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11 (Target selama satu tahun 2021)	4,29

Data Dukung

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung

KANIM KELAS I BANDAR LAMP											
KODE	UNSUR PELAYANAN	JAN	FEB	MAR	TRNTW1	AVGTW1	APR	MEI	JUN	TRNTW2	AVGTW2
IKM	INFORMASI	17.95	19.77	18.56	+0.31	18.76	19.05	18.35	19.76	+0.35	19.05
IKM	PERSYARATAN	18.46	19.77	18.70	+0.12	18.98	19.25	18.20	19.86	+0.31	19.10
IKM	PROSEDUR/ALUR	18.02	19.54	18.78	+0.38	18.78	18.98	18.20	19.71	+0.36	18.96
IKM	WAKTU PENYELESAIAN	18.10	19.77	18.48	+0.19	18.78	18.84	17.90	19.95	+0.56	18.90
IKM	BIAYA	18.24	19.77	18.59	+0.18	18.87	19.05	18.95	19.95	+0.45	19.32
IKM	SARANA PRASARANA	18.02	20.00	18.48	+0.23	18.83	18.84	18.20	19.81	+0.48	18.95
IKM	RESPON	17.95	19.54	18.56	+0.31	18.68	19.05	18.50	19.81	+0.38	19.12
IKM	KONSULTASI & PENGADUAN	18.32	19.77	18.44	+0.06	18.84	18.77	18.50	19.62	+0.43	18.96
IPK	DISKRIMINASI	13.57	14.65	13.72	+0.08	13.98	13.93	13.99	14.96	+0.52	14.29
IPK	KECURANGAN	13.63	14.83	13.78	+0.07	14.08	14.23	13.99	14.82	+0.30	14.35
IPK	GRATIFIKASI	13.57	14.83	13.86	+0.15	14.09	14.08	14.21	14.82	+0.37	14.37
IPK	PUNGUTAN LIAR	13.57	14.83	13.97	+0.20	14.12	14.34	14.21	14.93	+0.30	14.49
IPK	PERCALOAN	13.63	14.83	13.89	+0.13	14.12	14.23	14.33	14.93	+0.35	14.50
INDEKS	IKM KUMULATIF	18.13	19.74	18.57	+0.22	18.81	18.98	18.35	19.81	+0.41	19.05
INDEKS	IPK KUMULATIF	13.60	14.79	13.84	+0.12	14.08	14.16	14.15	14.89	+0.36	14.40
RESP	RESPONDEN	41	13	81	+20	45	44	20	63	+10	42



KANIM KELAS I BANDAR LAMF											
KODE	UNSUR PELAYANAN	JUL	AGU	SEP	TRNTW3	AVGTW3	OKT	NOV	DES	TRNTW4	AVGTW4
IKM	INFORMASI	19.40	19.42	18.38	-0.51	19.07	19.17	19.14	19.53	+0.18	19.28
IKM	PERSYARATAN	19.40	18.91	18.38	-0.51	18.90	19.48	18.98	19.84	+0.18	19.43
IKM	PROSEDUR/ALUR	19.40	19.17	18.75	-0.32	19.11	18.91	19.03	19.84	+0.47	19.26
IKM	WAKTU PENYELESAIAN	19.40	19.02	18.50	-0.45	18.97	18.91	19.03	20.00	+0.55	19.31
IKM	BIAYA	19.40	18.81	18.75	-0.32	18.99	19.13	19.49	20.00	+0.43	19.54
IKM	SARANA PRASARANA	19.40	19.02	18.63	-0.39	19.02	19.17	18.98	20.00	+0.41	19.38
IKM	RESPON	19.40	18.71	19.00	-0.20	19.04	19.07	19.49	19.84	+0.38	19.47
IKM	KONSULTASI & PENGADUAN	18.80	19.02	18.63	-0.09	18.82	19.22	19.19	20.00	+0.39	19.47
IPK	DISKRIMINASI	14.55	13.91	14.44	-0.05	14.30	14.57	14.81	15.00	+0.22	14.79
IPK	KECURANGAN	14.55	14.22	14.63	+0.04	14.47	14.50	14.62	14.41	-0.04	14.51
IPK	GRATIFIKASI	14.55	14.57	14.72	+0.08	14.61	14.50	14.62	14.88	+0.19	14.67
IPK	PUNGUTAN LIAR	14.55	14.57	14.72	+0.08	14.61	14.34	14.58	15.00	+0.33	14.64
IPK	PERCALOAN	14.55	14.46	14.81	+0.13	14.61	14.57	14.69	15.00	+0.22	14.75
INDEKS	IKM KUMULATIF	19.33	19.01	18.63	-0.35	18.99	19.16	19.17	19.88	+0.36	19.40
INDEKS	IPK KUMULATIF	14.55	14.35	14.66	+0.05	14.52	14.50	14.66	14.86	+0.18	14.7
RESP	RESPONDEN	5	58	24	+10	29	58	59	19	-20	45

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda

KANIM KELAS III KALIANDA											
KODE	UNSUR PELAYANAN	JAN	FEB	MAR	TRNTW1	AVGTW1	APR	MEI	JUN	TRNTW2	AVGTW2
IKM	INFORMASI	18.33	18.70	18.21	-0.06	18.41	20.00	19.40	19.80	-0.10	19.73
IKM	PERSYARATAN	18.33	19.20	18.14	-0.09	18.56	19.42	19.31	19.80	+0.19	19.51
IKM	PROSEDUR/ALUR	18.33	19.00	17.64	-0.34	18.32	18.55	19.66	19.70	+0.57	19.30
IKM	WAKTU PENYELESAIAN	18.33	19.00	18.00	-0.16	18.44	19.03	19.74	19.80	+0.39	19.52
IKM	BIAYA	18.00	19.20	17.71	-0.15	18.30	19.52	19.66	19.60	+0.04	19.59
IKM	SARANA PRASARANA	18.67	19.50	17.79	-0.44	18.65	19.42	19.91	19.50	+0.04	19.61
IKM	RESPON	18.00	19.60	17.79	-0.11	18.46	19.03	19.74	19.80	+0.39	19.52
IKM	KONSULTASI & PENGADUAN	17.67	19.40	17.64	-0.02	18.24	19.52	19.83	19.70	+0.09	19.68
IPK	DISKRIMINASI	13.25	14.10	13.45	+0.10	13.60	14.27	14.81	14.70	+0.22	14.59
IPK	KECURANGAN	13.75	14.25	13.50	-0.13	13.83	15.00	14.87	14.70	-0.15	14.86
IPK	GRATIFIKASI	13.75	14.18	13.50	-0.13	13.81	15.00	14.81	14.85	-0.08	14.89
IPK	PUNGUTAN LIAR	14.25	14.03	13.50	-0.38	13.93	14.64	14.81	14.70	+0.03	14.72
IPK	PERCALOAN	14.25	14.10	13.29	-0.48	13.88	14.64	14.81	14.78	+0.07	14.74
INDEKS	IKM KUMULATIF	18.21	19.20	17.87	-0.17	18.43	19.31	19.66	19.71	+0.20	19.56
INDEKS	IPK KUMULATIF	13.85	14.13	13.45	-0.20	13.81	14.71	14.82	14.75	+0.02	14.76
RESP	RESPONDEN	9	30	42	+17	27	31	35	30	-1	32



KANIM KELAS III KALIANDA											
KODE	UNSUR PELAYANAN	JUL	AGU	SEP	TRNTW3	AVGTW3	OKT	NOV	DES	TRNTW4	AVGTW4
IKM	INFORMASI	19.36	19.03	19.44	+0.04	19.28	19.39	19.23	20.00	+0.31	19.54
IKM	PERSYARATAN	19.36	19.74	19.53	+0.09	19.54	18.98	18.74	19.25	+0.13	18.99
IKM	PROSEDUR/ALUR	18.64	19.56	19.63	+0.49	19.28	19.11	18.35	19.25	+0.07	18.90
IKM	WAKTU PENYELESAIAN	19.00	19.56	19.44	+0.22	19.33	19.32	18.74	20.00	+0.34	19.35
IKM	BIAYA	19.36	19.65	19.72	+0.18	19.58	18.70	19.03	20.00	+0.65	19.24
IKM	SARANA PRASARANA	18.71	19.12	19.06	+0.18	18.96	19.05	18.26	19.25	+0.10	18.85
IKM	RESPON	18.86	19.56	19.53	+0.34	19.32	18.98	18.94	20.00	+0.51	19.31
IKM	KONSULTASI & PENGADUAN	19.29	19.47	19.53	+0.12	19.43	18.98	18.35	20.00	+0.51	19.11
IPK	DISKRIMINASI	14.52	14.60	14.86	+0.17	14.66	14.49	14.20	15.00	+0.26	14.56
IPK	KECURANGAN	14.36	14.54	14.65	+0.15	14.52	14.28	13.98	15.00	+0.36	14.42
IPK	GRATIFIKASI	14.30	14.67	14.65	+0.18	14.54	14.64	13.69	15.00	+0.18	14.44
IPK	PUNGUTAN LIAR	14.52	14.67	14.65	+0.07	14.61	14.69	13.98	15.00	+0.15	14.56
IPK	PERCALOAN	14.25	14.67	14.65	+0.20	14.52	14.44	13.69	15.00	+0.28	14.38
INDEKS	IKM KUMULATIF	19.07	19.46	19.48	+0.20	19.34	19.06	18.71	19.72	+0.33	19.16
INDEKS	IPK KUMULATIF	14.39	14.63	14.69	+0.15	14.57	14.51	13.91	15.00	+0.24	14.5
RESP	RESPONDEN	42	34	32	-5	36	44	31	4	-20	26

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi

KANIM KELAS III KOTABUMI											
KODE	UNSUR PELAYANAN	JAN	FEB	MAR	TRNTW1	AVGTW1	APR	MEI	JUN	TRNTW2	AVGTW2
IKM	INFORMASI	20.00	19.53	19.35	-0.32	19.63	19.91	19.91	20.00	+0.04	19.94
IKM	PERSYARATAN	11.00	19.34	19.59	+4.30	16.64	19.64	20.00	20.00	+0.18	19.88
IKM	PROSEDUR/ALUR	17.00	19.34	19.76	+1.38	18.70	19.36	19.81	20.00	+0.32	19.72
IKM	WAKTU PENYELESAIAN	20.00	19.63	19.59	-0.20	19.74	19.91	19.91	20.00	+0.04	19.94
IKM	BIAYA	20.00	19.72	19.59	-0.20	19.77	19.91	20.00	20.00	+0.05	19.97
IKM	SARANA PRASARANA	20.00	19.16	19.03	-0.48	19.40	19.36	19.25	19.91	+0.27	19.51
IKM	RESPON	14.00	19.25	19.27	+2.64	17.51	19.73	20.00	20.00	+0.13	19.91
IKM	KONSULTASI & PENGADUAN	20.00	19.53	19.43	-0.29	19.65	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00
IPK	DISKRIMINASI	15.00	14.65	14.45	-0.27	14.70	14.86	15.00	15.00	+0.07	14.95
IPK	KECURANGAN	15.00	14.65	14.39	-0.31	14.68	15.00	15.00	15.00	0.00	15.00
IPK	GRATIFIKASI	15.00	14.72	14.57	-0.22	14.76	15.00	15.00	15.00	0.00	15.00
IPK	PUNGUTAN LIAR	15.00	14.72	14.57	-0.22	14.76	15.00	15.00	15.00	0.00	15.00
IPK	PERCALOAN	15.00	14.86	14.51	-0.25	14.79	15.00	14.86	15.00	0.00	14.95
INDEKS	IKM KUMULATIF	17.75	19.44	19.45	+0.85	18.88	19.73	19.86	19.99	+0.13	19.86
INDEKS	IPK KUMULATIF	15.00	14.72	14.50	-0.25	14.74	14.97	14.97	15.00	+0.01	14.98
RESP	RESPONDEN	1	32	37	+18	23	33	32	33	0	33



KANIM KELAS III KOTABUMI											
KODE	UNSUR PELAYANAN	JUL	AGU	SEP	TRNTW3	AVGTW3	OKT	NOV	DES	TRNTW4	AVGTW4
IKM	INFORMASI	19.91	20.00	20.00	+0.05	19.97	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00
IKM	PERSYARATAN	19.91	20.00	20.00	+0.05	19.97	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00
IKM	PROSEDUR/ALUR	19.91	20.00	20.00	+0.05	19.97	20.00	20.00	19.90	-0.05	19.97
IKM	WAKTU PENYELESAIAN	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00
IKM	BIAYA	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00
IKM	SARANA PRASARANA	19.91	19.81	19.81	-0.05	19.84	19.71	19.90	20.00	+0.15	19.87
IKM	RESPON	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	19.90	20.00	0.00	19.97
IKM	KONSULTASI & PENGADUAN	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00
IPK	DISKRIMINASI	14.93	15.00	15.00	+0.04	14.98	15.00	14.93	14.93	-0.04	14.95
IPK	KECURANGAN	15.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	14.93	15.00	0.00	14.98
IPK	GRATIFIKASI	15.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	15.00
IPK	PUNGUTAN LIAR	15.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	15.00
IPK	PERCALOAN	15.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	15.00
INDEKS	IKM KUMULATIF	19.95	19.98	19.98	+0.02	19.97	19.96	19.98	19.99	+0.02	19.98
INDEKS	IPK KUMULATIF	14.99	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	14.97	14.99	0.00	15.0
RESP	RESPONDEN	33	32	32	-1	32	31	31	31	0	31

No.	Satuan Kerja	IKM
1.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung	19,06
2.	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda	19,12
3.	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi	19,67
	Jumlah	57,85
	Rata-rata	19,28

Nilai IKM = 19,28

$(19,28 \times 100) : 20 = 96,4$

$96,4 : 25 = 3,85$

Maka nilai realisasi **3,85**

Indeks Pengamanan Keimigrasian

No.	Satuan Kerja	Target	Realisasi
1.	Divisi Keimigrasian	27	26
2.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung	46	53
3.	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda	22	15
4.	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi	27	37
	Jumlah	122	131

Indeks Pengamanan Keimigrasian :

$(131 : 122) = 1,073$

$1,07 \times 100 = 107,3$

$107,3 : 25 = 4,29$



Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

No.	Satuan Kerja	IKM
1.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung	14,41
2.	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda	14,40
3.	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi	14,92
	Jumlah	43,73
	Rata-rata	14,57

Nilai = 14,57

$(14,57 \times 100) : 20 = 72,85$

$72,85 : 25 = 2,91$

Maka nilai realisasi **2,91**

Realisasi Anggaran

Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 5.832.188.000,-	Rp. 3.543.548.397,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 5.832.188.000,-	Rp. 3.543.548.397,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 15.401.033.000,-	Rp. 14.380.399.697,-
Dukungan Manajemen Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 15.401.033.000,-	Rp. 14.380.399.697,-



4. Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan Direktorat Jenderal AHU, KI, PP, HAM, BPHN, Balitbangkumham :

1. Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,15	3,15

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	84%	90%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	20%
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%	90%

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp.3.472.770.000,-	Rp. 3.237.436.229,-	93.22%
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp.3.472.770.000,-	Rp. 3.237.436.229,-	93.22%

Kegiatan	Maksimum Pencairan	Realisasi	Persentase
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp.3.299.131.500,-	Rp. 3.237.436.229,-	98.13%
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp.3.299.131.500,-	Rp. 3.237.436.229,-	98.13%



2. Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,15	3,15

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,30	3,30

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	74 Layanan	167 Layanan
		2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	8 Lokus
2.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	1 Kegiatan	2 Kegiatan
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan	1 Laporan

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.166.792.000,-	1.120.823.975,-
1.	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 1.166.792.000,-	1.120.823.975,-



3. Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,1	3,1

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%	80%
		2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang	60 Orang
		3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	80%
2.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	25 Orang	30 Orang

Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 208.000.000,-	Rp 205.544.854
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 208.000.000,-	Rp. 205.544.854



4. Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia tanggal 28 Juli 2021 No: HAM-HA.02.02-17 pemberitahuan tentang peniadaan sementara pelaksanaan kegiatan Penilaian KKP HAM Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	65%	...
		2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	35%	...

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM	15%	...
		2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%	...
		3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%	...

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah	...
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	2 Instansi Pemerintah	...
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah	...
2.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	...



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta 12940
Telepon : (021) 2521344, 2526808. Faksimile : (021) 2522915, 2526808
Laman: www.ham.go.id Surel: informasi@ham.go.id

Nomor : HAM-HA.02.02-17 28 Juli 2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan
Penilaian KKP HAM tahun 2021

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI
di
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2021, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Permenkumham No. 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM masih memerlukan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta pedoman pelaksanaan verifikasi data dukung dalam format yang baru, mengingat adanya perubahan signifikan dalam indikator penilaian;
2. Dampak dari epidemi Covid-19 sangat besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan kegiatan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM. Banyak daerah kabupaten/kota yang mengalami kesulitan untuk menyiapkan dan menyampaikan data dukung indikator penilaian KKP HAM, sesuai dengan ketentuan penilaian yang baru, secara optimal;
3. Hampir sepanjang tahun 2020/2021 sebagian besar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lebih fokus pada upaya penanganan kesehatan masyarakat dan dampak epidemi Covid-19 terhadap perlindungan sosial, sehingga pelayanan di bidang lainnya yang termasuk dalam indikator penilaian menjadi agak terbatas.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka kami memutuskan bahwa untuk sementara program/kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) tahun 2021 **ditiadakan**, dan baru akan dilaksanakan kembali pada tahun 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat meneruskan pemberitahuan tentang **peniadaan sementara pelaksanaan kegiatan Penilaian KKP HAM Tahun 2021** ini kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia,
Mualimin Abdi
NIP 196211211982031001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Para Gubernur;
4. Para Bupati/Walikota.



Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 231.573.000,-	...
Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Rp. 231.573.000,-	...

5. Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	...
2.	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%	99,18%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%	98,2%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%	98%
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	95%
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	100%

Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 96.733.000,-	Rp. 96.733.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp. 96.733.000,-	Rp. 96.733.000,-
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.690.681.000,-	Rp. 1.617.828.000
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 1.690.681.000,-	Rp. 1.617.828.000



6. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20%	20%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	1. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	70%	70%
		2. Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	20%	20%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	70%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku

Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Dukungan Manajemen	Rp. 200.621.000,-	Rp. 186.007.323,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 200.621.000,-	Rp. 186.007.323,-



Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung periode tahun 2021



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KANTOR WILAYAH LAMPUNG

JL.RW. MONGINSIDI NO. 184 BANDAR LAMPUNG

TELP (0721) 474813, 483927, 485427, 471060

Laman : <https://lampung.kemerkumham.go.id>

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TARGET KINERJA B03 – B12 TAHUN 2021

Berdasarkan matriks monitoring kinerja Tahun 2021, hasil yang diperoleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sebagai berikut :

No	Divisi	Hasil Rata – Rata Nilai Tarja			
		B03	B06	B09	B12
1.	Kepala Kantor Wilayah	100%	100%	100%	100%
2.	Divisi Administrasi	95%	100%	100%	100%
3.	Divisi Yankum	100%	100%	99,61%	100%
-	Ditjen Administrasi Hukum Umum	100%	100%	98%	100%
-	Ditjen Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%	100%
-	BPHN	100%	100%	100%	100%
-	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%
-	Ditjen HAM	100%	100%	100%	100%
-	BalitbangHAM	100%	100%	100%	100%
4.	Divisi Pemasarakatan	100%	100%	100%	100%
5.	Divisi Keimigrasian	95%	100%	100%	100%
Nilai Rata- Rata Total		98%	100%	99,92%	100%



Kepala Divisi Administrasi

B03

1. Pengelolaan Sistem Integrasi Pengadaan Barang/Jasa Kemenkumham Unggul (SIPaSTIKU) mendapat point **80**. Keterangan Verifikator : Tolong dilengkapi juga data dukung pada point Action Plan.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

B06

1. Mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi HAM dan melaporkannya melalui sistem pemantauan yang dikelola oleh unit kerja di bawah Presiden mendapat point **100** namun terdapat Keterangan dari Tim Verifikator : Data dukung terpenuhi, berupa: - Surat notifikasi pelaksanaan Aksi HAM - Laporan pemantauan pelaksanaan Aksi HAM di Kabupaten Pringsewu, Pesawaran dan Tanggamus - Surat keterangan yang ditanda tangan oleh Kadiv Yankum bahwa berdasarkan surat notifikasi dari Ditjen HAM, bahwa pelaporan B04 akan digabung dengan laporan B08 dan akan dilaporkan pada B09.
2. Mendorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM mendapat point **100** namun terdapat Keterangan dari Tim Verifikator : Data dukung terpenuhi, berupa: - Surat keterangan yang ditanda tangan oleh Kadiv Yankum bahwa data dukung KKP HAM belum dapat dipenuhi karena sesuai dengan surat notifikasi pelaksanaan KKP HAM ada perubahan jadwal, dan penyampaian kuisioner paling lambat tanggal 15 Agustus. - Surat notifikasi pelaksanaan Aksi HAM ke Pemda - Laporan rapat koordinasi KKP HAM.

B12

3. Tercapainya pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Wilayah dan Daerah terkait penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris di Wilayah mendapat poin **95**. Keterangan dari Tim Verifikator : Data dukung (berupa lampiran laporan) kurang upload.

Kepala Divisi Keimigrasian

B03

1. Pengembangan Penegakan Hukum (Gakkum) Keimigrasian mendapat point **90**. Keterangan Verifikator : SK Timpora Kanim Kelas I TPI Bandar Lampung belum dilampirkan, Laporan Timpora Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung dan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda belum ada. Mapping hanya ada data Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda, Laporan Operasi Gabungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung belum ditanda tangani.

B06

1. Meningkatnya minat masyarakat terhadap pelayanan Eazy Passport mendapat point **100** namun terdapat Keterangan dari Tim Verifikator : Lengkap dengan catatan, PDF hasil



scan kualitasnya agar diperbaiki : 1. Dokumen terbaca tidak terlalu jelas, dokumentasi buram; 2. QR Code sumaker untuk beberapa dokumen tidak bisa terbaca.

2. Pengembangan Penegakan Hukum (Gakkum) Keimigrasian mendapat point **100** namun terdapat Keterangan dari Tim Verifikator : Lengkap dengan catatan beberapa kualitas scan dokumen kurang layak (hasilnya buram).

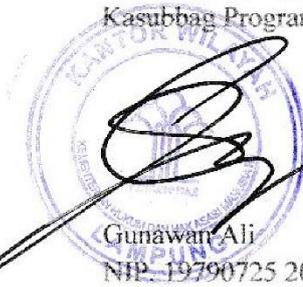
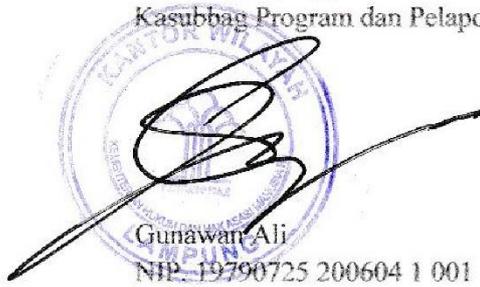
Kepala Divisi Pemasyarakatan

B03

1. Meningkatnya Koordinasi Pengamanan dengan Instansi terkait mendapat point **100**. Namun terdapat Keterangan dari Tim Verifikator yaitu Laporan harap dilengkapi dengan analisa sendiri oleh Divisi Pas.
2. Inspeksi mendadak, tes urin bagi petugas dan narapidana/tahanan/anak dan pemindahan bandar narkoba ke lapas maximum security mendapat point **100**. Namun terdapat Keterangan dari Tim Verifikator yaitu Hasil dan analisa harusnya terpisah.

Bandar Lampung, 07 Januari 2021

Kasubbag Program dan Pelaporan



Gunawan Ali
NIP. 19790725 200604 1 001



Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Lampung berserta Jajaran tahun 2021

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG
TABEL REALISASI ANGGARAN PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2021

NO	KODE SATKER	SATKER	BELANJA PEGAWAI				BELANJA BARANG				BELANJA MODAL				TOTAL BELANJA			
			PAGU	REALISASI	SISA	%	PAGU	REALISASI	SISA	%	PAGU	REALISASI	SISA	%	PAGU	REALISASI	%	
			(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d) = (b) / (a)	(e)	(f) = (e) - (a)	(g) = (f) / (e)	(h)	(i) = (h) - (a)	(j) = (i) / (a)	(k) = (k) - (a)	(l) = (l) - (a)	(m) = (m) + (e) + (i)	(n) = (n) + (e) + (i)	(o) = (o) / (m)	
1		DIVISI ADMINISTRASI																
	408824	SEKRETARIAT JENDERAL	12.962.631.000	12.788.266.941	174.364.059	98,65%	5.891.369.000	5.825.669.752	65.699.248	98,88%	7.480.262.000	7.475.622.851	639.149	99,99%	26.334.262.000	26.093.559.544	98,09%	
		SUB TOTAL	12.962.631.000	12.788.266.941	174.364.059	98,65%	5.891.369.000	5.825.669.752	65.699.248	98,88%	7.480.262.000	7.475.622.851	639.149	99,99%	26.334.262.000	26.093.559.544	98,09%	
2		DIVISI PELAYANAN HUKUM																
	408822	DITEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM			0	0,00%	3.472.770.000	3.237.436.229	235.333.771	93,22%			0	0,00%	3.472.770.000	3.237.436.229	93,22%	
	408826	DITEN KEKAYAAN INTELEKTUAL			0	0,00%	1.166.792.000	1.120.823.975	45.968.025	96,06%			0	0,00%	1.166.792.000	1.120.823.975	96,06%	
	408827	DITEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			0	0,00%	206.000.000	203.564.854	2.435.146	97,87%			0	0,00%	206.000.000	203.564.854	97,87%	
	408828	DITEN HAK ASASI MANUSIA			0	0,00%	231.573.000	195.988.704	35.584.296	84,63%			0	0,00%	231.573.000	195.988.704	84,63%	
	408829	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL			0	0,00%	1.784.414.000	1.709.964.634	74.449.366	95,83%	3.000.000	3.000.000	0	100,00%	1.787.414.000	1.712.964.634	95,83%	
	408831	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA			0	0,00%	200.621.000	193.709.323	6.911.677	96,55%			0	0,00%	200.621.000	193.709.323	96,55%	
		SUB TOTAL	0	0	0	0,00%	7.064.170.000	6.661.487.719	402.682.281	94,30%	3.000.000	3.000.000	0	100,00%	7.067.170.000	6.664.487.719	94,30%	
3		DIVISI PEMASARAKATAN																
	408823	DITEN PEMASARAKATAN			0	0,00%	849.080.000	836.579.062	12.500.938	98,68%			0	0,00%	849.080.000	836.579.062	98,68%	
	408545	LEMBAGA PEMASARAKATAN B. LAMPUNG	9.810.581.000	10.279.073.009	468.494.009	104,77%	9.889.132.000	9.971.933.283	117.838.717	99,80%			0	0,00%	19.899.713.000	19.950.988.294	102,34%	
	652962	LEMBAGA PEMASARAKATAN NARKOTIKA B. LAMPUNG	6.670.800.000	8.054.132.105	-1.383.332.105	120,74%	10.042.696.000	9.435.530.070	607.165.930	93,95%			0	0,00%	16.713.496.000	17.489.662.175	104,64%	
	497764	LEMBAGA PEMASARAKATAN WANITA B. LAMPUNG	5.771.473.000	5.720.340.451	51.132.549	99,88%	3.354.464.000	3.348.727.269	5.736.731	99,83%			0	0,00%	9.075.935.000	9.069.067.720	99,92%	
	406282	LEMBAGA PEMASARAKATAN METRO	5.637.934.000	5.628.988.045	8.945.955	99,84%	6.235.591.000	6.207.027.789	28.563.211	99,54%	155.000.000	154.950.000	50.000	99,97%	12.028.525.000	11.990.965.834	99,69%	
	408536	LEMBAGA PEMASARAKATAN KALANDA	5.088.805.000	5.088.753.939	51.061	100,00%	6.666.248.000	6.632.811.780	33.436.220	99,50%	191.000.000	190.000.000	1.000.000	99,48%	11.946.053.000	11.911.565.719	99,71%	
	408530	LEMBAGA PEMASARAKATAN KOTA AGUNG	3.742.338.000	3.735.083.830	7.254.170	99,81%	3.961.981.000	3.761.234.000	200.747.000	94,94%	206.000.000	205.945.000	55.000	99,97%	7.909.939.000	7.702.262.830	97,37%	
	406551	LEMBAGA PEMASARAKATAN ANAK KOTABUMI	3.930.055.000	3.928.323.744	1.731.256	99,96%	4.196.034.000	4.173.482.259	22.551.741	99,46%			0	0,00%	8.126.089.000	8.101.806.037	99,70%	
	497758	LEMBAGA PEMASARAKATAN WAY KANAN	3.365.233.000	3.272.759.759	92.473.241	97,25%	4.539.053.000	4.409.989.725	3.000.000.000	97,16%			0	0,00%	7.904.286.000	7.682.746.534	97,20%	
	683313	LEMBAGA PEMASARAKATAN GUNUNG SUGIH	3.915.468.000	3.849.553.680	65.914.320	98,32%	6.436.460.000	6.267.199.736	169.260.264	97,37%	5.155.000.000	5.092.146.000	62.854.000	98,78%	15.506.928.000	15.208.899.416	98,08%	
	683704	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK B. LAMPUNG	4.718.452.000	4.797.701.923	-79.249.923	101,68%	2.712.099.000	2.698.551.230	13.547.770	99,50%			0	0,00%	7.480.551.000	7.486.253.153	100,88%	
	630373	RUMAH TAHANAN NEGARA B. LAMPUNG	7.212.701.000	7.281.342.715	-68.641.715	100,95%	11.668.030.000	11.629.137.678	38.892.322	99,67%			0	0,00%	18.880.731.000	18.910.480.393	100,16%	
	406570	RUMAH TAHANAN NEGARA MENGGALA	2.822.397.000	2.777.832.058	44.564.942	98,42%	4.195.507.000	4.157.143.539	38.363.461	99,09%			0	0,00%	7.017.904.000	6.934.975.597	98,82%	
	406576	RUMAH TAHANAN NEGARA SUKADANA	2.915.425.000	2.840.641.105	74.783.895	97,43%	3.686.994.000	3.563.634.819	1.213.359.181	96,71%			0	0,00%	6.600.419.000	6.404.275.924	97,03%	
	406591	RUMAH TAHANAN NEGARA KRUJ	2.911.156.000	2.763.128.503	148.027.497	94,92%	2.078.234.000	1.938.420.000	139.804.000	93,27%			0	0,00%	4.989.380.000	4.701.548.503	94,23%	
	497742	RUMAH TAHANAN NEGARA KOTABUMI	3.455.108.000	3.461.214.673	-6.106.673	100,38%	3.324.784.000	3.275.472.145	49.311.855	98,52%			0	0,00%	6.779.892.000	6.736.686.818	99,36%	
	683930	RUMAH TAHANAN KELAS IIB KOTA AGUNG	2.015.776.000	2.067.041.332	-51.265.332	102,54%	3.443.531.000	3.326.373.784	117.157.216	96,40%			0	0,00%	5.499.307.000	5.393.415.116	98,79%	
	109137	BALAI PEMASARAKATAN B. LAMPUNG	4.691.630.000	4.625.725.733	65.904.267	98,60%	1.060.737.000	1.055.042.012	5.694.988	99,46%			0	0,00%	5.752.367.000	5.680.767.745	98,76%	
	632019	BALAI PEMASARAKATAN KELAS II KOTABUMI	449.321.000	434.923.795	14.397.205	96,80%	1.094.253.000	1.042.279.460	51.973.540	95,25%			0	0,00%	1.543.574.000	1.477.203.255	95,70%	
	632017	BALAI PEMASARAKATAN KELAS I PRINGSEWU	810.321.000	777.420.895	32.900.505	95,94%	817.018.000	763.257.772	153.760.228	93,23%			0	0,00%	1.727.339.000	1.540.678.267	89,19%	
	632623	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA LAMPUNG	1.882.504.000	2.132.257.762	-249.753.762	113,27%	530.940.000	488.410.666	42.529.334	91,99%			0	0,00%	2.413.444.000	2.620.708.428	108,59%	
	653260	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA METRO	1.286.845.000	1.496.958.808	-210.113.808	116,33%	467.718.000	374.309.500	93.408.500	80,03%			0	0,00%	1.754.563.000	1.871.268.308	106,65%	
	653264	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KOTABUMI	833.370.000	877.000.012	-43.630.012	104,98%	531.380.000	416.586.500	114.793.500	78,40%			0	0,00%	1.366.750.000	1.293.586.512	94,65%	
		SUB TOTAL	86.993.027.000	88.993.514.712	-2.000.487.712	102,30%	92.674.930.000	90.472.504.114	5.073.967.387	97,62%	5.767.000.000	5.643.041.000	63.959.000	98,88%	185.374.957.000	185.109.058.826	98,86%	
4		DIVISI KEIMIGRASIAN																
	408825	DITEN IMIGRASI			0	0,00%	770.345.000	683.525.867	86.809.133	88,73%			0	0,00%	770.345.000	683.525.867	88,73%	
	408165	KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDAR LAMPUNG	4.791.779.000	4.665.380.171	126.398.829	97,36%	5.408.566.000	3.860.218.317	1.548.347.683	71,37%	198.000.000	197.835.000	165.000	99,92%	10.398.345.000	8.723.433.488	83,89%	
	109157	KANTOR IMIGRASI KELAS III KALIANDA	1.307.170.000	1.279.215.291	27.954.709	97,86%	3.023.529.000	2.285.648.129	737.880.871	75,60%	429.777.000	427.900.851	1.876.149	99,56%	4.760.476.000	3.992.764.271	83,87%	
	683111	KANTOR IMIGRASI KELAS III KOTABUMI	1.405.538.000	1.367.101.627	38.436.373	97,27%	3.347.153.000	2.610.592.051	736.560.949	77,99%	551.364.000	546.520.790	4.843.210	99,12%	5.304.055.000	4.524.214.468	85,30%	
		SUB TOTAL	7.504.487.000	7.311.697.089	192.789.911	97,43%	12.549.593.000	9.439.994.364	3.109.598.636	75,22%	1.179.141.000	1.172.256.641	6.884.359	99,42%	21.233.221.000	17.923.948.094	84,41%	
		TOTAL KESELURUHAN	107.460.145.000	109.093.478.742	-1.633.333.742	101,52%	118.180.062.000	112.399.655.949	8.651.947.562	95,11%	14.369.403.000	14.297.920.492	71.482.508	99,50%	240.009.610.000	235.791.055.183	98,24%	

sumber: <http://span1.kemkes.go.id>

03 Januari 2021 pukul 10.01 WIB



1. Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung telah menyusun *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)* Tahun 2021. LKIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, baik dari aspek finansial maupun non-finansial, selama periode Tahun 2021 secara komprehensif sebagai wujud Pertanggungjawaban Publik (*Public Accountability*).

LKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2021 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Tahun 2020-2024. Dengan mengacu pada Rencana Strategis dari 9 Program Unit Utama Kementerian Hukum dan HAM RI, secara umum capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung di tahun 2021 telah tercapai dan bahkan beberapa indikator melebihi dari target yang telah ditentukan.

Sementara itu capaian kinerja dari aspek keuangan, penyerapan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2021 mencapai 98,24% atau sebesar Rp. 235.791.055.183,- dari total anggaran sebesar Rp. 240.009.610.000,-. Hal tersebut merupakan akibat dari terjadinya pandemi Covid-19 dan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Lampung. Beberapa kegiatan perjalanan dinas, rapat koordinasi dan sosialisasi sedapat mungkin ditunda atau dilaksanakan secara virtual, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal kalender kerja (*disbursement plan*) yang telah ditetapkan. Walaupun capaian kinerja dari aspek serapan anggaran belum mencapai 100%, namun apabila dinilai dari kualitas kegiatan dan seluruh program kegiatan dapat terlaksana dengan baik, maka dapat dikatakan pelaksanaan program kegiatan pada Kantor Wilayah Lampung berjalan dengan cukup efisien.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak berjalan sesuai rencana juga diakibatkan dari isu strategis dan kondisi yang dihadapi saat ini. Secara umum isu strategis dan kondisi yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, adalah sebagai berikut:

- a. Beberapa pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal kalender kerja (*disbursement plan*) yang telah ditetapkan, terutama kegiatan rapat-rapat yang mengumpulkan banyak orang dan perjalanan dinas monitoring / evaluasi. Hal ini dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 dan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Lampung.
- b. Kurangnya intensitas koordinasi antar pegawai dan pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung serta pihak eksternal lainnya yang menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kurang optimal.
- c. Keterbatasan SDM dan sarpras baik dalam bentuk jumlah maupun kualitas dan kapasitas dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan.



- d. Terdapat kendala pada realisasi anggaran dikarenakan keterlambatan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang diserahkan kepada pelaksana kegiatan.

Pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja yang telah dicapai serta dievaluasi dan dipertahankan serta disesuaikan dengan sasaran strategis tahun yang akan datang, dengan komitmen yang lebih baik dan terarah dalam pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan akuntabel atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja sehingga berdampak positif dalam mendukung “Kinerja Kemenkumham Semakin pasti dan Berakhlak” pada tahun 2022. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan unit pelaksana teknis di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, K/L terkait, dan Kab/Kota serta instansi terkait lainnya akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap jajaran di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, serta stakeholder Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diperlukan tindak lanjut terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung agar terpenuhinya capaian kinerja yang diharapkan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Langkah-langkah tindak lanjut yang akan diambil adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan tugas dan fungsi yang menyesuaikan dengan Surat Edaran Menkumham serta pelayanan publik yang disesuaikan dengan protokol kesehatan.
- b. Peningkatan koordinasi diantara seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung serta melakukan koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dan stakeholder lainnya, instansi pemerintah maupun pihakpihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Membuat kegiatan capacity building dan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan/program pelatihan, diklat atau seminar yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi baik yang diadakan oleh BPSDM ataupun kerjasama dengan pihak eksternal.
- d. Meningkatkan alokasi anggaran yang tepat sasaran dalam rangka memenuhi sarana prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- e. Pembagian zona wilayah ke dalam 5 wilayah yang diampu oleh tim yang dipilih berdasarkan kompetensinya dan dipimpin oleh Pimpinan Tinggi Pratama dalam melakukan pengawasan.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Di masa mendatang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan Laporan Kinerja ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan bersama serta dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM.



LAMPIRAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG
TABEL REALISASI ANGGARAN PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2021

NO	KODE SATKER	SATKER	BELANJA PEGAWAI				BELANJA BARANG				BELANJA MODAL				TOTAL BELANJA		
			PAGU	REALISASI	SISA	%	PAGU	REALISASI	SISA	%	PAGU	REALISASI	SISA	%	PAGU	REALISASI	%
			(a)	(b)	(a) - (b)	(c) = (b) : (a)	(d)	(e)	(d) - (e)	(f) = (e) : (d)	(g)	(h)	(g) - (h)	(i) = (h) : (g)	(j) = (a) + (d) + (g)	(k) = (b) + (e) + (h)	(l) = (k) : (j)
1		DIVISI ADMINISTRASI															
	408824	SEKRETARIAT JENDERAL	12.962.631.000	12.788.266.941	174.364.059	98,65%	5.891.369.000	5.825.669.752	65.699.248	98,88%	7.480.262.000	7.479.622.851	639.149	99,99%	26.334.262.000	26.093.559.544	99,09%
		SUB TOTAL	12.962.631.000	12.788.266.941	174.364.059	98,65%	5.891.369.000	5.825.669.752	65.699.248	98,88%	7.480.262.000	7.479.622.851	639.149	99,99%	26.334.262.000	26.093.559.544	99,09%
2		DIVISI PELAYANAN HUKUM															
	408822	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM			0	0,00%	3.472.770.000	3.237.436.229	235.333.771	93,22%			0	0,00%	3.472.770.000	3.237.436.229	93,22%
	408826	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL			0	0,00%	1.166.792.000	1.120.823.975	45.968.025	96,06%			0	0,00%	1.166.792.000	1.120.823.975	96,06%
	408827	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			0	0,00%	208.000.000	203.564.854	4.435.146	97,87%			0	0,00%	208.000.000	203.564.854	97,87%
	408828	DITJEN HAK ASASI MANUSIA			0	0,00%	231.573.000	195.988.704	35.584.296	84,63%			0	0,00%	231.573.000	195.988.704	84,63%
	408829	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL			0	0,00%	1.784.414.000	1.709.964.634	74.449.366	95,83%	3.000.000	3.000.000	0	100,00%	1.787.414.000	1.712.964.634	95,83%
	408831	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA			0	0,00%	200.621.000	193.709.323	6.911.677	96,55%			0	0,00%	200.621.000	193.709.323	96,55%
		SUB TOTAL	0	0	0	0,00%	7.064.170.000	6.661.487.719	402.682.281	94,30%	3.000.000	3.000.000	0	100,00%	7.067.170.000	6.664.487.719	94,30%
3		DIVISI PEMASYARAKATAN															
	408823	DITJEN PEMASYARAKATAN			0	0,00%	949.080.000	936.579.062	12.500.938	98,68%			0	0,00%	949.080.000	936.579.062	98,68%
	406545	LEMBAGA PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG	9.810.581.000	10.279.035.009	-468.454.009	104,77%	9.685.132.000	9.671.933.285	13.198.715	99,86%			0	0,00%	19.495.713.000	19.950.968.294	102,34%
	652962	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA B. LAMPUNG	6.670.800.000	8.054.132.105	-1.383.332.105	120,74%	10.042.696.000	9.435.530.070	607.165.930	93,95%			0	0,00%	16.713.496.000	17.489.662.175	104,64%
	497764	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA B. LAMPUNG	5.721.471.000	5.720.340.451	1.130.549	99,98%	3.354.464.000	3.348.727.269	5.736.731	99,83%			0	0,00%	9.075.935.000	9.069.067.720	99,92%
	406282	LEMBAGA PEMASYARAKATAN METRO	5.637.934.000	5.628.988.045	8.945.955	99,84%	6.235.591.000	6.207.027.789	28.563.211	99,54%	155.000.000	154.950.000	50.000	99,97%	12.028.525.000	11.990.965.834	99,69%
	408536	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALIANDA	5.088.805.000	5.088.753.939	51.061	100,00%	6.666.248.000	6.632.811.780	33.436.220	99,50%	191.000.000	190.000.000	1.000.000	99,48%	11.946.053.000	11.911.565.719	99,71%
	408530	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA AGUNG	3.742.358.000	3.735.083.830	7.274.170	99,81%	3.961.581.000	3.761.234.000	200.347.000	94,94%	206.000.000	205.945.000	55.000	99,97%	7.909.939.000	7.702.262.830	97,37%
	406551	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KOTABUMI	3.930.055.000	3.928.323.744	1.731.256	99,96%	4.196.034.000	4.173.482.293	22.551.707	99,46%			0	0,00%	8.126.089.000	8.101.806.037	99,70%
	497758	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN	3.365.233.000	3.272.759.799	92.473.201	97,25%	4.539.053.000	4.409.986.725	3.000.607.786	97,16%			0	0,00%	7.904.286.000	7.682.746.524	97,20%
	683313	LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNUNG SUGIH	3.915.468.000	3.849.553.680	65.914.320	98,32%	6.436.460.000	6.267.199.736	169.260.264	97,37%	5.155.000.000	5.092.146.000	62.854.000	98,78%	15.506.928.000	15.208.899.416	98,08%
	683704	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK B. LAMPUNG	4.718.452.000	4.797.701.923	-79.249.923	101,68%	2.712.099.000	2.698.551.230	13.547.770	99,50%			0	0,00%	7.430.551.000	7.496.253.153	100,88%
	663073	RUMAH TAHANAN NEGARA B. LAMPUNG	7.212.701.000	7.281.342.715	-68.641.715	100,95%	11.668.030.000	11.629.137.678	38.892.322	99,67%			0	0,00%	18.880.731.000	18.910.480.393	100,16%
	406570	RUMAH TAHANAN NEGARA MENGGALA	2.822.397.000	2.777.832.058	44.564.942	98,42%	4.195.507.000	4.157.143.539	38.363.461	99,09%			0	0,00%	7.017.904.000	6.934.975.597	98,82%
	406576	RUMAH TAHANAN NEGARA SUKADANA	2.915.425.000	2.840.641.105	74.783.895	97,43%	3.684.994.000	3.563.634.819	121.359.181	96,71%			0	0,00%	6.600.419.000	6.404.275.924	97,03%
	406591	RUMAH TAHANAN NEGARA KRUI	2.911.156.000	2.763.128.503	148.027.497	94,92%	2.078.224.000	1.938.420.000	139.804.000	93,27%			0	0,00%	4.989.380.000	4.701.548.503	94,23%
	497742	RUMAH TAHANAN NEGARA KOTABUMI	3.455.108.000	3.461.214.673	-6.106.673	100,18%	3.324.784.000	3.275.472.145	49.311.855	98,52%			0	0,00%	6.779.892.000	6.736.686.818	99,36%
	683390	RUMAH TAHANAN KELAS IIB KOTA AGUNG	2.015.776.000	2.067.041.332	-51.265.332	102,54%	3.443.531.000	3.326.373.784	117.157.216	96,60%			0	0,00%	5.459.307.000	5.393.415.116	98,79%
	109137	BALAI PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG	4.691.630.000	4.625.725.733	65.904.267	98,60%	1.060.737.000	1.055.042.012	5.694.988	99,46%			0	0,00%	5.752.367.000	5.680.767.745	98,76%
	653129	BALAI PEMASYARAKATAN METRO	3.103.316.000	3.103.315.196	804	100,00%	899.376.000	899.373.000	3.000	100,00%			0	0,00%	4.002.692.000	4.002.688.196	100,00%
	632015	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KOTABUMI	449.321.000	434.923.795	14.397.205	96,80%	1.094.253.000	1.042.279.460	51.973.540	95,25%			0	0,00%	1.543.574.000	1.477.203.255	95,70%
	632017	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PRINGSEWU	810.321.000	777.420.495	32.900.505	95,94%	917.018.000	763.257.772	153.760.228	83,23%			0	0,00%	1.727.339.000	1.540.678.267	89,19%
	632623	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA LAMPUNG	1.882.504.000	2.132.297.762	-249.793.762	113,27%	530.940.000	488.410.666	42.529.334	91,99%			0	0,00%	2.413.444.000	2.620.708.428	108,59%
	653260	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA METRO	1.286.845.000	1.496.958.808	-210.113.808	116,33%	467.718.000	374.309.500	93.408.500	80,03%			0	0,00%	1.754.563.000	1.871.268.308	106,65%
	653264	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KOTABUMI	835.370.000	877.000.012	-41.630.012	104,98%	531.380.000	416.586.500	114.793.500	78,40%			0	0,00%	1.366.750.000	1.293.586.512	94,65%
		SUB TOTAL	86.993.027.000	88.993.514.712	-2.000.487.712	102,30%	92.674.930.000	90.472.504.114	5.073.967.397	97,62%	5.707.000.000	5.643.041.000	63.959.000	98,88%	185.374.957.000	185.109.059.826	99,86%
4		DIVISI KEIMIGRASIAN															
	408825	DITJEN IMIGRASI			0	0,00%	770.345.000	683.535.867	86.809.133	88,73%			0	0,00%	770.345.000	683.535.867	88,73%
	408165	KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDAR LAMPUNG	4.791.779.000	4.665.380.171	126.398.829	97,36%	5.408.566.000	3.860.218.317	1.548.347.683	71,37%	198.000.000	197.835.000	165.000	99,92%	10.398.345.000	8.723.433.488	83,89%
	109157	KANTOR IMIGRASI KELAS III KALIANDA	1.307.170.000	1.279.215.291	27.954.709	97,86%	3.023.529.000	2.285.648.129	737.880.871	75,60%	429.777.000	427.900.851	1.876.149	99,56%	4.760.476.000	3.992.764.271	83,87%
	683111	KANTOR IMIGRASI KELAS III KOTABUMI	1.405.538.000	1.367.101.627	38.436.373	97,27%	3.347.153.000	2.610.592.051	736.560.949	77,99%	551.364.000	546.520.790	4.843.210	99,12%	5.304.055.000	4.524.214.468	85,30%
		SUB TOTAL	7.504.487.000	7.311.697.089	192.789.911	97,43%	12.549.593.000	9.439.994.364	3.109.598.636	75,22%	1.179.141.000	1.172.256.641	6.884.359	99,42%	21.233.221.000	17.923.948.094	84,41%
		TOTAL KESELURUHAN	107.460.145.000	109.093.478.742	-1.633.333.742	101,52%	118.180.062.000	112.399.655.949	8.651.947.562	95,11%	14.369.403.000	14.297.920.492	71.482.508	99,50%	240.009.610.000	235.791.055.183	98,24%



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KANTOR WILAYAH LAMPUNG

JL.RW. MONGINSIDI NO. 184 BANDAR LAMPUNG

TELP (0721) 474813, 483927, 485427, 471060

Laman : <https://lampung.kemenkumham.go.id>

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TARGET KINERJA B03 – B12 TAHUN 2021

Berdasarkan matriks monitoring kinerja Tahun 2021, hasil yang diperoleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sebagai berikut :

No	Divisi	Hasil Rata – Rata Nilai Tarja			
		B03	B06	B09	B12
1.	Kepala Kantor Wilayah	100%	100%	100%	100%
2.	Divisi Administrasi	95%	100%	100%	100%
3.	Divisi Yankum	100%	100%	99,61%	100%
-	Ditjen Administrasi Hukum Umum	100%	100%	98%	100%
-	Ditjen Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%	100%
-	BPHN	100%	100%	100%	100%
-	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%
-	Ditjen HAM	100%	100%	100%	100%
-	BalitbangHAM	100%	100%	100%	100%
4.	Divisi Pemasyarakatan	100%	100%	100%	100%
5.	Divisi Keimigrasian	95%	100%	100%	100%
Nilai Rata- Rata Total		98%	100%	99,92%	100%

Kepala Divisi Administrasi

B03

1. Pengelolaan Sistem Integrasi Pengadaan Barang/Jasa Kemenkumham Unggul (SIPaSTIKU) mendapat point **80**. Keterangan Verifikator : Tolong dilengkapi juga data dukung pada point Action Plan.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

B06

1. Mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi HAM dan melaporkannya melalui sistem pemantauan yang dikelola oleh unit kerja di bawah Presiden mendapat point **100** namun terdapat Keterangan dari Tim Verifikator : Data dukung terpenuhi, berupa: - Surat notifikasi pelaksanaan Aksi HAM - Laporan pemantauan pelaksanaan Aksi HAM di Kabupaten Pringsewu, Pesawaran dan Tanggamus - Surat keterangan yang ditanda tangan oleh Kadiv Yankum bahwa berdasarkan surat notifikasi dari Ditjen HAM, bahwa pelaporan B04 akan digabung dengan laporan B08 dan akan dilaporkan pada B09.
2. Mendorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM mendapat point **100** namun terdapat Keterangan dari Tim Verifikator : Data dukung terpenuhi, berupa: - Surat keterangan yang ditanda tangan oleh Kadiv Yankum bahwa data dukung KKP HAM belum dapat dipenuhi karena sesuai dengan surat notifikasi pelaksanaan KKP HAM ada perubahan jadwal, dan penyampaian kuisisioner paling lambat tanggal 15 Agustus. - Surat notifikasi pelaksanaan Aksi HAM ke Pemda - Laporan rapat koordinasi KKP HAM.

B12

3. Tercapainya pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Wilayah dan Daerah terkait penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris di Wilayah mendapat poin **95**. Keterangan dari Tim Verifikator : Data dukung (berupa lampiran laporan) kurang upload.

Kepala Divisi Keimigrasian

B03

1. Pengembangan Penegakan Hukum (Gakkum) Keimigrasian mendapat point **90**. Keterangan Verifikator : SK Timpora Kanim Kelas I TPI Bandar Lampung belum dilampirkan, Laporan Timpora Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung dan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda belum ada. Mapping hanya ada data Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda, Laporan Operasi Gabungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung belum ditanda tangani.

B06

1. Meningkatnya minat masyarakat terhadap pelayanan Eazy Passport mendapat point **100** namun terdapat Keterangan dari Tim Verifikator : Lengkap dengan catatan, PDF hasil

- scan kualitasnya agar diperbaiki : 1. Dokumen terbaca tidak terlalu jelas, dokumentasi buram; 2. QR Code sumaker untuk beberapa dokumen tidak bisa terbaca.
2. Pengembangan Penegakan Hukum (Gakkum) Keimigrasian mendapat point **100** namun terdapat Keterangan dari Tim Verifikator : Lengkap dengan catatan beberapa kualitas scan dokumen kurang layak (hasilnya buram).

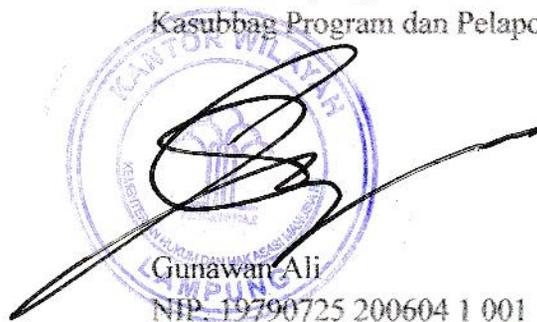
Kepala Divisi Pemasyarakatan

B03

1. Meningkatnya Koordinasi Pengamanan dengan Instansi terkait mendapat point **100**. Namun terdapat Keterangan dari Tim Verifikator yaitu Laporan harap dilengkapi dengan analisa sendiri oleh Divisi Pas.
2. Inspeksi mendadak, tes urin bagi petugas dan narapidana/tahanan/anak dan pemindahan bandar narkoba ke lapas maximum security mendapat point **100**. Namun terdapat Keterangan dari Tim Verifikator yaitu Hasil dan analisa harusnya terpisah.

Bandar Lampung, 07 Januari 2021

Kasubbag Program dan Pelaporan



Gunawan Ali
NIP. 19790725 200604 1 001

BERITA ACARA
HASIL EVALUASI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP PADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG

Berdasarkan pembahasan hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kesesuaian atas Proses Persiapan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses persiapan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung tahun 2021 ~~sesuai/tidak sesuai~~ **sesuai/kurang sesuai** dalam pedoman Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, sebagai berikut:

No	Persiapan PM	Jumlah	Keterangan
1.	Jumlah sampling/satuan kerja PM	1 satuan kerja	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung
2.	Jumlah Tim Assesor	0 orang	Belum dibentuk Tim Assesor
3.	Sertifikasi Tim Assesor	0 orang	Belum ada sertifikasi untuk Tim Assesor
4.	Anggaran pelaksana PM	Rp57.126.000	Penguatan SPIP
5.	Keterwakilan sasaran strategis	9	-

2. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah **3,713** atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 3 (Terdefinisi)**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik.
- b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah **3,27**.
- c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah **2,81**.

No	Fokus Penilaian	Hasil
1	Maturitas penyelenggaraan SPIP	3,713
2	MRI	3,27
3	IEPK	2,81

3. Saran Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, disarankan sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan kualitas penilaian penetapan tujuan secara berkelanjutan, agar para Kepala Divisi berkoordinasi secara berjenjang kepada Eselon I Pembina masing-masing terkait dengan formulasi dan penentuan Indeks kepuasan layanan internal baik pada level sasaran strategis maupun pada level program.
- b. Untuk meningkatkan kualitas dari penilaian struktur dan proses secara berkelanjutan atas

hasil evaluasi sebagai berikut:

- 1) Kepemimpinan yang kondusif
Untuk pelaksanaan kegiatan manajemen resiko agar secara khusus dianggarkan pada RKA-K/L dan dokumen manajemen resiko yang telah disusun agar diterapkan / direalisasikan dan dievaluasi.
 - 2) Hubungan kerja dengan Instansi Pemerintah
Dalam penyusunan Manajemen Risiko, agar mengidentifikasi, menilai, dan mengelola resiko terkait hubungan organisasi dengan mitra kerja.
 - 3) Analisis resiko
Agar menentukan prioritas resiko operasional dan strategis dan melakukan evaluasi, melaksanakan rencana tindak pengendalian.
 - 4) Informasi yang relevan
Agar mengkomunikasikan strategi dan kebijakan manajemen resiko dan rencana tindak pengendalian yang akan dilakukan kepada Pejabat Struktural dan Pegawai.
 - 5) Secara keseluruhan penilaian struktur dan proses untuk kedepannya agar dipersiapkan kaitannya dengan kategori penilaian struktur dan proses yaitu:
 - a) Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;
 - b) Keandalan pelaporan keuangan;
 - c) Pengamanan aset negara; dan
 - d) Ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hasil penilaian pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP secara berkelanjutan atas hasil evaluasi sebagai berikut:
- 1) Masih terdapat realisasi/persentase realisasi kinerja dari divisi teknis yang berada jauh dibawah target.
 - 2) Para Kepala Divisi bertanggung jawab untuk melakukan penilaian capaian kinerja secara mandiri dan menyampaikan data capaian kinerja pada tiap level sasaran strategis, program dan kegiatan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Bagian Program dan Humas.

Demikian berita acara hasil evaluasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan rencana aksi yang dibuat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara ini.

Kepala Bagian Program dan Humas
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

Basnamara
NIP. 19700926 199903 1 001

Bandar Lampung, 1 November 2021

Tim Evaluasi
Pengendali Teknis

M. Rusli Basri
NIP. 19630227 199803 1 001

Ketua Tim,

Vito Adriano Wismar
NIP. 19820918 200801 1 002

Anggota Tim,



Faisal Affi

NIP. 19930523 201503 1 001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH LAMPUNG**

Jalan R.W. Monginsidi No. 184, Bandar Lampung
Telp. (0721) 485427, 483972, 474813, Faks. 471060,
Web: lampung.kemenkumham.go.id – Email: kanwillampung@kemenkumham.go.id

**LAPORAN KEGIATAN SURVEI
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)
PADA SATUAN KERJA DI JAJARAN KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM LAMPUNG**

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

Dalam rangka mendapatkan informasi yang lebih objektif tentang pelaksanaan survey IPK-IKM dan memastikan tujuan pelaksanaan survey sesuai dengan rencana maka perlu dilakukan kegiatan monitoring hasil survey IPK-IKM. Monitoring ini telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung pada Unit Pelaksana Teknis yang berada di Provinsi Lampung terdiri dari:

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung
3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda
4. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro
5. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi
6. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Agung
7. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung
8. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung
9. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung
10. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Way Kanan
11. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih
12. Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung
13. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sukadana
14. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Menggala
15. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Krui
16. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kotabumi
17. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kota Agung
18. Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung
19. Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro
20. Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi
21. Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu
22. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Bandar Lampung
23. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Kotabumi
24. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Metro
25. Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung
26. Kantor Imigrasi Kelas III Kalianda
27. Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi

B. MAKSUD & TUJUAN

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung kepada UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang berada di wilayah Provinsi Lampung terkait dengan pelaksanaan survei Indek Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM).

C. RUANG LINGKUP

Subjek dari kegiatan monitoring survei Indek Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM) ini adalah seluruh UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang berada di Wilayah Provinsi Lampung dan Objek adalah seluruh unsur yang ada didalam survei IPK-IKM Tahun 2021 Periode Januari - Desember.

D. DASAR

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135.
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun 2019 Nomor 671.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Survei IKM/IPK dilaksanakan pada 27 (dua puluh tujuh) satuan kerja di Jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung setiap bulan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2021 dimulai sejak Januari hingga Desember, oleh admin Survei IKM/IPK yang ditugaskan pada masing-masing satuan kerja. Dengan interval rekapitulasi hasil yang dilaporkan per triwulan. Rekapitulasi kini telah mencapai **Triwulan IV**

III. HASIL

(terlampir)

IV. KESIMPULAN

Kegiatan Rekapitulasi Hasil Survei IKM/IPK pada Satuan Kerja di Jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung telah dilaksanakan dengan melibatkan semua satuan kerja yang diwakili oleh masing-masing admin.

V. SARAN

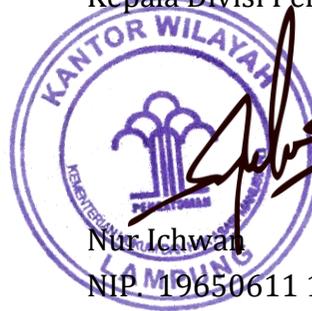
Agar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung secara berkelanjutan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan Survei IKM/IPK di satuan kerja.

VI. PENUTUP

Demikian Kegiatan Rekapitulasi Hasil Survei IKM/IPK pada Satuan Kerja di Jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 6 Desember 2021

Kepala Divisi Pelayanan Hukum & HAM



Nur Ichwan

NIP. 19650611 198503 1 001

REKAPITULASI HASIL SURVEI
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)
PADA SATUAN KERJA DI JAJARAN KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM LAMPUNG

TRIWULAN I (PERIODE JANUARI - MARET) 2021

2021 SATUAN KERJA	JAN			FEB			MAR		
	RESP	IKM	IPK	RESP	IKM	IPK	RESP	IKM	IPK
KANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG	38	18.60	13.82	175	18.43	14.01	113	18.76	14.26
KANIM KELAS I BANDAR LAMPUNG	41	18.13	13.60	13	19.74	14.79	81	18.57	13.84
KANIM KELAS III KALIANDA	9	18.21	13.85	30	19.20	14.13	42	17.87	13.45
KANIM KELAS III KOTABUMI	1	17.75	15.00	32	19.44	14.72	37	19.45	14.50
LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG	0	0.00	0.00	12	19.31	14.51	101	19.58	14.66
LAPAS KELAS II A KALIANDA	0	0.00	0.00	43	20.00	15.00	45	19.88	14.44
LAPAS KELAS II A METRO	0	0.00	0.00	32	18.04	13.85	38	18.04	13.52
LAPAS KELAS II A KOTABUMI	0	0.00	0.00	19	18.85	13.48	44	19.18	14.39
LAPAS KELAS II B KOTA AGUNG	0	0.00	0.00	33	19.24	14.47	62	18.52	13.74
LAPAS NARKOTIKA KELAS II A BANDAR LAMPUNG	0	0.00	0.00	103	18.61	13.39	9	18.58	13.80
LAPAS PEREMPUAN KELAS II A BANDAR LAMPUNG	0	0.00	0.00	46	19.42	14.76	41	19.73	14.89
LAPAS ANAK KELAS II BANDAR LAMPUNG	0	0.00	0.00	5	18.65	13.74	18	18.71	14.25
LAPAS KELAS II B WAY KANAN	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	52	18.53	14.00
LAPAS KELAS II B GUNUNG SUGIH	0	0.00	0.00	42	19.30	14.55	1	18.88	14.10
RUTAN KELAS I BANDAR LAMPUNG	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	58	18.86	14.10
RUTAN KELAS II B SUKADANA	0	0.00	0.00	13	19.16	14.38	9	18.79	14.20
RUTAN KELAS II B MENGGALA	11	18.70	14.22	10	19.70	14.78	44	19.48	14.76
RUTAN KELAS II B KRUI	5	18.65	14.28	0	0.00	0.00	22	19.15	14.16
RUTAN KELAS II B KOTABUMI	1	20.00	15.00	26	19.34	14.34	41	19.81	14.97
RUTAN KELAS II B KOTA AGUNG	0	0.00	0.00	19	18.95	14.48	24	19.70	14.79
BAPAS KELAS II BANDAR LAMPUNG	30	17.90	13.35	34	19.25	14.54	43	19.83	14.94
BAPAS KELAS II METRO	4	17.00	12.86	13	18.01	13.62	27	18.26	13.80
BAPAS KELAS II KOTABUMI	0	0.00	0.00	19	19.59	14.74	34	18.91	13.86
BAPAS KELAS II PRINGSEWU	21	19.02	14.83	14	17.56	13.68	28	18.00	13.70
RUPBASAN KELAS I BANDAR LAMPUNG	1	16.63	12.30	7	18.02	13.91	32	18.39	13.61
RUPBASAN KELAS II KOTABUMI	0	0.00	0.00	7	19.14	13.84	3	18.25	13.50
RUPBASAN KELAS II METRO	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	18.88	15.00

REKAPITULASI HASIL SURVEI
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)
PADA SATUAN KERJA DI JAJARAN KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM LAMPUNG

TRIWULAN II (PERIODE APRIL - JUNI) 2021

2021 SATUAN KERJA	APR			MEI			JUN		
	RESP	IKM	IPK	RESP	IKM	IPK	RESP	IKM	IPK
KANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG	262	16.68	12.38	148	14.45	10.71	54	18.97	14.30
KANIM KELAS I BANDAR LAMPUNG	44	18.98	14.16	20	18.35	14.15	63	19.81	14.89
KANIM KELAS III KALIANDA	31	19.31	14.71	35	19.66	14.82	30	19.71	14.75
KANIM KELAS III KOTABUMI	33	19.73	14.97	32	19.86	14.97	33	19.99	15.00
LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG	127	19.78	14.70	102	19.63	14.81	106	19.82	14.89
LAPAS KELAS II A KALIANDA	37	19.82	14.94	40	19.96	14.92	34	19.98	14.92
LAPAS KELAS II A METRO	48	19.53	14.68	31	19.55	14.85	12	19.69	14.96
LAPAS KELAS II A KOTABUMI	32	19.50	14.62	32	19.31	14.52	30	19.54	14.64
LAPAS KELAS II B KOTA AGUNG	78	19.38	14.64	104	19.64	14.69	113	19.77	14.80
LAPAS NARKOTIKA KELAS II A BANDAR LAMPUNG	34	18.99	14.25	159	18.50	13.33	9	19.58	14.70
LAPAS PEREMPUAN KELAS II A BANDAR LAMPUNG	38	19.77	14.82	32	19.98	15.00	31	19.99	15.00
LAPAS ANAK KELAS II BANDAR LAMPUNG	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
LAPAS KELAS II B WAY KANAN	10	19.78	15.00	8	19.95	15.00	49	19.77	14.70
LAPAS KELAS II B GUNUNG SUGIH	11	14.80	19.80	11	19.37	14.57	104	19.21	14.37
RUTAN KELAS I BANDAR LAMPUNG	26	19.86	14.91	8	15.00	20.00	63	19.74	14.79
RUTAN KELAS II B SUKADANA	10	18.95	14.24	0	0.00	0.00	35	19.68	14.74
RUTAN KELAS II B MENGGALA	36	19.77	14.76	44	19.39	14.25	11	19.63	14.59
RUTAN KELAS II B KRUI	0	0.00	0.00	1	20.00	15.00	7	18.18	13.20
RUTAN KELAS II B KOTABUMI	22	19.68	14.90	31	19.72	14.75	49	19.72	14.62
RUTAN KELAS II B KOTA AGUNG	50	19.29	14.58	31	19.27	14.46	31	19.33	14.65
BAPAS KELAS II BANDAR LAMPUNG	43	19.69	14.69	42	19.58	14.84	55	19.70	14.79
BAPAS KELAS II METRO	5	19.33	14.91	18	18.98	14.30	47	19.30	14.60
BAPAS KELAS II KOTABUMI	16	18.62	14.35	36	18.66	13.59	35	18.84	14.23
BAPAS KELAS II PRINGSEWU	34	18.53	13.97	30	19.19	14.48	30	19.40	14.55
RUPBASAN KELAS I BANDAR LAMPUNG	2	12.50	9.38	31	18.77	14.25	72	18.93	14.23
RUPBASAN KELAS II KOTABUMI	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
RUPBASAN KELAS II METRO	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2	18.50	13.88

REKAPITULASI HASIL SURVEI
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)
PADA SATUAN KERJA DI JAJARAN KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM LAMPUNG

TRIWULAN III (PERIODE JULI - SEPTEMBER) 2021

2021	JUL			AGU			SEP		
	RESP	IKM	IPK	RESP	IKM	IPK	RESP	IKM	IPK
SATUAN KERJA									
KANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG	164	16.92	12.69	58	19.84	14.98	55	19.67	14.67
KANIM KELAS I BANDAR LAMPUNG	5	19.33	14.55	58	19.01	14.35	24	18.63	14.66
KANIM KELAS III KALIANDA	42	19.07	14.39	34	19.46	14.63	32	19.48	14.69
KANIM KELAS III KOTABUMI	33	19.95	14.99	32	19.98	15.00	32	19.98	15.00
LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG	122	19.74	14.79	115	19.82	14.89	91	19.92	14.82
LAPAS KELAS II A KALIANDA	30	19.96	14.99	33	19.89	15.00	35	19.88	14.90
LAPAS KELAS II A METRO	17	19.26	14.79	35	19.21	14.19	47	19.47	14.60
LAPAS KELAS II A KOTABUMI	29	19.50	14.84	31	19.76	14.84	32	19.64	14.42
LAPAS KELAS II B KOTA AGUNG	46	19.85	14.83	88	19.76	14.87	75	19.43	14.61
LAPAS NARKOTIKA KELAS II A BANDAR LAMPUNG	16	19.79	14.94	26	19.68	14.72	24	19.64	14.76
LAPAS PEREMPUAN KELAS II A BANDAR LAMPUNG	33	19.92	14.92	31	19.78	15.00	31	19.96	14.84
LAPAS ANAK KELAS II BANDAR LAMPUNG	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
LAPAS KELAS II B WAY KANAN	36	19.81	14.86	8	20.00	15.00	5	20.00	14.91
LAPAS KELAS II B GUNUNG SUGIH	74	19.47	14.68	11	19.59	14.63	4	20.00	15.00
RUTAN KELAS I BANDAR LAMPUNG	4	20.00	15.00	7	19.79	14.74	0	0.00	0.00
RUTAN KELAS II B SUKADANA	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
RUTAN KELAS II B MENGGALA	0	0.00	0.00	4	19.25	15.00	3	18.75	13.05
RUTAN KELAS II B KRUI	7	18.93	13.97	2	20.00	15.00	3	19.38	14.25
RUTAN KELAS II B KOTABUMI	0	0.00	0.00	33	19.34	14.43	46	19.54	14.66
RUTAN KELAS II B KOTA AGUNG	31	19.03	14.42	43	19.21	14.32	33	19.42	14.65
BAPAS KELAS II BANDAR LAMPUNG	48	19.52	14.68	92	19.27	14.48	95	19.79	14.85
BAPAS KELAS II METRO	42	19.73	14.82	31	19.89	14.97	22	19.51	14.78
BAPAS KELAS II KOTABUMI	27	18.60	13.92	36	18.88	14.29	38	19.16	14.08
BAPAS KELAS II PRINGSEWU	15	89.95	89.31	23	19.69	14.69	31	19.19	14.43
RUPBASAN KELAS I BANDAR LAMPUNG	16	19.25	14.63	14	19.54	14.68	34	19.38	14.75
RUPBASAN KELAS II KOTABUMI	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
RUPBASAN KELAS II METRO	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00

REKAPITULASI HASIL SURVEI
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)
PADA SATUAN KERJA DI JAJARAN KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM LAMPUNG

TRIWULAN IV (PERIODE OKTOBER - DESEMBER) 2021

2021	OKT			NOV			DES		
	RESP	IKM	IPK	RESP	IKM	IPK	RESP	IKM	IPK
KANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG	33	19.92	14.96	30	18.99	14.24	4	20.00	15.00
KANIM KELAS I BANDAR LAMPUNG	58	19.16	14.50	59	19.17	14.66	19	19.88	14.86
KANIM KELAS III KALIANDA	44	19.06	14.51	31	18.71	13.91	4	19.72	15.00
KANIM KELAS III KOTABUMI	31	19.96	15.00	31	19.98	14.97	31	19.99	14.99
LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG	126	19.77	14.79	116	19.66	14.81	31	19.94	14.93
LAPAS KELAS II A KALIANDA	40	19.82	14.88	42	19.86	14.95	35	19.83	14.94
LAPAS KELAS II A METRO	39	19.71	14.61	25	19.60	14.89	41	19.56	14.66
LAPAS KELAS II A KOTABUMI	31	19.83	14.75	37	19.17	14.36	20	19.27	14.69
LAPAS KELAS II B KOTA AGUNG	7	19.95	15.00	31	19.82	14.90	5	19.48	14.55
LAPAS NARKOTIKA KELAS II A BANDAR LAMPUNG	28	19.57	14.81	27	19.58	14.80	10	19.93	15.00
LAPAS PEREMPUAN KELAS II A BANDAR LAMPUNG	30	19.96	15.00	30	19.98	15.00	4	20.00	15.00
LAPAS ANAK KELAS II BANDAR LAMPUNG	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
LAPAS KELAS II B WAY KANAN	8	19.95	15.00	8	19.11	14.10	10	19.33	14.28
LAPAS KELAS II B GUNUNG SUGIH	55	19.67	14.72	30	19.46	14.54	35	19.68	14.79
RUTAN KELAS I BANDAR LAMPUNG	8	18.17	13.43	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
RUTAN KELAS II B SUKADANA	5	19.78	15.00	5	19.06	15.00	8	20.00	14.94
RUTAN KELAS II B MENGGALA	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
RUTAN KELAS II B KRUI	22	18.89	14.16	12	20.00	15.00	0	0.00	0.00
RUTAN KELAS II B KOTABUMI	12	19.28	14.36	1	20.00	15.00	28	19.22	14.16
RUTAN KELAS II B KOTA AGUNG	16	19.70	14.41	17	19.96	14.95	5	19.63	15.00
BAPAS KELAS II BANDAR LAMPUNG	89	19.81	14.95	70	19.94	14.97	81	19.91	14.92
BAPAS KELAS II METRO	32	19.36	14.40	32	19.36	14.40	15	18.95	14.55
BAPAS KELAS II KOTABUMI	34	18.42	13.91	26	18.53	13.74	12	19.31	14.25
BAPAS KELAS II PRINGSEWU	35	19.82	14.87	31	19.70	14.78	19	19.90	14.88
RUPBASAN KELAS I BANDAR LAMPUNG	11	20.00	15.00	20	19.10	14.35	2	20.00	15.00
RUPBASAN KELAS II KOTABUMI	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
RUPBASAN KELAS II METRO	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00

REKAPITULASI HASIL SURVE
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)
PADA SATUAN KERJA DI JAJARAN KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM LAMPUNG

TAHUNAN (JANUARI - DESEMBER) 2021

2021	SUMMARY 2021			
SATUAN KERJA	JML RESPONDEN	AVG RESPONDEN	AVG IKM	AVG IPK
KANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG	1134	94.50	18.44 / 3.69	13.84 / 3.69
KANIM KELAS I BANDAR LAMPUNG	495	41.25	19.04 / 3.81	14.41 / 3.84
KANIM KELAS III KALIANDA	364	30.33	19.12 / 3.82	14.40 / 3.84
KANIM KELAS III KOTABUMI	358	29.83	19.67 / 3.93	14.93 / 3.98
LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG	1049	87.42	19.72 / 3.94	14.78 / 3.94
LAPAS KELAS II A KALIANDA	414	34.50	19.90 / 3.98	14.90 / 3.97
LAPAS KELAS II A METRO	365	30.42	19.24 / 3.85	14.51 / 3.87
LAPAS KELAS II A KOTABUMI	337	28.08	19.41 / 3.88	14.50 / 3.87
LAPAS KELAS II B KOTA AGUNG	642	53.50	19.53 / 3.91	14.65 / 3.91
LAPAS NARKOTIKA KELAS II A BANDAR LAMPUNG	445	37.08	19.31 / 3.86	14.41 / 3.84
LAPAS PEREMPUAN KELAS II A BANDAR LAMPUNG	347	28.92	19.86 / 3.97	14.93 / 3.98
LAPAS ANAK KELAS II BANDAR LAMPUNG	23	1.92	18.68 / 3.74	14.00 / 3.73
LAPAS KELAS II B WAY KANAN	194	16.17	19.62 / 3.92	14.69 / 3.92
LAPAS KELAS II B GUNUNG SUGIH	378	31.50	19.49 / 3.90	14.61 / 3.90
RUTAN KELAS I BANDAR LAMPUNG	174	14.50	18.77 / 3.75	15.28 / 4.08
RUTAN KELAS II B SUKADANA	85	7.08	19.35 / 3.87	14.64 / 3.90
RUTAN KELAS II B MENGGALA	163	13.58	19.33 / 3.87	14.43 / 3.85
RUTAN KELAS II B KRUI	81	6.75	19.24 / 3.85	14.34 / 3.82
RUTAN KELAS II B KOTABUMI	290	24.17	19.60 / 3.92	14.65 / 3.91
RUTAN KELAS II B KOTA AGUNG	300	25.00	19.41 / 3.88	14.61 / 3.90
BAPAS KELAS II BANDAR LAMPUNG	722	60.17	19.52 / 3.90	14.67 / 3.91
BAPAS KELAS II METRO	288	24.00	18.97 / 3.79	14.33 / 3.82
BAPAS KELAS II KOTABUMI	313	26.08	18.87 / 3.77	14.09 / 3.76
BAPAS KELAS II PRINGSEWU	311	25.92	18.99 / 3.80	14.36 / 3.83
RUPBASAN KELAS I BANDAR LAMPUNG	242	20.17	18.38 / 3.68	13.84 / 3.69
RUPBASAN KELAS II KOTABUMI	10	0.83	18.70 / 3.74	13.67 / 3.65
RUPBASAN KELAS II METRO	3	0.25	18.69 / 3.74	14.44 / 3.85

KOMPILASI KENDALA YANG DITEMUI

SATKER	LAP.	KENDALA
BAPAS KELAS II BANDAR LAMPUNG	JAN	TIDAK SEMUA PENGGUNA LAYANAN MEMILIKI SARANA UNTUK MELAKUKAN SURVEY ONLINE, DAN MENURUT BEBERAPA RESPONDEN YANG MENGISI SURVEY BAHWA SURVEY TERLALU PANJANG DAN PERTANYAAN YANG DISAMPAIKAN HAMPIR MIRIP
BAPAS KELAS II BANDAR LAMPUNG	FEB	KENDALA DALAM PELAKSANAAN SURVEY INTEGRITAS TERKENDALA SAAT MEREKAP SIAPA YANG BELUM MELAKUKAN SURVEY
BAPAS KELAS II BANDAR LAMPUNG	MAR	BELUM SEMUA PEGAWAI MELAKUKAN SURVEY INTEGRITAS
BAPAS KELAS II BANDAR LAMPUNG	APR	TIDAK SEMUA RESPONDEN MEMILIKI SARANA UNTUK MEMILIKI SURVEY
BAPAS KELAS II BANDAR LAMPUNG	MEI	TIDAK SEMUA PENGGUNA LAYANAN MEMILIKI KUOTA
BAPAS KELAS II BANDAR LAMPUNG	JUN	BELUM SEMUA PENGGUNA LAYANAN BERSEDIA MENGISI SURVEY
BAPAS KELAS II BANDAR LAMPUNG	JUL	MASIH KURANGNYA KESADARAN PENGGUNA LAYANAN UNTK BERSEDIA MENGISI SURVEY
BAPAS KELAS II BANDAR LAMPUNG	AGU	MASIH KURANGNYA KESADARAN PELANGGAN UNTUK MENGISI SURVEY
BAPAS KELAS II BANDAR LAMPUNG	SEP	BELUM SEMUA PENGGUNA LAYANAN BERSEDIA MENGISI SURVEY DAN MEMPUNYAI SARANA UNTUK MENGISI SURVEI
BAPAS KELAS II BANDAR LAMPUNG	SEP	BELUM SEMUA PENGGUNA LAYANAN MEMILIKI SARANA DAN BERSEDIA MENGISI SURVEI
BAPAS KELAS II BANDAR LAMPUNG	OKT	MASIH KURANGNYA RESPONDEN UNTUK MENGISI SURVEY
BAPAS KELAS II KOTABUMI	JAN	JUMLAH PEGAWAI YANG TERBATAS DENGAN BANYAKNYA TUGAS DAN FUNGSI DI SISI LAIN MAKA SURVEI PADA BULAN JANUARI BELUM DAPAT DILAKSANAKAN
BAPAS KELAS II KOTABUMI	MEI	KURANGNYA SDM PADA UPT YANG MENANGANI MASALAH SURVEI
BAPAS KELAS II METRO	JAN	RESPONDEN SURVEY BANYAK YANG TIDAK MEMILIKI HANDPHONE ANDROID
BAPAS KELAS II METRO	APR	KESULITAN DALAM MELAKUKAN SURVEY IPK/IKM TERHADAP MASYARAKAT DIKARENAKAN MASYARAKAT YANG MASIH BELUM PAHAM PENGGUNAAN APLIKASI
BAPAS KELAS II METRO	MEI	IPK BELUM DAPAT DIPENUHI DIKARENAKAN TIDAK BANYAK PENERIMA LAYANAN YG MAMPU UNTUK MENGISI SURVEY DIKARENAKAN PERANGKAT ELEKTRONIKNYA TIDAK MEMADAI
BAPAS KELAS II PRINGSEWU	JAN	TERKADANG SUSAH DI AKSES OLEH KLIEN PAS

BAPAS KELAS II PRINGSEWU	FEB	SEBAGIAN KONSUMEN/KLIEN BAPAS TIDAK MEMILIKI HP ANDROID UNTUK AKSES SURVEI
BAPAS KELAS II PRINGSEWU	MAR	SEBAGIAN KONSUMEN/KLIEN PAS TIDAK MEMILIKI HP ANDROID UNTUK AKSES SURVEI
KANIM KELAS I BANDAR LAMPUNG	APR	PENGISIAN SURVEI SUDAH CUKUP MUDAH DAN DILENGKAPI PETUNJUK YANG JELAS
KANIM KELAS I BANDAR LAMPUNG	MEI	TIDAK ADANYA PENJELASAN DI MANA LETAK Mencari Indeks Pengamanan Keimigrasian dan Layanan Produk Hukum di Survei Tapi Masuk Rekap
KANIM KELAS I BANDAR LAMPUNG	JUN	PENGISIAN SURVEI MASIH LEBIH BANYAK TERUTAMA DARI PELAYANAN PASPOR
KANIM KELAS I BANDAR LAMPUNG	JUL	KARENA PPKM MAKA SULIT UNTUK MENCAPAI TARGET MINIMAL 30 RESPONDEN
KANIM KELAS I BANDAR LAMPUNG	AGU	UNTUK MEMENUHI SURVEI INTERNAL SESUAI DENGAN JUMLAH PEGAWAI YANG ADA. KADANG ADA PEGAWAI YG SUDAH MENGISI SURVEI TAPI TIDAK MENAMBAH JUMLAH RESPONDEN DALAM SURVEI
KANIM KELAS I BANDAR LAMPUNG	SEP	SULIT MENGISI REKAPAN DI GOOGLE FORM
KANIM KELAS I BANDAR LAMPUNG	OKT	TIDAK ADA KENDALA BERARTI
KANIM KELAS I BANDAR LAMPUNG	NOV	UNTUK PENGISIAN SURVEI INTERNAL PALING CEPAT TERPENUHI DI TAHUN 2021 BULAN NOVEMBER INI. TIDAK ADA KENDALA BERARTI
KANIM KELAS I BANDAR LAMPUNG	DES	TIDAK ADA KENDALA YANG BERARTI
KANIM KELAS III KALIANDA	JAN	TIDAK ADA KENDALA BERARTI YANG DIHADAPI, HANYA SESEKALI SAJA LINK SURVEY TIDAK DAPAT DIAKSES
KANIM KELAS III KALIANDA	MAR	TIDAK ADA KENDALA, HANYA SESEKALI SAJA (PAGI HARI) LINK SURVEY RIDAK BISA DIAKSES
KANIM KELAS III KALIANDA	MEI	PENGISIAN KODE CHAPTCHA ATAU KODE VERIFIKASI PADA PENGISIAN SURVEI IKM HARUS DILAKUKAN 2 KALI
KANIM KELAS III KALIANDA	JUN	PENGISIAN KODE CHATCHA / KODE VERIFIKASI YANG HARUS DIULANG 2 KALI SERTA SENSITIFITAS KUESIONER YANG AMAT TINGGI SEHINGGA MEMUNGKINKAN JAWABAN BINTANG TIDAK SESUAI DENGAN YANG SEHARUSNYA
KANIM KELAS III KALIANDA	JUL	SENSITIFITAS TOUCHSCREEN HALAMAN PERTANYAAN SURVEY MASIH TERLALU TINGGI DAN PENGISIAN KODE CHAFTA/KODE VERIFIKASI HARUS 2 KALI
KANIM KELAS III KALIANDA	AGU	TOUCHSCREEN ISIAN SURVEY PADA SMARTPHONE MASIH SANGAT SENSITIF DAN PENGISIAN KODE VERIFIKASI PENGISIAN SURVEI IKM SELALU HARUS 2 KALI PENGISIAN
KANIM KELAS III KALIANDA	SEP	LAYAR TOUCHSCREEN SURVEI TERLALU SENSITIF SEHINGGA TERKADANG JAWABAN BERUBAH KARENA

		KETIDAKSENGAJAAN SELAIN ITU PENGISIAN KODE VERIFIKASI SURVEI IKM HARUS DILAKUKAN 2 KALI
KANIM KELAS III KALIANDA	OKT	PENGISIAN KODE VERIFIKASI PADA SAAT MENGISIAN SURVEI LAYANAN OLEH PEMOHON HARUS DILAKUKAN SEBANYAK 2 KALI
KANIM KELAS III KALIANDA	NOV	LAYAR SENTUH YANG MASIH SANGAT SENSITIF
KANIM KELAS III KALIANDA	DES	LAYAR SENTUH TAMPILAN SURVEI MASIH TERASA SANGAT SENSITIF DAN PENGISIAN KODE VERIFIKASI YANG HARUS 2 KALI MENGISI
KANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG	MEI	BAD POLL
LAPAS ANAK KELAS II BANDAR LAMPUNG	MAR	SISTEM BARCODE KURANG EFISIEN DIMANA ALAT SURVEI YG DIGUNAKAN SMARTPHONE ANDROID KARENA TIDAK BISA LANGSUNG SCAN BARCODE, JADI HARUS DOWNLOAD APLIKASI TAMBAHAN. HAL TERSEBUT YANG MEMBUAT RESPONDEN MALAS UNTUK MENGISI SURVEI
LAPAS ANAK KELAS II BANDAR LAMPUNG	FEB	PENGGUNAAN SISTEM BARCODE MENURUT KAMI KURANG EFISIEN DAN EFEKTIF KARENA SEBAGIAN BESAR HANDPHONE PEGAWAI DAN PENGUNJUNG MENGGUNAKAN ANDROID DIMANA ADA BEBERAPA HANDPHONE YANG TIDAK DAPAT SCAN BARCODE, DAN HARUS DOWNLOAD APLIKASI TAMBAHAN UNTUK DAPA SCAN BARCODE. OLEH KARENA ITU BANYAK RESPONDEN YANG MALAS UNTUK MENGISI SURVEI
LAPAS ANAK KELAS II BANDAR LAMPUNG	JAN	PENGGUNAAN SISTEM BARCODE MENURUT KAMI KURANG EFISIEN DAN EFEKTIF KARENA SEBAGIAN BESAR HANDPHONE PEGAWAI DAN PENGUNJUNG MENGGUNAKAN ANDROID DIMANA ADA BEBERAPA HANDPHONE YANG TIDAK DAPAT SCAN BARCODE, DAN HARUS DOWNLOAD APLIKASI TAMBAHAN UNTUK DAPA SCAN BARCODE. OLEH KARENA ITU BANYAK RESPONDEN YANG MALAS UNTUK MENGISI SURVEI
LAPAS ANAK KELAS II BANDAR LAMPUNG	JUN	KURANG TERSEDIA SMARTPHONE UNTUK PENGISIAN KUESIONER BAGI PENGUNJUNG
LAPAS ANAK KELAS II BANDAR LAMPUNG	AGU	HASIL SURVEI DI APLIKASI 3AS KOSONG
LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG	MAR	MASIH KURANG PRASARANA YANG TERDAPAT DI KANTOR KAMI, SEPERTI KURANG NYA KOMPUTER BAGI PENGGUNA PELAYANAN YANG TIDAK MEMILIKI HP UNTUK MENGISI SURVEI.
LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG	APR	BANYAK ORANG YANG SAMA YANG MELAKUKAN PENITIPAN MAKANAN ,
LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG	JUN	BELUM MENEMUKAN KENDALA
LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG	SEP	YANG DATANG BERKUNJUNG UNTUK PENITIPAN MAKANAN SATU ORANG DALAM SATU BULAN LEBIH DARI SATU KALI
LAPAS KELAS II A KALIANDA	MEI	UNTUK SURVEI INTEGRITAS TERDAPAT 2 ORANG PEGAWAI YANG SAKIT KERAS DAN SEDANG MENJALANI WFH, 01

		ORANG BARU PULIH DARI SAKITNYA. SEDANGKAN UNTUK SURVEI IKM/IPK MASIH BANYAK PENGUNJUNG YANG TIDAK MEMBAWA HP ANDROID SAAT MELAKUKAN PENITIPAN BARANG, SEHINGGA MENJADI KENDALA DALAM PROSES PENGISIAN SURVEI TERSEBUT
LAPAS KELAS II A KALIANDA	NOV	CUKUP
LAPAS KELAS II A KALIANDA	DES	TERDAPAT BEBERAPA PEGAWAI YANG SEDANG WFH DAN SAKIT RAWAT INAP
LAPAS KELAS II B GUNUNG SUGIH	JUN	KENDALA YANG KAMI TEMUKAN DALAM PENGISIAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT ADALAH TIDAK SEMUA PENGUNJUNG/PENERIMA LAYANAN MEMPUNYAI SMARTPHONE, DAN JUGA SERING TERJADI KENDALA DALAM JARINGAN PROVAIDER YANG DIGUNAKAN OLEH PENGUNJUNG YANG MENGAKIBATKAN DALAM PENGISIAN SURVEI MENJADI TERGANGGU.
LAPAS KELAS II B GUNUNG SUGIH	NOV	MASIH ADA BEBERAPA KONSUMEN DIDAERAH YANG KETERBATASAN SARANA TEKNOLOGI INFORMASI
LAPAS KELAS II B GUNUNG SUGIH	OKT	BEBERAPA RESPONDEN MASYARAKAT TIDAK MEMILIKI ALAT KOMUNIKASI YANG MENDUKUNG
LAPAS KELAS II B GUNUNG SUGIH	DES	BEBERAPA RESPONDEN MASYARAKAT TIDAK MEMILIKI ALAT KOMUNIKASI YANG MENDUKUNG
LAPAS KELAS II B KOTA AGUNG	JAN	BELUM TAU UNTUK PERINTAH SURVEI DI BULAN JANUARI
LAPAS KELAS II B KOTA AGUNG	FEB	MASIH ADA PEGAWAI YANG TIDAK MAU SURVEI
LAPAS KELAS II B KOTA AGUNG	MAR	MASIH ADA PEGAWAI YANG TIDAK MENGISI SURVEI
LAPAS KELAS II B KOTA AGUNG	MAR	MASIH ADA PEGAWAI YANG TIDAK MENGISI SURVEI
LAPAS KELAS II B KOTA AGUNG	APR	MASIH ADA PETUGAS YANG TIDAK MENGISI SURVEI
LAPAS KELAS II B KOTA AGUNG	MEI	DALAM PENGISIAN KODE CHAPTCHA MASIH SULIT KARENA HARUS DI ULANG
LAPAS KELAS II B KOTA AGUNG	JUN	MASIH TERKENDALA PADA PENGISIAN KODE CHAPTCHA
LAPAS KELAS II B KOTA AGUNG	AGU	KURANG PEDULINYA PEGAWAI UNTUK MELAKSANAKAN SURVEI
LAPAS KELAS II B KOTA AGUNG	OKT	SURVEI BULAN OKTOBER FOKUS PADA SURVEI TPN DAN SEMPAT ADA KENDALA MASUK KE AKUN SURVEI 3A UNTUK MEMONITORING SURVEI BULAN INI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH LAMPUNG

Jl. RW. MONGINSIDI NO. 184, BANDAR LAMPUNG

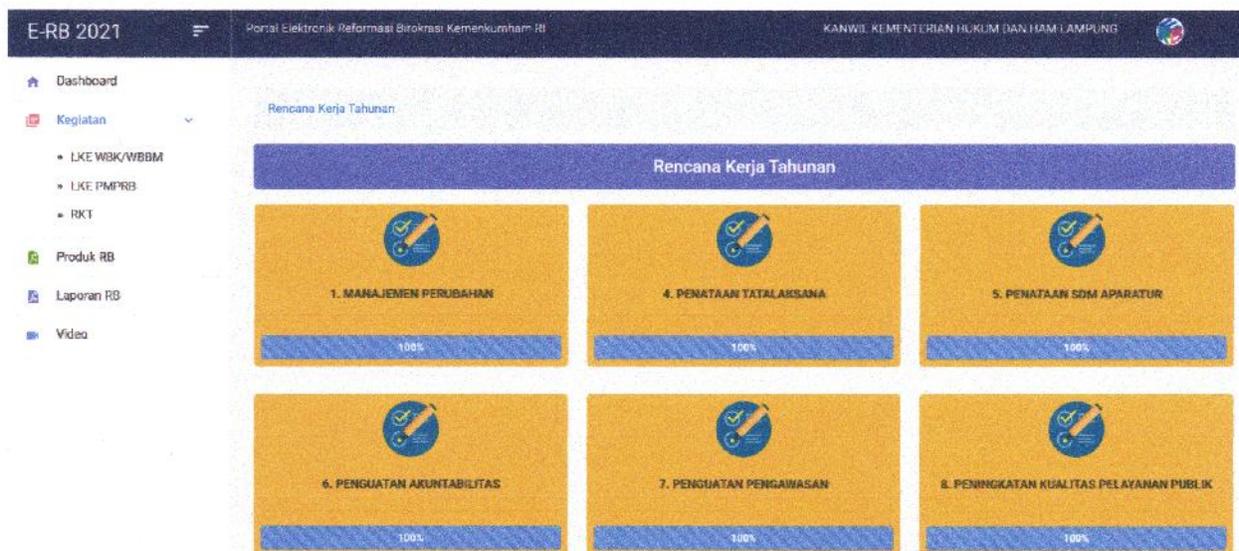
Telepon : 0721-474813 Faksimili : 0721-471060

Laman : <https://lampung.kemenkumham.go.id>

**PENILAIAN HASIL REFORMASI BIROKRASI PADA APLIKASI ERB
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG
PER TRIWULAN TAHUN 2021**

• RENCANA KERJA TAHUNAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2021

AREA PERUBAHAN	B03	B06	B09	B12	KUMULATIF
Manajemen Perubahan	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)
Penataan Tatalaksana	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)
Penataan SDM Aparatur	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)
Penguatan Akuntabilitas	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)
Penguatan Pengawasan	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)
TOTAL					100%



• DATA DUKUNG PEMBANGUNAN ZI WBK DAN WBBM TAHUN 2021

AREA PERUBAHAN	B03	B06	B09	B12	KUMULATIF
Manajemen Perubahan	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)
Penataan Tatalaksana	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)
Penataan SDM Aparatur	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)
Penguatan Akuntabilitas	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)
Penguatan Pengawasan	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)	100% (Lengkap)
TOTAL					100%



Bandar Lampung, 07 Januari 2022

Kasubag Humas, RB, dan TI



Arliisa Nowinanto

NIP. 1973101231999031001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH LAMPUNG**

Jl. RW. Monginsidi 184 Bandar Lampung
(0721) 485427, 483927, 474813 Fax. 471060

Laman : <http://lampung.kemenkumham.go.id> E-mail: kanwillampung@kemenkumham.go.id

21 Desember 2021

Nomor : W9.OT.03.01-5466
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM
Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
Periode Januari-Desember Tahun 2021

Yth.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM

cq. Kepala Biro Perencanaan

di-

Jakarta

Mengingat pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2021 telah berakhir. Berikut kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung periode Januari-Desember Tahun 2021 (*terlampir*).

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Iwan Santoso
NIP. 19700430 199103 1 001

Tembusan :
Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM



LAPORAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG

PERIODE JANUARI-DESEMBER TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayahnya, kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani dan dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung periode Januari-Desember Tahun 2021 dengan baik dan lancar. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dan kita selalu diberikan kita rizki dan ridho-Nya.

Reformasi Birokrasi meliputi 8 (delapan) Area Perubahan yang meliputi: 1) Manajemen Perubahan: mengubah sistem, pola pikir dan budaya kerja menjadi lebih baik yang sesuai dengan tujuan dan sasaran RB; 2) Penataan dan Penguatan Organisasi: meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*); 3) Penataan Peraturan Perundang-Undangan: meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan; 4) Penataan Sumber Daya Manusia: meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan; 5) Penataan Tata Laksana: meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja; 6) Penguatan Pengawasan: mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; 7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja: meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi; 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan lebih berkualitas.

Kita mengetahui bahwa Reformasi Birokrasi adalah salah satu cara untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Tujuan lainnya juga untuk mewujudkan Pemerintahan yang bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung telah menjalankan Program Reformasi Birokrasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung periode Januari-Desember Tahun 2021 memuat pencapaian agenda reformasi pelayanan publik yang meliputi 8 (delapan) Area Perubahan dengan memfokuskan pada kegiatan, seperti: Penguatan di bidang manajemen perubahan, Tata laksana, Penataan organisasi, Penataan peraturan perundang-undangan, Penataan sumber daya manusia, Pengawasan, Akuntabilitas kinerja dan Peningkatan kualitas pelayanan publik yang telah berjalan selama periode bulan Januari sampai Maret..

Sebagai penutup, semoga Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung ini bermanfaat dan menjadi bahan penyusunan program reformasi birokrasi di tahun mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam mewujudkan Pemerintahan yang bertaraf internasional dan kita selalu diberikan kita rizki dan ridho-Nya dalam menjalankan tugas.

Dibuat di Bandar Lampung
pada tanggal 21 Desember 2021

Plt.Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Iwan Santoso
NIP. 19700430 199103 1 001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH LAMPUNG**

Jl. R.W. Monginsidi No.184 Bandar Lampung

Telp. (0721) 485427, 483927, 474813 Fax 471060

**LAPORAN
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG
JANUARI-DESEMBER TAHUN 2021
Nomor : W9.OT.03.01-5466**

**BAB I
Pendahuluan**

A. Latar Belakang

Pada era kepemimpinan pemerintahan yang baru istilah *Good Governance* atau yang biasa dikenal dengan Tata Pengelolaan Pemerintahan yang baik dalam suatu negara merupakan *issue* yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Dalam hal ini Pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip *good governance*. Salah satu perwujudan *Good Governance*, pemerintah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Hal ini disebabkan karena akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip-prinsip *Good Governance*. *United Nations Development Program* (UNDP) mengajukan sembilan karakteristik *good governance* yang salah satunya adalah *accountability* (akuntabilitas). Ditambah lagi prinsip akuntabilitas juga merupakan salah satu dari tujuh asas penerapan *good governance* dalam acuan umum penerapan *good governance* pada sector publik oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, maka dari itu instansi dituntut untuk melakukan perubahan berupa reformasi birokrasi di seluruh lingkungan instansi pemerintahan.

Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-23.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2024. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan penyampaian capaian kegiatan reformasi birokrasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung periode Januari-Desember Tahun 2021.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penyusunan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung periode Januari-Desember Tahun 2021 ini adalah sebagai bahan untuk memberikan gambaran secara komprehensif pelaksanaan reformasi birokrasi baik berupa capaian target yang tercapai maupun permasalahan yang dihadapi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung selama periode Tahun 2021. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi program-program reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, dan belum dilaksanakan sehingga dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan program reformasi birokrasi di tahun berikutnya.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung periode Januari-Desember Tahun 2021 berdasarkan kegiatan Reformasi Birokrasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung pada periode Januari-Desember Tahun 2021.

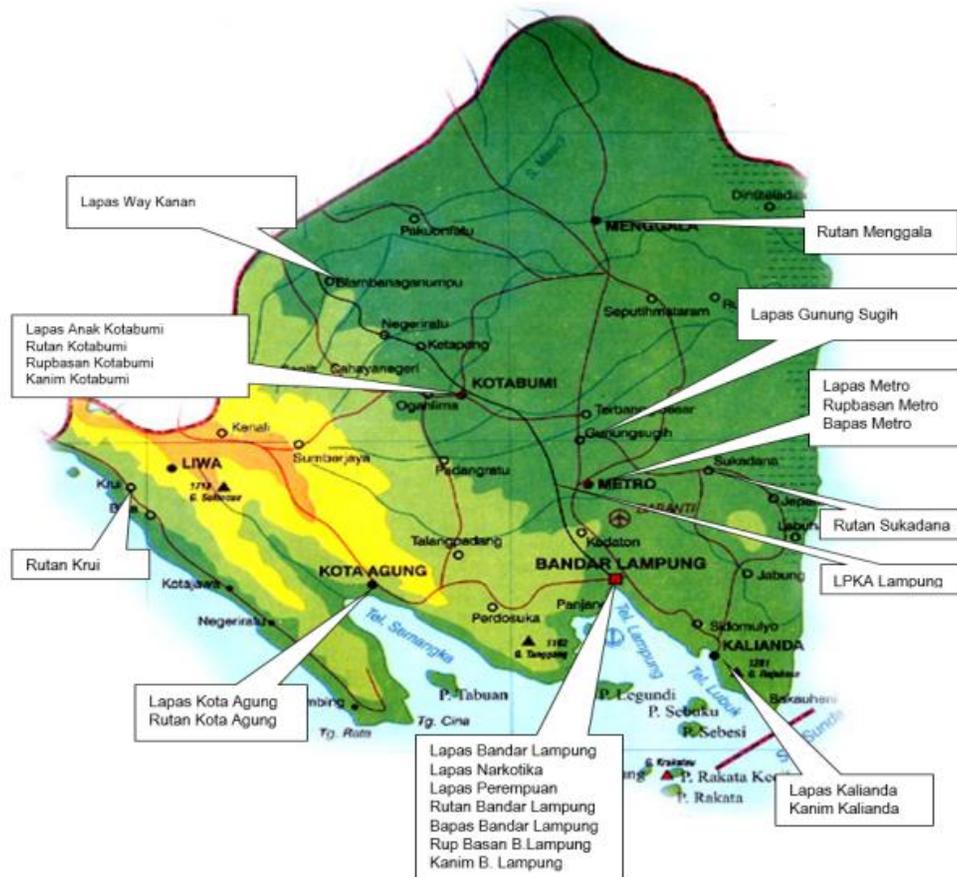
BAB II
Gambaran Umum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

A. Sejarah dan Organisasi

Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3/1964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan Karesidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kendatipun Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 maret 1964 tersebut secara administratif masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, namun daerah ini jauh sebelum Indonesia merdeka memang telah menunjukkan potensi yang sangat besar serta corak warna kebudayaan tersendiri yang dapat menambah khasanah adat budaya di Nusantara yang tercinta ini.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung dahulu bernama Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Lampung, berdiri pada tahun 1982 berdasarkan KEPMENKEH RI Nomor M-868.KP.04.10 Tanggal 07 April 1982. Pada saat itu Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Bengkulu masih bergabung dengan Propinsi Lampung, namun pada Tahun 1985 Propinsi Bengkulu tidak bergabung lagi dengan Propinsi Lampung. Kementerian Hukum dan HAM beberapa kali mengalami pergantian nama yakni;

1. Departemen Kehakiman (1945 – 1999)
2. Departemen Hukum dan Perundang-Undangan (1999 – 2001)
3. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001 – 2004)
4. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004 – 2009)
5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2009 – sekarang)

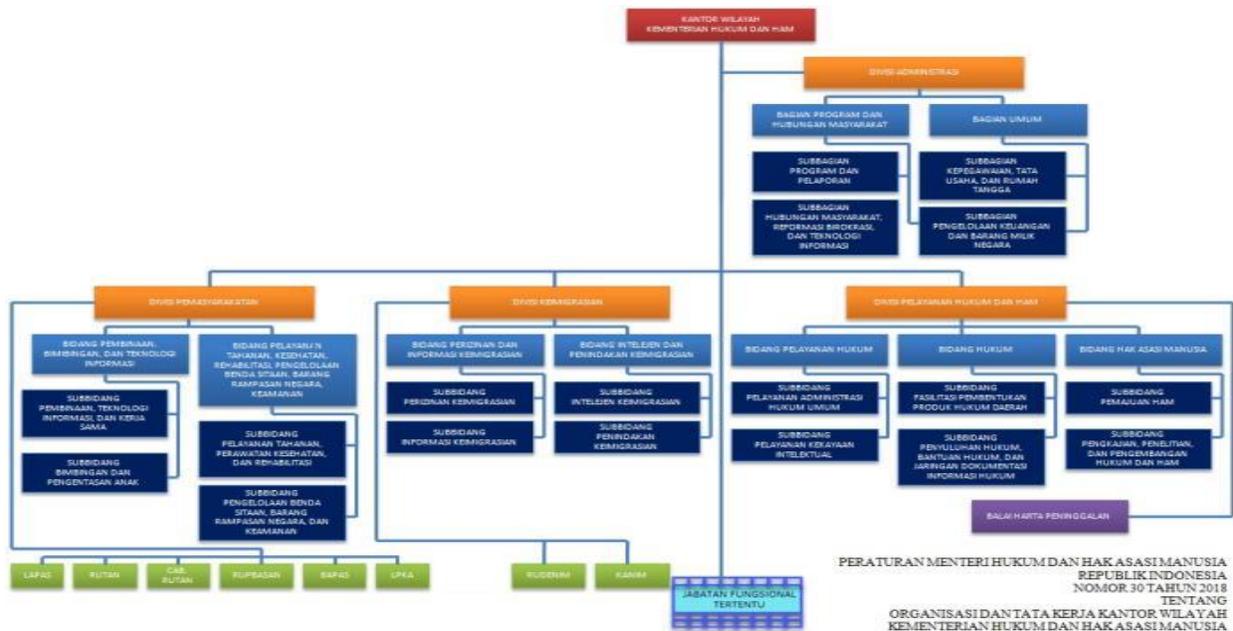


Provinsi Lampung dengan luas wilayah $\pm 3.528.835$ Ha dan jumlah penduduk $\pm 7.320.560$ jiwa yang terdiri dari 15 Kabupaten/Kota, dengan 13 kabupaten dan 2 kota sebagai berikut:

1. Kota Bandar Lampung
2. Kota Metro
3. Kabupaten Lampung Tengah
4. Kabupaten Lampung Selatan
5. Kabupaten Lampung Utara
6. Kabupaten Lampung Timur
7. Kabupaten Lampung Barat
8. Kabupaten Tanggamus
9. Kabupaten Tulang Bawang
10. Kabupaten Way Kanan
11. Kabupaten Pringsewu.
12. Kabupaten Pesawaran.
13. Kabupaten Mesuji.
14. Kabupaten Tulang Bawang Barat.
15. Kabupaten Pesisir Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terdiri atas:

1. Divisi Administrasi;
2. Divisi Pemasyarakatan;
3. Divisi Keimigrasian; dan
4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.



B. Satuan Kerja

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung memiliki 26 Satuan Kerja yaitu :

1. Lapas Kelas I Bandar Lampung
2. Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung
3. Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung
4. Lapas Kelas IIA Metro
5. Lapas Kelas IIA Kalianda
6. Lapas Kelas IIA Kotabumi
7. Lapas Kelas IIB Kota Agung
8. Lapas Kelas IIB Waykanan
9. Lapas Kelas III Gunung Sugih
10. LPKA Kelas II Bandar Lampung
11. Rutan Kelas I Bandar Lampung
12. Rutan Kelas IIB Manggala
13. Rutan Kelas IIB Krui
14. Rutan Kelas IIB Sukadana
15. Rutan Kelas IIB Kotabumi

16. Rutan Kelas IIB Kota Agung
17. Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung
18. Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro
19. Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi
20. Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu
21. Rupbasan Kelas II Metro
22. Rupbasan Kelas I Bandar Lampung
23. Rupbasan Kelas II Kotabumi
24. Kanim Kelas I Bandar Lampung
25. Kanim Kelas III Kalianda
26. Kanim Kelas III Kotabumi

C. Maskot dan Logo

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung membuat inovasi dengan menciptakan maskot dan logo dengan penjelasan sebagai berikut :

MASKOT	LOGO
<div data-bbox="422 1116 670 1589" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="284 1664 457 1699">“GAPUNG”</p> <p data-bbox="284 1721 828 1976">Terinspirasi dari Gajah Lampung yang merupakan hewan asli dari Lampung dengan dibalut seragam Kemenkumham serta pakaian adat dari Lampung</p>	<div data-bbox="878 1074 1403 1639" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="850 1664 1279 1699">“LAMPUNG SAI Pasti Kece”</p> <p data-bbox="850 1721 1437 2088">Mengambil kata Sai dari semboyan lampung yaitu “Sai Bumi Ruwa Jurai” yang berarti SATU, sehingga diharapkan Kanwil Lampung bersatu padu dalam meraih WBK dengan Kerja Keras, Kerja Cerdas, dan Kerja Cermat</p>

BAB III

Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM periode Januari-Desember Tahun 2021

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung periode Januari-Desember Tahun 2021.

A. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Kantor Wilayah Lampung Tahun 2021

Pelaksanaan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Kantor Wilayah Lampung dilakukan pada tanggal 10 Februari 2021.



B. Proses Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM

- Pembentukan SK Tim Pokja Kantor Wilayah Lampung
Pembentukan Tim Pokja Pembangunan ZI Kantor Wilayah Lampung dilakukan dengan rapat pendahuluan penetapan kriteria Tim ZI dengan melaksanakan proses Assesment yang dilakukan oleh Pimpinan Tinggi Pratama dengan hasil penerbitan SK Tim Pokja Pembangunan ZI Kantor Wilayah Lampung Nomor **W9-222.OT.03.01 Tahun 2021** pada tanggal 15 Januari 2021.

- Pengusulan Satuan Kerja Menuju WBK dan WBBM Kepada Unit Eselon I Kantor Wilayah mengusulkan 26 Satuan Kerja menuju WBK dan 1 Satuan Kerja menuju WBBM melalui surat **W9.OT.03.01-1535** pada tanggal **30 Maret 2021** dengan rincian sebagai berikut :

NO	SATUAN KERJA	USULAN
1.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung	Diusulkan WBK
2.	Lapas Kelas I Bandar Lampung	Diusulkan WBK
3.	Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung	Diusulkan WBK
1.	Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung	Diusulkan WBK
2.	Lapas Kelas IIA Metro	Diusulkan WBBM
3.	Lapas Kelas IIA Kalianda	Diusulkan WBK
4.	Lapas Kelas IIA Kotabumi	Diusulkan WBK
5.	Lapas Kelas IIB Kota Agung	Diusulkan WBK
6.	Lapas Kelas IIB Waykanan	Diusulkan WBK
7.	Lapas Kelas III Gunung Sugih	Diusulkan WBK
11.	LPKA Kelas II Bandar Lampung	Diusulkan WBK
12.	Rutan Kelas I Bandar Lampung	Diusulkan WBK
13.	Rutan Kelas IIB Manggala	Diusulkan WBK
14.	Rutan Kelas IIB Krui	Diusulkan WBK
15.	Rutan Kelas IIB Sukadana	Diusulkan WBK
16.	Rutan Kelas IIB Kotabumi	Diusulkan WBK
17.	Rutan Kelas IIB Kota Agung	Diusulkan WBK
18.	Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung	Diusulkan WBK
19.	Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro	Diusulkan WBK
20.	Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi	Diusulkan WBK
21.	Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu	Diusulkan WBK
22.	Rupbasan Kelas II Metro	Diusulkan WBK
23.	Rupbasan Kelas I Bandar Lampung	Diusulkan WBK
24.	Rupbasan Kelas II Kotabumi	Diusulkan WBK
25.	Kanim Kelas I Bandar Lampung	Diusulkan WBK
26.	Kanim Kelas III Kalianda	Diusulkan WBK
27.	Kanim Kelas III Kotabumi	Diusulkan WBK

- Penilaian Desk Evaluasi oleh Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM

Pelaksanaan Desk Evaluasi TPI dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung pada tanggal **20-27 April 2021**.



**Hasil Penilaian TPI Pada Satker
di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung**

NO	NAMA SATUAN KERJA	NILAI	KETERANGAN
1	LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG	83,94	LULUS MENUJU PANEL TPI
2	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA BANDAR LAMPUNG	84,85	LULUS MENUJU PANEL TPI
3	LAPAS KELAS IIA KALIANDA	88,97	LULUS MENUJU PANEL TPI
4	LAPAS KELAS IIA KOTABUMI	88,42	LULUS MENUJU PANEL TPI
5	LAPAS KELAS IIB KOTA AGUNG	81,17	LULUS MENUJU PANEL TPI
6	LAPAS KELAS IIB GUNUNG SUGIH	82,27	LULUS MENUJU PANEL TPI
7	RUTAN KELAS IIB MANGGALA	76,79	LULUS MENUJU PANEL TPI
8	RUTAN KELAS IIB KOTABUMI	80,57	LULUS MENUJU PANEL TPI
9	RUTAN KELAS IIB KOTA AGUNG	81,88	LULUS MENUJU PANEL TPI
10	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II METRO	79,35	LULUS MENUJU PANEL TPI
11	IMIGRASI KALIANDA	81,33	LULUS MENUJU PANEL TPI
12	IMIGRASI KOTABUMI	88,64	LULUS MENUJU PANEL TPI
13	IMIGRASI BANDAR LAMPUNG	83,26	LULUS MENUJU PANEL TPI
14	KANTOR WILAYAH LAMPUNG	79,39	LULUS MENUJU PANEL TPI
15	LAPAS KHUSUS NARKOTIKA KELAS IIA BANDAR LAMPUNG	0	TIDAK LULUS
16	LAPAS KELAS IIA METRO	80,97	TIDAK LULUS
17	LAPAS KELAS IIB WAY KANAN	73,83	TIDAK LULUS
18	LPKA KELAS II BANDAR LAMPUNG	73,93	TIDAK LULUS
19	RUTAN KELAS I BANDAR LAMPUNG	77,76	TIDAK LULUS
20	RUTAN KELAS IIB KRUI	77,48	TIDAK LULUS
21	RUTAN KELAS IIB SUKADANA	75,95	TIDAK LULUS
22	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDAR LAMPUNG	75,47	TIDAK LULUS
23	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PRINGSEWU	77,38	TIDAK LULUS
24	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KOTABUMI	78,84	TIDAK LULUS
25	RUPBASAN KELAS II METRO	74,25	TIDAK LULUS
26	RUPBASAN KELAS I BANDAR LAMPUNG	75,96	TIDAK LULUS
27	RUPBASAN KELAS II KOTABUMI	72,39	TIDAK LULUS

- Hasil Pendampingan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dengan didampingi para verifikator, yaitu sebagai berikut:

NO	SATUAN KERJA	HASIL PENDAMPINGAN
4.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Penilaian TPI dinyatakan lulus TPN. 2. Terkait prasarana sudah mencukupi. 3. Data Dukung pada aplikasi ERB sudah lengkap.
5.	Lapas Kelas I Bandar Lampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Penilaian TPI dinyatakan lulus TPN. 2. Terkait prasarana sudah mencukupi. 3. Data Dukung pada aplikasi ERB sudah lengkap.
6.	Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung	<ol style="list-style-type: none"> 8. Tidak lulus penilaian TPI untuk ke TPN. 9. Sarana Prasana sudah memenuhi.
10.	Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Penilaian TPI dinyatakan lulus TPN. 2. Terkait prasarana sudah mencukupi. 3. Data Dukung pada aplikasi ERB sudah lengkap.
11.	Lapas Kelas IIA Metro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak lulus penilaian TPI untuk ke TPN. 2. Sarana Prasana sudah memenuhi. 3. Nilai IPK IKM telah di atas standar.
12.	Lapas Kelas IIA Kalianda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Penilaian TPI dinyatakan lulus TPN. 2. Terkait prasarana sudah mencukupi. 3. Data Dukung pada aplikasi ERB sudah lengkap. 4. Nilai IPK IKM telah di atas standar.
13.	Lapas Kelas IIA Kotabumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Penilaian TPI dinyatakan lulus TPN. 2. Terkait prasarana sudah mencukupi. 3. Data Dukung pada aplikasi ERB sudah lengkap. 4. Nilai IPK IKM telah di atas standar.
14.	Lapas Kelas IIB Kota Agung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Penilaian TPI dinyatakan lulus TPN. 2. Terkait prasarana sudah mencukupi. 3. Data Dukung pada aplikasi ERB sudah lengkap. 4. Nilai IPK IKM telah di atas standar.
15.	Lapas Kelas IIB Waykanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak lulus penilaian TPI untuk ke TPN. 2. Sarana Prasana sudah memenuhi. 3. Penilaian IPK IKM dibawah standar
16.	Lapas Kelas III Gunung Sugih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Penilaian TPI dinyatakan lulus TPN. 2. Terkait prasarana sudah mencukupi. 3. Data Dukung pada aplikasi ERB sudah lengkap. 4. Survey IPK IKM belum dilaksanakan.
28.	LPKA Kelas II Bandar Lampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak lulus penilaian TPI untuk ke TPN. 2. Sarana Prasana sudah memenuhi. 3. Penilaian IPK IKM belum dilaksanakan
29.	Rutan Kelas I Bandar Lampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak lulus penilaian TPI untuk ke TPN. 2. Sarana Prasana sudah memenuhi. 3. Penilaian IPK IKM belum dilaksanakan
30.	Rutan Kelas IIB Manggala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak lulus penilaian TPI untuk ke TPN. 2. Sarana Prasana sudah memenuhi. 3. Penilaian IPK IKM dibawah standar.
31.	Rutan Kelas IIB Krui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak lulus penilaian TPI untuk ke TPN. 2. Sarana Prasana sudah memenuhi. 3. Penilaian IPK IKM dibawah standar.

32.	Rutan Kelas IIB Sukadana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak lulus penilaian TPI untuk ke TPN. 2. Sarana Prasana sudah memenuhi. 3. Penilaian IPK IKM belum dilaksanakan
33.	Rutan Kelas IIB Kotabumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak lulus penilaian TPI untuk ke TPN. 2. Sarana Prasana sudah memenuhi. 3. Penilaian IPK IKM sudah di atas standart
34.	Rutan Kelas IIB Kota Agung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak lulus penilaian TPI untuk ke TPN. 2. Sarana Prasana sudah memenuhi. 3. Penilaian IPK IKM sudah di atas standart
35.	Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak lulus penilaian TPI untuk ke TPN. 2. Sarana Prasana sudah memenuhi. 3. Penilaian IPK IKM sudah di atas standart
36.	Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Penilaian TPI dinyatakan lulus TPN. 2. Terkait prasarana sudah mencukupi. 3. Data Dukung pada aplikasi ERB sudah lengkap. 4. Nilai IPK IKM telah di atas standar.
37.	Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak lulus penilaian TPI untuk ke TPN. 2. Sarana Prasana sudah memenuhi. 3. Penilaian IPK IKM belum dilaksanakan
38.	Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak lulus penilaian TPI untuk ke TPN. 2. Sarana Prasana sudah memenuhi. 3. Penilaian IPK IKM dibawah standar.
39.	Rupbasan Kelas II Metro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak lulus penilaian TPI untuk ke TPN. 2. Sarana Prasana sudah memenuhi. 3. Penilaian IPK IKM dibawah standar.
40.	Rupbasan Kelas I Bandar Lampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak lulus penilaian TPI untuk ke TPN. 2. Sarana Prasana sudah memenuhi. 3. Penilaian IPK IKM dibawah standar.
41.	Rupbasan Kelas II Kotabumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak lulus penilaian TPI untuk ke TPN. 2. Sarana Prasana sudah memenuhi. 3. Penilaian IPK IKM belum dilaksanakan
42.	Kanim Kelas I Bandar Lampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Penilaian TPI dinyatakan lulus TPN. 2. Terkait prasarana sudah mencukupi. 3. Data Dukung pada aplikasi ERB sudah lengkap. 4. Nilai IPK IKM telah di atas standar.
43.	Kanim Kelas III Kalianda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Penilaian TPI dinyatakan lulus TPN. 2. Terkait prasarana sudah mencukupi. 3. Data Dukung pada aplikasi ERB sudah lengkap. 4. Nilai IPK IKM telah di atas standar.
44.	Kanim Kelas III Kotabumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Penilaian TPI dinyatakan lulus TPN. 2. Terkait prasarana sudah mencukupi. 3. Data Dukung pada aplikasi ERB sudah lengkap. 4. Nilai IPK IKM telah di atas standar.

- Hasil Panel Penilaian TPI sebelum di usulkan ke TPN
Panel Penilaian TPI berdasarkan Surat Inspektorat Jenderal Nomor ITJ.PW.03.01VI-32 Tanggal 05 Agustus 2021 tentang Satuan Kerja yang diusulkan ke TPN.

NO	NAMA SATUAN KERJA	KETERANGAN
1	KANTOR WILAYAH LAMPUNG	DAPAT DIUSULKAN WBK KE TPN
2	LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG	DAPAT DIUSULKAN WBK KE TPN
3	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA BANDAR LAMPUNG	DAPAT DIUSULKAN WBK KE TPN
4	LAPAS KELAS IIA KALIANDA	DAPAT DIUSULKAN WBK KE TPN
5	LAPAS KELAS IIA KOTABUMI	DAPAT DIUSULKAN WBK KE TPN
6	LAPAS KELAS IIB KOTA AGUNG	DAPAT DIUSULKAN WBK KE TPN
7	LAPAS KELAS IIB GUNUNG SUGIH	DAPAT DIUSULKAN WBK KE TPN
8	RUTAN KELAS IIB MANGGALA	BELUM DAPAT DIUSULKAN WBK KE TPN PADA SAAT PANEL TPI KARENA TIDAK MEMENUHI NILAI MINIMAL KOMPONEN PENGUNGKIT
9	RUTAN KELAS IIB KOTABUMI	BELUM DAPAT DIUSULKAN WBK KE TPN PADA SAAT PANEL TPI KARENA TIDAK MEMENUHI NILAI MINIMAL KOMPONEN PENGUNGKIT
10	RUTAN KELAS IIB KOTA AGUNG	BELUM DAPAT DIUSULKAN WBK KE TPN PADA SAAT PANEL TPI KARENA TIDAK MEMENUHI NILAI MINIMAL KOMPONEN PENGUNGKIT
11	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II METRO	DAPAT DIUSULKAN WBK KE TPN
12	IMIGRASI KALIANDA	DAPAT DIUSULKAN WBK KE TPN
13	IMIGRASI KOTABUMI	DAPAT DIUSULKAN WBK KE TPN
14	IMIGRASI BANDAR LAMPUNG	DAPAT DIUSULKAN WBK KE TPN

- Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung telah melakukan penguatan Reformasi Birokrasi dengan melakukan kunjungan ke Satuan Kerja sebagai berikut:

Surat Perintah	Tempat	Waktu
W.9.HH.01.02-1186	- Lapas Kelas IIA Kalianda - Lapas Kelas IIA Metro	22 Februari 2021
W.9.HH.01.02-1226	Lapas Kelas I Bandar Lampung	24 Februari 2021
W.9.HH.01.02-1269	Rutan Kelas IIB Menggala	10 Maret 2021
W.9.HH.01.02-1622	- Bapas Kelas II Pringsewu - Lapas Kelas IIB Kotaagung - Rutan Kelas IIB Kotaagung	06 April 2021
W.9.HH.01.02-1660	Lapas Kelas I Bandar Lampung	07 April 2021
W.9.HH.01.02-1742	- Kanim Kelas III Kalianda - Lapas Kelas IIA Kalianda	09 April 2021
W.9.HH.01.02-1762	- Bapas Kelas II Bandar Lampung - Kanim Kelas I Bandar Lampung - LP Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung	12 April 2021

	- LPP Kelas IIA Bandar Lampung - Rutan Kelas I Bandar Lampung - Rupbasan Kelas I Bandar Lampung	
W.9.HH.01.02-1966	- Kanim Kelas III Kotabumi - Lapas Kelas IIB Kotabumi - Rutan Kelas IIB Kotabumi	24 April 2021
W.9.HH.01.02-1983	- Lapas Kelas IIA Kalianda - LPP Kelas IIA Bandar Lampung	27 April 2021

- Verifikasi Lapangan TPN ke Satuan Kerja

Dalam pelaksanaan verifikasi lapangan, terdapat beberapa Satuan Kerja yang dijadikan sampel, antara lain :

SATUAN KERJA	METODE
KANIM KELAS I BANDAR LAMPUNG	VERIFIKASI LAPANGAN
LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG	VERIFIKASI LAPANGAN
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA BANDAR LAMPUNG	VERIFIKASI LAPANGAN
LAPAS KELAS IIA KALIANDA	VERIFIKASI LAPANGAN
LAPAS KELAS IIA KOTABUMI	VERIFIKASI LAPANGAN
LAPAS KELAS IIB GUNUNG SUGIH	PAPARAN MEMALALUI ZOOM





- Penilaian Desk Evaluasi Tim Penilai Nasional (TPN)

Berikut adalah Jajaran Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2021 :

NO	NAMA SATUAN KERJA	KETERANGAN
1	KANTOR WILAYAH LAMPUNG	GAGAL MERAH PREDIKAT WBK
2	LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG	GAGAL MERAH PREDIKAT WBK
3	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA BANDAR LAMPUNG	GAGAL MERAH PREDIKAT WBK
4	LAPAS KELAS IIA KALIANDA	MERAH PREDIKAT WBK
5	LAPAS KELAS IIA KOTABUMI	MERAH PREDIKAT WBK
6	LAPAS KELAS IIB KOTA AGUNG	GAGAL MERAH PREDIKAT WBK
7	LAPAS KELAS IIB GUNUNG SUGIH	GAGAL MERAH PREDIKAT WBK
11	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II METRO	GAGAL MERAH PREDIKAT WBK
12	IMIGRASI KALIANDA	GAGAL MERAH PREDIKAT WBK
13	IMIGRASI KOTABUMI	GAGAL MERAH PREDIKAT WBK
14	IMIGRASI BANDAR LAMPUNG	GAGAL MERAH PREDIKAT WBK

- Penilaian Desk Evaluasi Tim Penilai Nasional (TPN)
Satuan Kerja mengikuti kegiatan Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021 oleh Kemenpan-RB melalui zoom.





C. Kendala dan Hambatan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung belum mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2021 oleh Kementerian PANRB, dengan beberapa kendala dan hambatan berdasarkan evaluasi yang dilakukan meliputi :

1. Evaluasi terhadap kendala pada Sarana dan Prasarana:
 - a. Belum terdapat Tiang Penunjuk Arah;
 - b. Belum Terdapat Jalur Khusus Disabilitas dari Lobby sampai ke Meja Pelayanan;
 - c. Loket pelayanan kurang Ramah HAM (Posisi pelayanan berdiri, tidak duduk);
 - d. Tidak adanya pencatatan pengunjung yang datang (Data ini nantinya akan berguna untuk dipakai saat pelaksanaan Survey SHPZI terhadap pengunjung yang datang);
2. Evaluasi terhadap kendala dalam komitmen membangun Zona Integritas:
 - a. Kantor Wilayah Lampung Belum memiliki Video Jingle
 - b. Seluruh pegawai belum komitmen terhadap pembangunan Zona Integritas;
 - c. Acuhnya pegawai termasuk Tim Pokja terhadap Pembangunan Zona Integritas;
 - d. Pengumpulan data dukung yang sering telat/kadang tidak dikerjakan;

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Reformasi birokrasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung harus dilakukan berdasarkan panduan yang telah diberikan, namun sebelumnya para pelaksana reformasi birokrasi harus memahami terlebih dahulu apa itu hakikat reformasi birokrasi dan mengenal 8 Area Perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Penguatan Pengawasan, Peraturan Perundangan Undangan, Kelembagaan, Penataan Ketatalaksanaan, Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, sehingga dalam pelaksanaannya dapat lebih optimal dan memenuhi target reformasi birokrasi.
2. Reformasi Birokrasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diharapkan menghasilkan perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN.

B. Saran

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung harus sejalan dengan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional dan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia serta implementasi delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang sudah ditetapkan, maka perlu adanya inovasi-inovasi yang dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

2. Seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung harus memiliki komitmen yang sama dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
3. Program Reformasi Birokrasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung perlu dilaksanakan secara berkesinambungan.

Demikian Laporan ini dibuat sebagai bahan informasi dan evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dibuat di Bandar Lampung
pada tanggal 21 Desember 2021

Plt.Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Iwan Santoso
NIP. 19700430 199103 1 001

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH LAMPUNG**

Jl. Rw. Jl. Wolter Monginsidi No.184, Tlk. Betung Utara,
Kota Bandar Lampung, Lampung 35224



**EVALUASI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS
KANWIL KEMENKUMHAM
LAMPUNG
PERIODE TAHUN 2021**

*KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
LAMPUNG*

Iwan Santoso

Plt. Kepala Kantor Wilayah Lampung

**PENCANANGAN
PEMBANGUNAN ZI**

PEMBANGUNAN ZI

PENILAIAN OLEH TPI

**PENGUSULAN SATKER KE
KEMENPAN RB**

PENGUATAN KEMBALI

PENILAIAN OLEH TPN

TAHAP PEMBANGUNAN ZI

A. PENCANANGAN

1. Deklarasi/Pernyataan kesiapan;
2. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas secara serentak;
3. Publikasi Pencanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM;
4. Penandatanganan Piagam Pencanaan Pembangunan ZI.

B. PEMBANGUNAN ZI

1. Pelaksanaan Survei IPK/IKM.
2. Pemenuhan Data Dukung Area Perubahan

C. PENILAIAN OLEH TPI

D. PENGUSULAN SATKER KE KEMENPAN RB

E. PENGUATAN KEMBALI

F. PENILAIAN OLEH TPN

Evaluasi Sarana Prasarana



Belum terdapat Tiang Penunjuk Arah;



Loket pelayanan kurang Ramah HAM (Posisi pelayanan berdiri, tidak duduk);



Tidak adanya pencatatan pengunjung yang datang (Data ini nantinya akan berguna untuk dipakai saat pelaksanaan Survey ZI)



Belum Terdapat Jalur Khusus Disabilitas dari Lobby sampai ke Meja Pelayanan

Evaluasi Komitmen Pembangunan ZI

Komitmen



Seluruh pegawai belum komitmen terhadap pembangunan Zona Integritas;



Acuhnya pegawai termasuk Tim Pokja terhadap Pembangunan ZI;



Pengumpulan data dukung yang sering telat/kadang tidak dikerjakan;



Kantor Wilayah Lampung Belum memiliki Video Jingle

**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBK
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG
TAHUN 2022**

TAHAPAN	TANGGAL
Pembentukan Tim Pokja Pembangunan ZI Kantor Wilayah Lampung dilakukan dengan rapat pendahuluan penetapan kriteria Tim ZI dengan melaksanakan proses Assesment yang dilakukan oleh Pimpinan Tinggi Pratama dengan hasil penerbitan SK Tim Pokja Pembangunan ZI Kantor Wilayah Lampung Nomor W9-222.OT.03.01 Tahun 2021	15 Januari 2021
Pencanangan Pembanguna Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Kantor Wilayah Lampung	10 Februari 2021
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas oleh Tim POKJA Kantoir Wilayah Lampung pada Lapas Kelas IIA Kalianda dan Lapas Kelas IIA Metro	22 Februari 2021
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas oleh Tim POKJA Kantoir Wilayah Lampung pada Lapas Kelas I Bandar Lampung	24 Februari 2021
Pengusulan Satuan Kerja Menuju WBK dan WBBM Kepada Unit Eselon I, Kantor Wilayah mengusulkan 26 Satuan Kerja menuju WBK dan 1 Satuan Kerja menuju WBBM melalui surat W9.OT.03.01-1535	30 Maret 2021
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas oleh Tim POKJA Kantoir Wilayah Lampung pada Lapas Kelas IIB Kotaagung, Rutan Kelas IIB Kotaagung, Bapas Kelas II Pringsewu	06 April 2021
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas oleh Tim POKJA Kantoir Wilayah Lampung pada Lapas Kelas I Bandar Lampung	07 April 2021
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas oleh Tim POKJA Kantoir Wilayah Lampung pada Lapas Kelas IIA Kalianda dan Kanim Kelas III Kalianda	09 April 2021
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas oleh Tim POKJA Kantoir Wilayah Lampung pada Lapas Narkotik Kelas IIA Bandar Lampung, Kanim Kelas I Bandar Lampung, Bapas Kelas II Bandar Lampung, LPP Kelas IIA Bandar Lampung, Rutan Kelas I Bandar Lampung, dan Rupbasan Kelas I Bandar Lampung	12 April 2021

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas oleh Tim POKJA Kantor Wilayah Lampung dan pendampingan Tim TPI pada Kanim Kelas III Kotabumi, Lapas Kelas IIB Kotabumi, dan Rutan Kelas IIB Kotabumi	24 April 2021
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas oleh Tim POKJA Kantor Wilayah Lampung dan pendampingan Tim TPI pada Lapas Kelas IIA Kalianda dan LPP Kelas IIA Bandar Lampung	27 April 2021
Penilaian Desk Evaluasi oleh Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung	20-27 April 2021
Hasil Panel Penilaian TPI berdasarkan Surat Inspektorat Jenderal Nomor ITJ.PW.03.01VI-32 Tanggal 05 Agustus 2021 tentang Satuan Kerja yang diusulkan ke TPN.	05 Agustus 2021
Penguatan Pembangunan Zona Integritas oleh Tim TPI untuk Satker yang diusulkan TPN	19 Agustus 2021
Pendampingan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) menuju WBK dan WBBM pada Jaringan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung	14 September 2021
Pelaksanaan Survey Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi (SHPRBZI)	06-12 Oktober 2021
Penilaian Desk Evaluasi Tim Penilai Nasional (TPN) dan Pengumuman Satuan Kerja yang mendapat Predikat WBK dan WBBM pada kegiatan Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Lapas Kelas IIA Kotabumi - Lapas Kelas IIA Kalianda 	20 Desember 2021



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Kuningan,
Jakarta Selatan 12940, P.O. Box 3489, Telepon/Faksimili 021-5252975
Laman: <http://www.itjen.kemenkumham.go.id>, Email: itjen@kemenkumham.go.id

**BERITA ACARA EVALUASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK TAHUN 2021
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-02.OT.03.01 tahun 2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal (TPI) Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2021 serta Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor: ITJ.KP.04.016-30 tanggal 8 April 2021, Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

No	Uraian Area Perubahan	Nilai Area	Nilai Evaluasi	Nilai Minimal Area
A	Evaluasi Komponen Pengungkit	60	41,69	40
1.	Manajemen Perubahan	8,0	5,34	4,8
2.	Penataan Tatalaksana	7,0	4,95	4,2
3.	Penataan Manajemen SDM	10	7,95	6,0
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10	6,95	6,0
5.	Penguatan Pengawasan	15	9,49	9,0
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10	7,02	6,0
B	Evaluasi Komponen Hasil	40	37,70	34,5
1.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	20	19,10	18,5
2.	Kualitas Pelayanan Publik	20	18,60	16
Nilai Minimal Menuju WBK				75
Nilai Hasil Evaluasi Zona Integritas				79,39
Nilai Pelaporan LHKPN dan LHKASN				100

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Internal (TPI) maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung **DAPAT DIUSULKAN** sebagai satuan kerja **berpredikat menuju WBK** kepada Panel Tim Penilai Internal (TPI) karena **TELAH** memenuhi syarat nilai Indikator Hasil dan Indikator Pengungkit sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

Mengetahui,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Lampung



Danan Purnomo
NIP. 19610513 198203 1 001

Bandar Lampung, 23 April 2021

Tim Evaluasi
Pengendali Teknis,

Aminullah Noor Pakpahan
NIP. 19640621 199303 1 001

Ketua Tim

Raden Bagus Wasito Utomo
NIP. 19830123 200703 1 002

Anggota Tim

Firman Septa Firdaus
NIP. 19820904 200604 1 001

Anggota Tim

Januarino Aditya
NIP. 19830121 201012 1 001

Lampiran:

**BERITA ACARA EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG
TAHUN 2021**

No	Uraian Area Perubahan	Nilai Area	Nilai Evaluasi	Nilai Minimal Area	Catatan Hasil Evaluasi TPI
A	Evaluasi Komponen Pengungkit	60	41,69	40	
1	Manajemen Perubahan	8,0	5,34	4,8	
	a. Tim Kerja	1,0	0,75		- sebagian menggunakan prosedur yang mewakili sebagian besar unsur dalam unit kerja;
	b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas	2,0	1,25		- sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; - pengelolaan media/aktivitas interaktif dilakukan secara terbatas dan tidak secara berkala;
	c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	3,0	1,34		- sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; - monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan tetapi tidak secara berkala; - sebagian besar catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti;
	d. Perubahan pola pikir dan budaya kerja	3,0	2,00		- agen perubahan telah ditetapkan namun belum berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya; - telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir tapi masih terdapat resistensi atas perubahan; - sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM (mis: membuat yel-yel, slogan/motto banner, poster dll);
2.	Penataan Tatalaksana	7,0	4,95	4,2	
	a. prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama	2,0	1,45		- semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; - unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi; - sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP;
	b. E-Office	4,0	3,00		- unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi; - unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi

				informasi secara terpusat;
	c. Keterbukaan Informasi Publik	1,0	0,50	- sudah terdapat PPID yang menyebarkan Sebagian informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap;
3.	Penataan Manajemen SDM	10	7,95	6,0
	a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	0,5	0,45	- sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan;
	b. Pola Mutasi Internal	1,0	0,83	- sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi;
	c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	2,5	1,74	- sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; - persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50%; - sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; - unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai; - monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan namun tidak secara berkala;
	d. Penetapan kinerja individu	4,0	3,67	- sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya;
	e. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	1,5	1,01	- unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi;
	f. Sistem Informasi Kepegawaian	0,5	0,25	- data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan namun secara berkala;
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10	6,95	6,0
	a. Keterlibatan pimpinan	5,0	2,78	- sebagian pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perencanaan; - sebagian pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perjanjian kinerja; - seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja tetapi tidak ada tindak lanjut hasil pemantauan;
	b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	5,0	4,17	- sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah SMART; - sebagian pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja;

					- pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian SDM yang kompeten;
5.	Penguatan Pengawasan	15	9,49	9,0	
	a. Pengendalian Gratifikasi	3,0	1,76		- public campaign dilakukan secara berkala; - Unit Pengendalian Gratifikasi, upaya pengendalian gratifikasi telah mulai dilakukan
	b. Penerapan SPIP	3,0	1,88		- unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; - melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; - unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; - SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait;
	c. Pengaduan Masyarakat	3,0	1,88		- unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; - Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan. - penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi; - hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
	d. Whistle-Blowing System	3,0	1,88		- unit kerja menerapkan kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; - penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi; - sebagian hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
	e. Penanganan Benturan Kepentingan	3,0	2,11		- sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada sebagian besar tugas fungsi utama; - penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar layanan; - penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar layanan;
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10	7.02	6,0	
	a. Standar Pelayanan	3,0	1,88		- unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi; - unit kerja memaklumkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; - unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;

	b. Budaya Pelayanan Prima	4,0	2,47		- sudah terdapat sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima pada sebagian besar pegawai yang memberikan pelayanan; - sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi;
	c. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	3,0	2,67		- dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat;
B	Evaluasi Komponen Hasil	40	37,70	34,5	
1.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	20	19,10	18,5	
	a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	15	14,10	13,5	Nilai Hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi QR Kode Balitbangham tidak memenuhi jumlah Responden dan untuk memenuhi persyaratan satker membawa Laporan Survey Mandiri
	b. Nilai Persentase Penyelesaian TLHP	5	5	5	Tidak terdapat hutang penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, ITJEN dan ORI
2.	Kualitas Pelayanan Publik	20	18,60	16	
	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	20	18,60	16	Nilai hasil survei eksternal atas persepsi korupsi Code Balitbangham telah melebihi yang dipersyaratkan
Nilai Minimal Menuju WBK				75	
Nilai Hasil Evaluasi ZI				79,39	
Nilai Pelaporan LHKPN dan LHKASN				100	
Rekomendasi Usulan ZI				DAPAT DIUSULKAN SEBAGAI SATUAN KERJA BERPREDIKAT MENUJU WBK PADA PANEL TPI	
Rekomendasi Perbaikan				<p>Berdasarkan hasil evaluasi pembangun ZI menuju WBK pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung tahun 2021, direkomendasikan agar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung melakukan peningkatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan Monitoring dan Evaluasi di segala aspek Zona Integrasi WBK/WBBM secara berkala dan berkelanjutan; 2. Lebih ditingkatkan dalam kelengkapan data dukung pada Pembangunan Zona Integritas; 3. Lebih ditingkatkan lagi kinerja Tim Pokja yang dibentuk dalam membangun Zona Integritas dan 	

menampilkan inovasi-inovasi pelayanan;
4. Agar Tim Pokja lebih mendalami pemahaman terkait pelaksanaan pembangunan zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Bandar Lampung, 23 April 2021

Mengetahui,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Lampung



Tim Evaluasi
Pengendali Teknis,

Aminullah Noor Pakpahan
NIP. 19640621 199303 1 001

Ketua Tim

Raden Bagus Wasito Utomo
NIP. 19830123 200703 1 002

Anggota Tim

Firman Septa Firdaus
NIP. 19820904 200604 1 001

Anggota Tim

Januarino Aditya
NIP. 19830121 201012 1 001

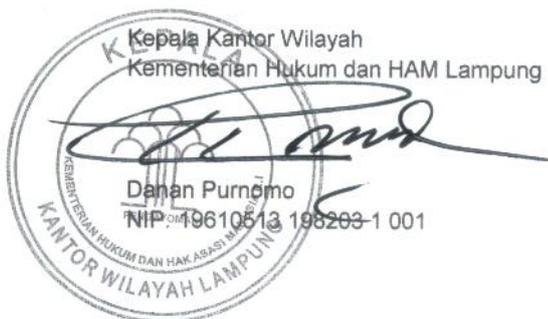


LEMBAR KERJA EVALUASI (LKE)
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG
TAHUN 2021

NAMA SATUAN KERJA :	:	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG
USULAN PEMBANGUNAN ZI :	:	SATUAN KERJA ZI MENUJU WBK
NILAI KOMPONEN PENGUNGKIT	:	41,69
NILAI KOMPONEN HASIL	:	37,70
NILAI TOTAL EVALIASI	:	79,39
SIMPULAN HASIL EVALUASI	:	DAPAT DIUSULKAN SEBAGAI SATUAN KERJA BERPREDIKAT MENUJU WBK PADA PANEL TPI

PENILAIAN				Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Nilai Minimal Area	Keterangan
A.	PROSES (60)								
	I.	MANAJEMEN PERUBAHAN (8)		8,0		5,34	66,78%	4,80	
		1	Tim Kerja (1)	1,0		0,75	75,00%		
		a.	Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas?	Y/T	Ya	1			Ya, jika Tim telah dibentuk di dalam unit kerja.
		b.	Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas?	A/B/C	B	0,5			a. Jika dengan prosedur/mechanisme yang jelas dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja; b. Jika sebagian menggunakan prosedur yang mewakili sebagian besar unsur dalam unit kerja; c. Jika tidak di seleksi.

B. HASIL (40)									
J. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)			20,0			19,10	96%	18,50	
1.	Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)	15,0	0-4	3,76	14,10	94,00%		13,50	Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi
2.	Persentase Penyelesaian TLHP (Internal dan eksternal) (5)	5,0	0-100%	100,00%	5,00	100,00%		5,00	Diisi dengan BA Hasil Tindak Lanjut Temuan BPK, ITJEN dan ORI
II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)			20,0			18,60	93%	16,00	
1.	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20)	20,0	0-4	3,72	18,60	93,00%		16,00	Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan
TOTAL HASIL		40,0			37,70	94,25%		34,50	
NILAI EVALUASI ZONA INTEGRITAS					79,39			75,00	



Bandar Lampung, 23 April 2021

Pengendali Teknis

Aminullah Noor Pakpahan
NIP. 19640621 199303 1 001

Ketuan Tim

Raden Bagus Wasito Utomo
NIP. 19830123 200703 1 002

Anggota Tim

Firman Septa Firdaus
NIP. 19820904 200604 1 001

Anggota Tim

Januarino Aditya
NIP. 19830121 201012 1 001



REKAPITULASI USULAN SATUAN KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Kantor Wilayah/Satuan Kerja	Komponen Pengungkit					Komponen Hasil			Nilai Evaluasi	Rekomendasi	
		MP	PT	PMS	PAK	PP	PKPP	Nilai IPK	Nilai IPP			Nilai TLHP
1	Kantor Wilayah Kemenumham Lampung	5,34	4,95	7,95	6,95	9,49	7,02	14,1	18,6	5	79,39	Dapat Diusulkan ke PANEL TPI
2	lapas Kelas IIA Kalianda	5,44	5,45	7,95	8,62	12,38	9,50	19,70	19,95	5	88,97	Dapat Diusulkan ke PANEL TPI
3	lapas Kelas IIA Kotabumi	5,81	4,70	7,84	8,62	13,30	9,43	19,33	19,40	5	88,42	Dapat Diusulkan ke PANEL TPI
4	Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Dapat Diusulkan ke PANEL TPI
5	Rutan Kelas IIB Sukadana	4,89	3,55	7,62	6,95	8,81	5,84	19,29	19,00	5	75,95	Tidak Dapat Diusulkan ke PANEL TPI
6	Rutan Kelas IIB Menggala	4,89	4,45	6,19	6,01	9,04	7,15	19,66	19,40	5	76,79	Dapat Diusulkan ke PANEL TPI
7	Rutan Kelas IIB Kotabumi	5,06	4,45	7,45	6,95	10,88	6,39	19,74	19,65	5	80,57	Dapat Diusulkan ke PANEL TPI
8	Rutan Kelas IIB Krui	5,34	3,7	6,56	6,95	9,94	6,77	14,18	19,05	5	77,48	Tidak Dapat Diusulkan ke PANEL TPI
9	Rupbasan Kelas I Bandar Lampung	5,34	3,97	7,95	6,95	9,21	5,63	18,61	18,30	5	75,96	Tidak Dapat Diusulkan ke PANEL TPI
10	Rupbasan Kelas II Metro	5,34	3,95	5,13	6,33	9,19	6,02	19,10	19,20	5	74,25	Tidak Dapat Diusulkan ke PANEL TPI
11	Rupbasan Kelas II Kotabumi	3,87	3,72	6,25	6,95	8,81	5,75	17,44	19,61	5	72,39	Tidak Dapat Diusulkan ke PANEL TPI
12	Kanim Kelas I TPI Bandar Lampung	5,22	5,11	9,37	8,85	9,94	7,35	13,88	18,55	5	83,26	Dapat Diusulkan ke PANEL TPI
13	Kanim Kelas III Non TPI Kotabumi	6,91	4,58	8,48	9,48	11,70	8,46	19,63	19,40	5	88,64	Dapat Diusulkan ke PANEL TPI
14	dst											
JUMLAH TOTAL SATKER USULAN											13	
JUMLAH SATKER YANG DIUSULKAN KE PANEL TPI											7	
JUMLAH SATKER YANG TIDAK DAPAT DIUSULKAN KE PANEL TPI											6	
JUMLAH SATKER USULAN WBK KE PANEL TPI											6	
JUMLAH SATKER USULAN WBBM KE PANEL TPI											0	

Bandar Lampung, 27 April 2021

Pengendali Teknis TIM II

Aminullah Noor Pakpahan
NIP. 19640621 199303 1 001

Ketuan Tim II

Raden Bagus Wasito Utomo
NIP. 19830123 200703 1 002

Anggota Tim II I

Firman Septa Firdaus
NIP. 19820904 200604 1 001

Anggota Tim II

Januarino Aditya
NIP. 19830121 201012 1 001



REKAPITULASI HASIL DESK EVALUASI TIM TPI I
SATUAN KERJA MENUJU WBK/WBBM DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG TAHUN 2021

No	Unit Kerja	NILAI KOMPONEN PENGUNGKIT						TOTAL NILAI KOMPONEN PENGUNGKIT	NILAI KOMPONEN HASIL	TOTAL NILAI LKE	HASIL DESK EVALUASI TPI
		MP	PT	PMSDM	PAK	PP	PKPP				
1	Lapas Kelas I Bandar Lampung	6.02	4.33	8.36	7.99	10.14	7.9	44.75	39.19	83.94	DAPA DIUSULKAN KE PANEL TPI SEBAGAI SATKER MENUJU WBK
2	LPP Kelas IIA Bandar Lampung	6.26	4.58	8.2	8.93	10.32	7.17	45.48	39.38	84.85	DAPA DIUSULKAN KE PANEL TPI SEBAGAI SATKER MENUJU WBK
3	Rutan Kelas I Bandar Lampung	3.85	3.67	6.97	7.99	10.33	6.79	39.59	38.17	77.76	GUGUR PADA AREA PERUBAHAN I DAN II
4	Rutan Kelas IIB Kota Agung	6.47	4.45	7.22	7.68	9.9	7.14	42.86	39.02	81.88	DAPA DIUSULKAN KE PANEL TPI SEBAGAI SATKER MENUJU WBK
5	Bapas Kelas II Metro	5.49	4.36	7.44	7.99	9.58	7.86	42.72	36.63	79.35	DAPA DIUSULKAN KE PANEL TPI SEBAGAI SATKER MENUJU WBK
6	Bapas Kelas II Kotabumi	5.52	3.05	7.02	7.68	9.38	7.86	40.51	38.33	78.84	GUGUR PADA AREA PERUBAHAN II
7	Lapas Kelas IIA Metro (WBBM)	4.6	4.58	7.28	8.62	11.13	8.39	44.27	36.7	80.97	GUGUR PADA AREA PERUBAHAN I, II, III, DAN V
8	Lapas Kelas IIB Gunungsugih	6.22	4.58	6.75	8.31	10.51	7.08	43.44	38.83	82.27	DAPA DIUSULKAN KE PANEL TPI SEBAGAI SATKER MENUJU WBK
9	Kanim Kalianda	7.53	4.45	7.21	7.37	10.14	7.48	44.18	37.14	81.33	DAPA DIUSULKAN KE PANEL TPI SEBAGAI SATKER MENUJU WBK
10	Bapas Kelas II Bandar Lampung	5.54	4.58	6.85	6.25	7.01	6.78	37.01	38.46	75.47	GUGUR PADA NILAI AKHIR KOMPONEN PENGUNGKIT
11	Bapas Kelas II Pringsewu	4.6	2.8	7.58	7.68	9.96	7.46	40.07	37.31	77.38	GUGUR PADA AREA PERUBAHAN I DAN II
12	Lapas Kelas IIB Kota Agung	5.97	4.36	7.58	8.62	10.32	6.58	43.43	37.74	81.17	DAPA DIUSULKAN KE PANEL TPI SEBAGAI SATKER MENUJU WBK
13	Lapas Kelas IIB Way Kanan	4.67	4.2	6.09	7.99	9.01	6.86	38.82	35.01	73.83	GUGUR PADA NILAI AKHIR KOMPONEN PENGUNGKIT DAN HASIL
14	LPKA Kelas II Bandar Lampung	6.22	3.7	7.16	8.93	9.38	6.41	41.8	32.12	73.93	GUGUR PADA AREA PERUBAHAN II DAN KOMPONEN HASIL

Bandar Lampung, 26 April 2021
Tim Penilai Internal,

Setiawati
NIP. 19620823 198310 2 001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH LAMPUNG**

**Jl. Rw. Jl. Wolter Monginsidi No.184, Tik. Betung Utara,
Kota Bandar Lampung, Lampung 35224**